

# Jantra

Jurnal Sejarah dan Budaya

## Kota dan Pengembangan Wilayah

- ▶▶ Gemeente Pasuruan 1918-1942
- ▶▶ Gianyar Kota Budaya : Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771 - 1980-an
- ▶▶ Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota:  
Perubahan Ekologi Kota Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial
- ▶▶ Batu Malang: Dari Kota Perkebunan Ke Kota Agrowisata
- ▶▶ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh, Kembang Dan Pudarnya Pelabuhan Tuban
- ▶▶ Konflik Antarkomunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis Di Sampit, Kalimantan Tengah
- ▶▶ Diskursus Cacah Dalam Pengelolaan Agraria Keraton Yogyakarta Abad Ke 18-19
- ▶▶ Permukiman Kota Dan Masalahnya Kasus Kota Yogyakarta

<b>Jantra</b>	<b>Vol. V</b>	<b>No. 10</b>	<b>Hal. 819- 934</b>	<b>Yogyakarta Desember 2010</b>	<b>ISSN 1907 - 9605</b>
---------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Terakreditasi B, Nomor : 152/Akred-LIPI/P2MBI/03/2009



**Jantra** dapat diartikan sebagai roda berputar, yang bersifat dinamis, seperti halnya kehidupan manusia yang selalu bergerak menuju ke arah kemajuan. Jurnal **Jantra** merupakan wadah penyebarluasan tentang dinamika kehidupan manusia dari aspek sejarah dan budaya. Artikel dalam Jurnal **Jantra** bisa berupa hasil penelitian, tanggapan, opini, maupun ide atau pemikiran penulis. Artikel dalam **Jantra** maksimal 20 halaman kuarto, dengan huruf *Times New Romans*, font 12, spasi 2, disertai catatan kaki dan menggunakan bahasa populer namun tidak mengabaikan segi keilmiahannya. Dewan Redaksi **Jantra** berhak mengubah kalimat dan format penulisan, tanpa mengurangi maksud dan isi artikel. Tulisan artikel disampaikan dalam bentuk *file Microsoft Word* (disket, CD), dialamatkan kepada: Dewan Redaksi **Jantra**, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamsa 139 (nDalem Joyodipuran), Yogyakarta 55152, Telp. (0274) 373241 Fax. (0274) 381555 E-mail: [jantra@bpsnt-jogja.info](mailto:jantra@bpsnt-jogja.info).

Pelindung	Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Penanggung Jawab	Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
Penyunting Ahli	Prof. Dr. Djoko Suryo Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto Dr. Lono Lastoro Simatupang Dr. Y. Argo Twikromo
Pemimpin Redaksi	Dra. Sri Retna Astuti
Sekretaris Redaksi	Dra. Titi Mumfangati
Anggota Dewan Redaksi	Suhatno, BA. Drs. Darto Harnoko Dra. Endah Susilantini Dra. Siti Munawaroh
Distribusi	Drs. Sumardi
Dokumentasi/Perwajahan	Wahjudi Pantja Sunjata

Alamat Redaksi :

BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA  
Jalan Brigjen Katamsa 139 (nDalem Joyodipuran), Yogyakarta 55152  
Telp. (0274) 373241 Fax. (0274) 381555  
E-mail: [jantra@bpsnt-jogja.info](mailto:jantra@bpsnt-jogja.info)  
Website: <http://www.bpsnt-jogja.info>

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya **Jantra** Volume V, No. 10 Desember 2010 dapat hadir kembali di hadapan pembaca. Edisi **Jantra** kali ini memuat 8 (delapan) artikel di bawah tema Kota dan Pengembangan Wilayah. Ke delapan artikel ini masing-masing : 1). *Gemeente Pasuruan 1918-1942* yang ditulis oleh Dwi Ratna Nurhajarini menguraikan tentang permasalahan yang krusial pada waktu itu, apakah yang dilakukan pemerintah kolonial setelah Pasuruan mendapat status sebagai sebuah *Gemeente*; 2). A.A. Bagus Wirawan menulis tentang Gianyar Kota Budaya : Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771 - 1980-an. Ia menguraikan secara historis perkembangan Gianyar sejak kemunculannya hingga saat ini sebagai pusat seniman berkarya dan menjadi sebutan kota seni; 3). Purnawan Basundoro menulis tentang Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota : Perubahan Ekologi Kota Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial, yang menguraikan tentang embrio Kota Surabaya yang ada di kawasan pedesaan agraris di tepi pantai, namun seiring dengan kedatangan orang-orang Eropa kawasan tersebut berubah menjadi kawasan kota; 4). Batu Malang: Dari Kota Perkebunan Ke Kota Agrowisata tulisan Retna Astuti menguraikan tentang perkembangan Kota Batu yang semula merupakan kota perkebunan, dengan adanya otonomi daerah Kota Batu berkembang menjadi satu Kota Agrowisata yang cukup potensial bagi kemajuan pariwisata; 5). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh, Kembang Dan Pudarnya Pelabuhan Tuban, ditulis oleh Taryati, membicarakan tentang pelabuhan Tuban sejak awal hingga masa kejayaannya sebagai pelabuhan dagang. Namun adanya faktor geografis maka pelabuhan Tuban dipindahkan kelain tempat sehingga pelabuhan Tuban mengalami kemunduran; 6). Bambang H. Suta Purwana menguraikan tentang konflik antar komunitas etnis di Sampit, Kalimantan Tengah oleh elit masyarakat lokal dimanfaatkan sebagai wahana representasi dan sekaligus penguatan identitas etnis Dayak untuk merebut kembali martabat mereka sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi Dayak yang berdaulat di tanah leluhurnya. Uraian ini diberi judul Konflik Antar komunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis Di Sampit, Kalimantan Tengah; 7). Ivanovich Agusta menulis tentang Diskursus Cacah Dalam Pengelolaan Agraria Keraton Yogyakarta Abad Ke 18-19. Disini diuraikan tentang cacah yang merupakan bagian dari rakyat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak melalui tenaga kerja. Diskursus Cacah memungkinkan alokasi surplus sumberdaya dari lapisan sosial rendah kepada elite dan sebaliknya dapat mengembangkan solidaritas cacah dengan elitnya; 8). Permukiman Kota Dan Masalahnya Kasus Kota Yogyakarta, yang ditulis oleh Sukari menguraikan tentang permasalahan perkotaan yang terjadi saat ini terutama adanya konversi lahan pertanian menjadi permukiman, sehingga perkembangan Kota Yogyakarta bergerak ke daerah pinggiran.

Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para mitra bestari yang telah bekerja keras membantu kami dalam penyempurnaan tulisan dari para penulis naskah sehingga **Jantra** edisi kali ini bisa terbit.

Selamat membaca.

*Redaksi*

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b><i>Pengantar Redaksi</i></b>	<b>ii</b>
<b><i>Daftar Isi</i></b>	<b>iii</b>
<b><i>Gemeente Pasuruan 1918-1942</i></b> Dwi Ratna Nurhajarini	<b>819</b>
<b><i>Gianyar Kota Budaya : Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771 - 1980-an</i></b> A.A. Bagus Wirawan	<b>831</b>
<b><i>Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota: Perubahan Ekologi Kota Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial</i></b> Purnawan Basundoro	<b>845</b>
<b><i>Batu Malang: Dari Kota Perkebunan Ke Kota Agrowisata</i></b> Retna Astuti	<b>862</b>
<b><i>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh, Kembang Dan Pudarnya Pelabuhan Tuban</i></b> Taryati	<b>870</b>
<b><i>Konflik Antarkomunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis Di Sampit, Kalimantan Tengah</i></b> Bambang H. Suta Purwana	<b>883</b>
<b><i>Diskursus Cacah Dalam Pengelolaan Agraria Keraton Yogyakarta Abad Ke 18-19</i></b> Ivanovich Agusta	<b>897</b>
<b><i>Permukiman Kota Dan Masalahnya Kasus Kota Yogyakarta</i></b> Sukari	<b>920</b>
<b>Biodata Penulis</b>	<b>931</b>

## BIODATA PENULIS

DWI RATNA NURHAJARINI, lahir di Yogyakarta 1966, sarjana Sejarah UGM, memperoleh gelar Magister Humaniora Ilmu Sejarah UGM tahun 2003. Sebagai Staf Peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, aktif melakukan penelitian kesejarahan serta duduk sebagai sekretaris I di dalam organisasi profesi kesejarahan Masyarakat Sejarahwan Indonesia (MSI) cabang Yogyakarta tahun 2006 – 2010. Hasil karya yang telah diterbitkan antara lain: *ORI, Perannya Dalam Perjuangan Bangsa (1946–1950)*; *Sanering Uang Tahun 1950: Studi Kasus “Gunting Syafrudin” Akibatnya dalam Bidang Sosial Ekonomi di Indonesia (1997/1998)*; *Peranan Masyarakat Sumbertirto Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan 1948 – 1949 (1998/1999)*; *Pertanian dan Ekonomi Petani: Studi Ekonomi Pedesaan di Yogyakarta 1920-1935 (1999/2000)*; *Dinamika Industri Batik Pekalongan 1930 -1970 (2001)*; *Diversifikasi Pakaian Perempuan: Studi Tentang Perubahan Sosial di Yogyakarta 1940 – 1950 (2002)*; *Batik Belanda: Wanita Indo Belanda dan Bisnis “Malam” di Pekalongan 1900 – 1942 (2003)*; *Petani Versus Perkebunan Pada Masa Reorganisasi Agraria: Studi Kasus di Klaten (2004)*.

A. A. BAGUS WIRAWAN, lahir di Denpasar, Bali pada tahun 1948. Memperoleh gelar S1 dalam ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Sarjana Utama/SU (S2) ilmu Sejarah diperolehnya di Universitas Gadjah Mada, dan gelar doctor (S3) pada ilmu yang sama diperolehnya pada Agustus 2008. Saat ini menjadi Guru Besar Bidang Sejarah Indonesia di Jurusan Sejarah Fak. Sastra Univ. Udayana Denpasar, dengan pangkat Lektor Kepala Bidang Sejarah. Sebagai seorang dosen aktif mengikuti seminar dan diskusi di tingkat lokal maupun nasional, baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah. Di samping itu aktif menulis di surat kabar maupun jurnal, dan tulisan-tulisannya tentang kesejarahan dan kebudayaan banyak yang sudah diterbitkan.

PURNAWAN BASUNDORO, S.S., M.Hum., adalah staf pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya. Saat ini Kandidat Doktor di Universitas Gadjah Mada, dan sedang menyelesaikan disertasinya yang berjudul "Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang di Kota Surabaya 1900-1960-an". Aktif melakukan penelitian dengan tema sejarah perkotaan. Dapat dihubungi di: [pbasundoro@yahoo.com](mailto:pbasundoro@yahoo.com).

RETNA ASTUTI, lahir di Yogyakarta pada tahun 1953, sarjana sejarah pada Fakultas Sastra UGM tahun 1981. Pada tahun 1983 – 1986 bekerja pada Proyek Javanologi Balitbang Dikbud di Yogyakarta. Tahun 1987 menjadi PNS di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, sebagai staf peneliti. Menjadi pengurus harian organisasi profesi Masyarakat Sejarahwan Indonesia (MSI) periode 2001 – 2006 dan 2006 – 2010. Sebagai peneliti sering mengikuti diskusi atau pun seminar kesejarahan dan kebudayaan. Hasil karyanya antara lain: *Peranan Dapur Umum Pada Masa Revolusi 1949 – 1950: Sebuah Studi Awal*; *Organisasi Wanita Tamansiswa Dan Paham Kebangsaan*; *Peranan SWK – 105 di Gunung Kidul*;

*Transportasi Darat Dari Masa ke Masa; Kereta Api Ambarawa: Suatu Kajian Sejarah Sosial Ekonomi; Industri Mete di Gunung Kidul; Kajian Serat Witaradya; Kajian Serat Sakeber dan lain sebagainya.*

TARYATI, lahir di Kebumen 31 Agustus 1950, Sarjana Geografi IKIP tahun 1978. Sejak tahun 1979 mengabdikan diri sebagai PNS, staf peneliti di Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Jakarta. Tahun 1980 pindah ke Yogyakarta menjadi staf Peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, diskusi, maupun seminar kesejarahan dan kebudayaan. Tahun 1987 menjabat sebagai Kasi Dokumentasi dan Perpustakaan, tahun 2000 - 2006 menjabat Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Tahun 2006 hingga saat ini menjadi peneliti madya. Hasil karya yang telah dipublikasikan antara lain: *Budaya Masyarakat di Lingkungan Kawasan Industri (Kasus: Desa Donoharjo Ngaglik Sleman); Keberadaan Paguyuban dan Etnis di Daerah Perantauan Dalam Menyongsong Persatuan dan Kesatuan (Kasus Paguyuban Keluarga Putra Bali) di Yogyakarta; Persepsi Masyarakat Terhadap Program Transmigrasi (Studi Kasus RW 04 Dusun Sidomulya, Bener, Tegalreja, Kodya Yogyakarta); Implikasi TKW Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Budaya Rumah Tangga di Kecamatan Dolopo Madiun Jatim; Kabupaten Semarang Dalam Perjalanan Sejarah; Penggalan dan Kajian Cerita Rakyat di Kabupaten Blora; Sejarah dan Budaya Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Blora; Pandangan Masyarakat Terhadap Upacara Perlon Unggahan di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas; Sistem Pengetahuan Masyarakat Pulau Bawean Terhadap Hutan Bakau.*

BAMBANG H. SUTA PURWANA, lahir di Kulon Progo 20 Juli 1961, menyelesaikan pendidikan S1 Antropologi dan S2 Program Studi Sosiologi di Universitas Gadjah mada. Saat ini bekerja sebagai staf peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelumnya, selama 9 tahun bekerja sebagai staf peneliti pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak. Tahun 2003, dengan dukungan program Adikarya IKAPI, pernah menulis buku yang berjudul *Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas, 1999: Suatu Tinjauan Sosial Budaya.*

IVANOVICH AGUSTA, lahir tanggal 16 Agustus 1970 di Kudus, Jawa Tengah. Memperoleh gelar S1 Sarjana Pertanian pada tahun 1993 dari IPB, tahun 1997 memperoleh gelar Master Sains (MSi) dari IPB yang kesemuanya diperolehnya dengan cumlaude. Sejak tahun 1997 menjadi dosen Program Sarjana (S1) di IPB, Bogor dan sejak tahun 2000 menjadi dosen Program Pascasarjana (S2), di IPB, Bogor. Pernah pula menjadi staf ahli sebagai Pekerja membangun dalam Majalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selain menjadi dosen, juga banyak melakukan penelitian-penelitian di berbagai bidang bekerjasama dengan departemen-departemen seperti PU, BKKBN, Diperindag, Deptan, Bapenas maupun dengan perusahaan BUMN (PTPN X, BRI), dan lain-lain. Selain melakukan penelitian juga aktif menulis artikel yang dimuat di koran-koran lokal maupun nasional (Kompas,

Suara Merdeka, Pikiran Rakyat), majalah (Basis), dan jurnal (Jantra, Journal of Asia and Pacific Studies, Wacana, Sodality, dsb). Buku-buku hasil penelitian yang telah diterbitkan antara lain: Jejak-Jejak Kesejahteraan: Evaluasi Benefit Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal yang diterbitkan oleh Binasiamindo; Agribisnis Berbasis Komunitas: Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial (Penerbit: Pustaka Wirausaha Muda); Sosiologi Industri: Landasan Analisis Agribisnis diterbitkan oleh Program Diploma Manajemen Agribisnis, IPB; Sosiologi Umum (Penerbit: Dokis); Wanita Bersama Pria: Bibliografi Pudjiwati Sayogyo (Dokis); Cara Mudah Menggunakan Metodologi Kualitatif Pada Sosiologi Pedesaan (Dokis), dan lain-lain.

SUKARI, lahir pada tanggal 5 Juli 1960 di Pati, Jawa Tengah. Sarjana Geografi UGM, Jurusan Geografi Manusia, lulus tahun 1986. Sejak Tahun 1988 mengabdikan sebagai PNS di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya. Tahun 1986 menjadi Asisten peneliti di Litbang UMY, dan pada tahun yang sama sebagai Tenaga Ahli Demografi untuk Perencanaan Kota di PT. Mirash Konsultan. Pada tahun 1991 pernah mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian yang diselenggarakan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bekerjasama dengan LPIST (Lembaga Pengembangan Ilmu Sosial Transformatif). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar dan diskusi yang berhubungan dengan kesejarahan dan kebudayaan. Hasil karya yang telah dipublikasikan antara lain: *Kehidupan Sosial Ekonomi Budaya Pengodol Kapuk di Desa Karaban, Gabus, Pati Jawa Tengah*; *Peranan Wanita Dalam Rumah Tangga Nelayan di Desa Bendar, Juwana, Pati, Jawa Tengah*; *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Tengger, Pasuruan, Jawa Timur*; *Interaksi Sosial Budaya Antara Sukubangsa Bugis, Makasar dengan Sukubangsa Jawa di Desa Kemujan Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah*; *Peninggalan Sejarah Purbakala Kabupaten Kudus Jawa Tengah*; *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura, Jawa Timur*; *Makam Sunan Muria: Pengaruhnya Terhadap Pariwisata dan Masyarakat Sekitarnya, di Kudus, Jawa Tengah*.

Ralat **Jantra** Vol. V, No. 10, Desember 2010

Tertulis	Seharusnya
Setelah Halaman 915 langsung 920 dst terdapat halaman loncat dalam penulisan	Halaman 915, 916, 917, ... dst

## GEMEENTE PASURUAN 1918-1942

Dwi Ratna Nurhajarini \*

### Abstrak

*Tulisan ini membahas tentang Gemeente Pasuruan pada tahun (1918-1942). Permasalahan yang krusial adalah apakah yang dilakukan pemerintah kolonial setelah Pasuruan mendapat status sebagai sebuah gemeente. Penelitian ini berdasar pada metode sejarah, yakni pengumpulan bahan, kemudian dilakukan kritik ekstern dan intern, lalu dilakukan interpretasi. Tahapan selanjutnya berupa penulisan. Untuk dapat menarasikan Pasuruan pada masa tersebut maka sumber-sumber primer yang terkait dengan permasalahan menjadi sebuah keharusan. Pasuruan pada masa gemeente mendapatkan sumber keuangannya dengan cara menarik pajak dari warga. Gemeente Pasuruan juga berbenah diri dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan dan infrastruktur lainnya untuk memberi kenyamanan bagi warga kota. Pembentukan gemeente juga memungkinkan warga pribumi duduk dalam dewan kota (gemeenteraad) dan juga walikota (burgemeester), yang menjadi tempat “penggodogan” untuk menjadi seorang politikus lokal.*

*Katakunci: kota, gemeente, Pasuruan*

### Pengantar

Pada masa kolonial, beberapa status menempel pada Pasuruan, yakni sebagai ibukota sebuah karesidenan, kabupaten, maupun kota. Dengan begitu dalam sebuah ruang yang bernama Pasuruan, banyak aktivitas pemerintahan yang berlangsung. Gambaran Pasuruan pada masa kerajaan dituliskan oleh F.A. Sutjipto dalam disertasinya yang menyebutkan bahwa pada abad ke-15-16 gambaran tentang Pasuruan masih agak gelap. Berita adanya peperangan antara raja Pasuruan dengan raja Blambangan (*Palemboan*) pada akhir abad ke-16 merupakan suatu petunjuk bahwa di Pasuruan berkuasa seorang raja (penguasa daerah) yang memiliki sejumlah pasukan bersenjata. Ada

dugaan bahwa pada masa itu Kota Pasuruan telah dikelilingi oleh dinding kota, setidaknya-tidaknya dari kayu.<sup>1</sup>

Gambaran tentang Pasuruan agak terang melalui diskripsi yang ada dalam *Tjariosipoen Babad Kitha Pasoeroean*. Babad itu menceritakan Pasuruan pada pertengahan abad ke-18 tatkala masa pemerintahan Bupati Nitiadiningrat. Kota Pasuruan kala itu dihuni oleh berbagai etnis. Pemandangan dalam kota terlihat indah karena ditata dengan baik. Jalan-jalan selalu dibersihkan. Kota itu makmur dan terkenal sampai luar daerah. Banyak pedagang yang membawa barang dagangan dan mendapat hasil yang banyak. Pedagang yang keluar masuk Pasuruan dari Cina, Mandar, Bawean, Bugis dan juga Sumbawa.

\* Penulis adalah staf peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta

<sup>1</sup> F.A. Sutjipto Tjijtoatmodjo, “Kota-Kota Pantai Di Sekitar Selat Madura 9Abad XVII Sampai Medio Abad XIX”. *Disertasi* belum diterbitkan, (Yogyakarta : UGM, Fak. Sastra), 1983, hal. 263.

Perdagangan antara Pasuruan dengan Madura juga diceritakan cukup ramai.

Kedudukannya sebagai pusat atau ibukota karesidenan menjadikan Kota Pasuruan sebagai denyut nadi kegiatan politik pemerintahan, yang kemudian diikuti oleh kedudukannya sebagai sentra perkebunan dan industri gula. Kemudian juga didukung oleh keberadaan adanya sebuah pelabuhan yang berada di sisi utara Kota Pasuruan. Keberadaan pelabuhan sebagai tempat transaksi dan bongkar muat barang tersebut menjadikan Pasuruan seakan 'hidup terus'. Dengan banyaknya perkebunan dan pabrik gula yang ada di Pasuruan maka banyak orang-orang Eropa yang kemudian tinggal di Pasuruan, di samping itu tentunya adalah para pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu kemudian wajah kolonial tampak sangat kentara di Pasuruan. Apalagi tatkala Pasuruan diberi status sebagai sebuah *gemeente* (kotapraja) pada tahun 1918. Permasalahan yang menarik dengan status baru sebagai sebuah *gemeente* adalah apakah yang dilakukan pemerintah kolonial dengan pemberian status tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka data yang berasal dari sumber primer yang sezaman sangat penting keberadaannya untuk dapat menuliskan narasi tentang Pasuruan masa *gemeente* ini.

Perkembangan dan perubahan suatu kota dapat terjadi karena faktor eksternal maupun internal. Mumford menyebutkan bahwa kota merupakan pertemuan yang teratur dengan maksud untuk mengadakan kontak perdagangan dan kerohanian.<sup>2</sup> dari aspek ekonomi yang disebut kota jika penduduknya

hidup dari kegiatan non-agraris. Daerah tersebut memiliki fungsi kultural, industri dan perdagangan. Dari aspek sosial, sebuah daerah disebut kota jika hubungan antar penduduk bersifat impersonal, sepintas lalu, dan hidup dengan kepentingan masing-masing yang berbeda.<sup>3</sup> Menurut Max Weber, kota adalah tempat pertemuan untuk berdagang. Daerah itu mempunyai hukum tersendiri, dan sanggup menyediakan jasa bagi keperluan penduduknya.<sup>4</sup> Pengertian kota dari aspek hukum berkaitan dengan adanya hak-hak hukum atau peraturan-peraturan tersendiri bagi penghuni kota. Pada masa kolonial, aturan-aturan semacam itu diwujudkan dalam simbol status *gemeente*. *Gemeente* pada dasarnya adalah menyebut sebuah pemerintahan kotapraja yang berarti kota dengan struktur administrasi yang otonom.

## **PEMBENTUKAN *GEMEENTE* PASURUAN**

### **Awal Pelaksanaan Desentralisasi di Daerah Pasuruan**

Kebijakan desentralisasi secara resmi diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903 melalui Undang-Undang Desentralisasi. Tujuan pemberlakuan Undang-Undang tersebut adalah dimungkinkan adanya pembentukan daerah-daerah otonom di seluruh wilayah Hindia Belanda. Hal ini dipandang perlu karena sistem sentralisasi yang digunakan tidak mampu lagi mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat lokal. Dengan sistem desentralisasi, pemerintah pusat mulai menyerahkan urusan dan kepentingan lokal kepada pemerintah

---

<sup>2</sup> Lewis Mumford, *The City in History; Its origins, Its Transformation and Prospects* (New York: 1961), hal. 31.

<sup>3</sup> N. Daldjoeni, *Geografi Desa dan Kota* (Bandung: Alumni, 1998), hal 40-42.

<sup>4</sup> Max Weber, "Apa yang disebut Kota" dalam Sartono Kartodirdjo, (ed), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hal. 27-28.

daerah setempat.<sup>5</sup> Pada prinsipnya Undang-Undang Desentralisasi bertujuan memberi kemungkinan diadakannya daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri.

Kebijakan desentralisasi ini diterapkan untuk seluruh Hindia Belanda, termasuk di dalamnya Kota Pasuruan. Desentralisasi berarti mulai diselenggarakan sebuah pemerintahan lokal. Dalam bentuk pemerintahan ini masalah keuangan umum, personalia dan proyek-proyek lokal yang ditujukan untuk kepentingan wilayah *Gemeente* Pasuruan tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat. Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum Negara tidak lagi mengurus keperluan di tingkat lokal. Peraturan tentang pembentukan *Gemeente* Pasuruan terdapat dalam Lembaran Negara tanggal 1 Juli, tahun 1918 nomor 320.<sup>6</sup>

Kota Pasuruan yang mendapat status sebagai *Gemeente* (kotapraja) berdasar *Staatsblad* tahun 1918 No 320. Dalam keputusan tersebut, diresmikan pembentukan *Gemeente* Pasuruan dan pembentukan sebuah Dewan Kota (*Gemeenteraad*) yang mengatur pengelolaan yang sebelumnya menjadi wewenang pusat. Bidang yang masih menjadi tanggung jawab finansial negara adalah pengelolaan dinas kereta api dan *tram*. Pasuruan pada tahun 1928 melalui *Staatsblad* tahun 1928 No. 502 diubah menjadi sebuah *stadgemeente* (kotamadia).<sup>7</sup>

Pada tahun 1922 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Reformasi Pemerintahan 1922 (*Bestuurhervorming Wet 1922*), muncul pembagian wilayah dalam bentuk

propinsi. Propinsi ini membawahi beberapa *Gewest*. Di dalam propinsi ini terdapat *Provinciale Raad*. Sebagian besar anggota *Provinciale Raad* ini dipilih dan diangkat oleh Gubernur Jendral dan sebagian lainnya diangkat berdasarkan pemilihan oleh dewan setempat. Para anggota *Provinciale Raad* adalah dari orang Belanda, pribumi dan Timur Asing. Masa jabatan Dewan Propinsi (*Provinciale Raad*) adalah empat tahun, dan untuk dapat duduk dalam dewan harus memenuhi persyaratan tertentu. Karena propinsi mempunyai sumber pendapatan sendiri, maka dewan punya wewenang menetapkan anggaran dan peraturan-peraturan, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar peraturan.

*Provinciale Raad* inilah yang mengangkat *College van Gedeputeerden* (Dewan Pemerintah Harian Propinsi). Badan yang diketuai oleh Gubernur ini bertugas untuk menjalankan pimpinan dan pelaksanaan sehari-hari dalam lingkup propinsi.<sup>8</sup> Pada perkembangan selanjutnya, badan ini juga mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kota (*gemeente*). Badan itu juga berhak mengeluarkan uang dalam batas yang telah ditetapkan dalam anggaran.

Inti dari Undang-Undang itu adalah melakukan pengaturan dan pembaharuan kembali sistem pemerintahan yang ada. Untuk memudahkan pelaksanaan otonomi maka dalam melaksanakan pemerintahan dilakukan beberapa pembagian, yakni pembagian administratif, kenegaraan, dan organik.

Secara ringkas, sebagai

<sup>5</sup> Darmiati, dkk, *Otonomi Daerah Di Hindia Belanda 1903-1940* (Jakarta : ANRI bekerja sama dengan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation, 199), hal. xv.

<sup>6</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1918 No 320. Decentralisatie Pasuruan.*

<sup>7</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1928 No. 502*

<sup>8</sup> Darmiati, *op. cit.*, hal. xxiv.

konsekuensi pertama dari kebijakan di atas adalah pemerintah kota harus membangun berbagai infrastruktur penunjang masyarakat kota. Dalam kasus *Gemeente* Pasuruan pembangunan berbagai infrastruktur ini berlangsung dari tahun 1918 hingga 1930. Beberapa infrastruktur ada yang merupakan peninggalan pemerintahan *Gewest*. Setelah tahun 1930 kegiatan yang ada sebagian besar hanyalah pemeliharaan. Berbagai kebutuhan kota seperti perawatan pemeliharaan jalan dan prasarana umum, penerangan jalan, pemadam kebakaran dan makam menjadi wewenang pemerintah kota sejauh tidak membebani desa-desa. Untuk pembangunan yang membutuhkan biaya besar, masih dimungkinkan adanya usaha untuk memperoleh dukungan keuangan dari Pusat.<sup>9</sup>

Konsekuensi kedua dari peraturan ini adalah dibentuknya sebuah Dewan yang disebut *Gemeenteraad Pasuruan*. Jumlah anggota dewan ini ada 13 orang yang terdiri dari atas 8 orang Belanda, 4 orang pribumi, dan 1 Timur Asing. Ketua Dewan bertindak selaku kepala pemerintahan lokal untuk *Afdeeling Pasuruan*. *Gemeenteraad Pasuruan* ini mulai berwenang mengatur segala urusan kerumahtanggaan, pemasukan dan pengeluaran mulai tanggal 1 Juli 1918.<sup>10</sup> Wilayah *Gemeente* Pasuruan ini mencakup sebagian besar Onderdistrik Kota.

*Gemeente Pasuruan* pada tahun 1918 memiliki luas wilayah seluas 1367 hektar yang dihuni oleh 33.000 ribu warga kota, terdiri dari 700 Eropa, 3200 orang Cina dan Timur Asing, serta

29.000 orang bumi putera.<sup>11</sup> Sebagaimana *gemeente-gemeente* lain, *Gemeente Pasuruan* mengalami perkembangan yang cukup pesat sebagaimana yang ditujukan pada anggaran tahun 1918 hingga 1930. *Gemeente* berusaha memusatkan perhatian perkembangan kota ini. Salah satu usahanya antara lain di bidang penerangan listrik dan perbaikan jalan. Penerangan dengan listrik diperbaiki dan diperluas, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh *gemeente* juga bertambah besar. Dibandingkan dengan tahun 1920, mencapai tiga kalinya di tahun 1930, yakni sekitar f. 15.000. Pada akhir tahun 1929 untuk pertama kalinya subsidi dari pemerintah bisa diperoleh guna perbaikan jalan. Dengan subsidi itu semua jalan utama diaspal atau dikeraskan, luasnya mencapai 110 ribu meter persegi, dengan panjang 22 kilometer. Kebutuhan akan prasarana lalu-lintas yang cepat dan modern pada saat itu, mendorong dewan kota untuk menjamin tersedianya jalan-jalan yang bagus dan aman. Pembukaan dan pembuatan trotoar secara rutin dianggarkan sebesar f. 7-8 ribu per tahun.<sup>12</sup>

Dalam perluasan campur tangan kotapraja adalah posisi sekretariat. Pada tahun 1918 posisi sekretariat ditempati oleh seorang sekretaris dan dua orang penulis, dan pada tahun 1930 sudah berkembang menjadi sekretaris, dua orang juru tulis dan tiga orang penulis juga ditambah *oppas*, serta komisi pemegang kas. Dewan juga memutuskan adanya seorang pemegang atau pengelola buku (*kashouder*). Pada anggaran sebelum tahun 1930, ada dana

<sup>9</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1918 No 320.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> F.W.M., *Krechman, 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indie 1905-1930* (Semarang : Uigegeven Vereeniging voor Locale Belangen, 1930), hlm. 422.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 426.

yang ditarik untuk bagian pengelola buku. Dana tersebut juga diperuntukkan bagi para pekerja yang telah memulai pekerjaannya di Gedung Dewan. Komisi pemegang kas (*kashouder*) menangani seluruh masalah keuangan Gedung Dewan. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kotamadya yang dilakukan pada akhir tahun diperketat melalui pengangkatan seorang kontrolir dan seorang pembantu kontrolir. Pada tahap berikutnya, *Gemeente* ini menganggap telah tiba waktunya untuk melengkapi kota dengan bangunan yang berfungsi sebagai balai kota. Lahan dan bangunan milik Hotel Morbeck dibeli dengan harga f. 26.000. Dengan lahan yang baru dibelinya itu memberikan peluang bagi kota untuk mengembangkan perkantoran.<sup>13</sup> Setelah melalui pembangunan dan renovasi pemerintah juga menyediakan perumahan bagi anggota dewan. *Gemeente* ini juga mempercantik diri dengan sebuah taman kecil di tengah kota.

Pada tahun 1930, P.T. Perumahan Rakyat telah berdiri, dan modal awal perusahaan itu sebesar f. 240.000. Tujuan didirikannya perusahaan perumahan adalah untuk memperbaiki kondisi perumahan penduduk kota. Kotapraja juga menaruh perhatian pada praktek-praktek lintah darat, untuk menanggulangi praktek lintah darat atau "China mending", pihak pemerintah membantu dengan cara memberikan kredit pasar bagi para pengunjung pasar (tidak ada keterangan lebih lanjut apakah yang dimaksud pengunjung itu pembeli atau para pedagang sebagai orang yang berdagang di situ).<sup>14</sup>

*Gemeente* ini pernah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah afdeeling Pasuruan yakni : H. De La Parra; J.E. Japer; F.H.G.J. van Leeuwen; C.E. Croes; C.O. Matray; V. Lafontaine; dan C.H.H. Snell. Pada tahun 1928, *Gemeente Pasuruan* dipimpin oleh seorang Walikota. Pejabat Walikota pertama kali adalah H.E. Boissevain.

## Peraturan dan Pembangunan

### 1. Keuangan Kota

Sebuah pemerintahan bisa berjalan kalau ada dukungan dana. Walaupun bukan satu-satunya namun dana merupakan unsur yang penting dalam kehidupan pemerintahan. Pemerintahan Kota dengan demikian harus mampu menggali dan mengatur sumber keuangannya dengan baik. Pada umumnya pemerintahan kota masih mengandalkan pemasukan dari pusat. Sumber-sumber keuangan yang ada pada *Gemeente* umumnya berasal dari pajak lokal dan juga usaha-usaha yang berada di bawah pengelolaan kota. Pajak yang banyak kontribusinya bagi keuangan kota adalah pajak pasar dan rumah sakit (keterangan lebih lanjut ada di bagian lain dari bab ini). Pajak yang mendatangkan pemasukan bagi keuangan kota selain pasar dan rumah sakit, adalah pajak hipotik sebesar 10 sen, pajak hiburan dalam setahun rata-rata mendatangkan pemasukan sebesar 20 %. Dalam tahun 1919 dari pajak hiburan kota mendapat pemasukan sebesar f. 3.620 dan dalam sepuluh tahun, yakni tahun 1929, naik menjadi f. 17.600. Di samping itu pajak motor juga memberi kontribusi bagi keuangan kota, dengan jumlah sekitar f. 7.000 di akhir tahun 1929.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 427.

<sup>14</sup> "Memori Residen Pasuruan (J.M. Jordaen Jr), Agustus 1924" dalam Sartono Kartodjirjo, dkk., *Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*. (Jakarta : ANRI seri Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 10, 1978). Lihat juga F.W.M. Krechman, *Ibid.*, hal. 428.

<sup>15</sup> F.W.M. Krechman, *op.cit.* hal. 426.

Aktivitas pemerintahan kota didukung oleh unit kesekretariatan yang terdiri atas sekretaris dan pegawainya, juru tulis, *oppas* kantor dan *kashouder*. Unit pendukung lain adalah personal teknis bidang pekerjaan umum yang terdiri atas direktur *Gemeentewerken*, *Onder Opzichter*, mantri *opnemer*, juru gambar. Unit lain adalah unit administrasi yang terdiri atas mantri *boekhouder*, seorang *waker*, mandor timbangan (*weegbrug*), juru tulis pribumi dan *oppas* kantor.

*Afgezonderd bedrag* yang diterima Kota Pasuruan tahun 1918 sebesar f. 31.068 dan tahun 1930 sebesar f. 42.975.<sup>16</sup> Sementara itu, Pasuruan sejak ditetapkan sebagai sebuah *Gemeente* sudah harus membayar berbagai keperluan untuk kemajuan sebuah kota. Antara lain harus membayar penambahan aliran listrik sebesar f. 15.000 pada tahun 1920.<sup>17</sup> Dana sebesar f. 26.000 dikeluarkan oleh *Staadgemeente* Pasuruan untuk membeli sebidang tanah. Di atas lahan itu akan didirikan bangunan untuk kantor pemerintah dan perumahan bagi anggota dewan.<sup>18</sup> Pembukaan banjir kanal dibiayai oleh subsidi dari pemerintah sebesar f. 21.000

## 2. Perumahan dan Kesehatan

Perumahan mendapat penanganan yang cukup besar dari pemerintah. PT. Perumahan Rakyat didirikan untuk membantu memperbaiki kondisi perumahan penduduk. *NV Volkhuysvesting* atau P.T. Perumahan Rakyat, didirikan dengan modal pertama sebesar f. 240.000. Rakyat diperbolehkan mendapatkan kredit

untuk perbaikan rumahnya yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Perumahan itu juga membangun perumahan untuk anggota dewan. P.T. Perumahan Rakyat juga menyalurkan kredit untuk perbaikan penggantian atap rumah. Diharapkan rumah-rumah penduduk sudah memakai atap dari genting.

Dalam pengawasan terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan (rumah tinggal) menjadi perhatian bersama antara P.T. Perumahan Rakyat dan Dinas Kesehatan. Khususnya terhadap penduduk yang tinggal di daerah-daerah rawan penyakit baik pes maupun malaria, terutama yang tinggal di daerah pantai. Penduduk daerah pantai dilaporkan hanya menjaga kebersihan tempat tinggalnya apabila ada pengawasan yang ketat dari pemerintah.<sup>19</sup>

Kotapraja Pasuruan mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk dana kesehatan (tanpa subsidi pemerintah pusat). Anggaran itu antara lain untuk pemberantasan penyakit, pembuatan saluran irigasi, perbaikan saluran limbah, pengeringan dan penutupan tambak ikan yang tidak terpakai lagi, dan kegiatan lainnya. Dana yang disediakan untuk urusan kesehatan adalah

- Perbaikan aliran air Kebonsari f.45.000
- Perbaikan Kampung Kepatian f.7.00
- Pemasangan riol Kampung Tegaljagung f.11.500
- Pemasangan riol kompleks Bangilan f.31.000
- Pembuatan got di kampung-kampung f.37.000
- Perbaikan saluran limbah f.7.000

<sup>16</sup> *Decentralisatie Verslag*. Weltevreden : Landsdrukkerij, 1930.

<sup>17</sup> F.W.M. Krechman, *loc.cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hal.428

<sup>19</sup> "Memori Residen Pasuruan (G.H.H. Snell, 20 Juli 1930)" dalam Sartono kartodirdjo dkk, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)* (Jakarta : ANRI, 1978), hal. LXVII.

- Pembukaan saluran limbah di Tamanan f. 5.700
- Pembuatan tempat mandi dan cuci di kampung f. 8.000
- Pembukaan banjir kanal (subsidi pusat) f. 21.000
- Pengeringan kolam ikan seluas 2,5 bau f. 26.000<sup>20</sup>

Di daerah kota pemberantasan penyakit malaria dilakukan dengan bekerja sama antara Dinas Kesehatan bagian malaria Surabaya dan Pemerintah Kotapraja. Pemberantasan dilakukan dengan jalan menutup tambak-tambak ikan yang sudah tidak terpakai atau memperdalam dan membuat saluran pembuangan air bagi tambak yang masih dipakai. Usaha dengan cara itu ternyata dilaporkan cukup efektif dan sejak akhir tahun 1919 angka indeks penduduk yang mengandung bibit malaria di beberapa desa menurun.<sup>21</sup> Dinas Kebersihan kota dalam upaya pemberantasan malaria juga melakukan pengangkutan limbah dari kampung-kampung dan jalan raya kemudian dibawa ke tempat penampungan di kolam ikan yang tidak terpakai dan ditimbuni. Sarana untuk pengangkutan di samping gerobak juga memakai monotrak.<sup>22</sup> Mulai tahun 1927, Kotapraja Pasuruan mempekerjakan seorang mantri malaria. Jumlah mantri yang hanya satu orang itu, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani tentunya masih sangat jauh dari ideal, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh *Gemeente* belum secara signifikan dalam menjangkau warga kota dari kalangan pribumi.

Pemberantasan penyakit, selain malaria juga; *frambusia*, *trachoom*, dan

cacar. Injeksi *salfarsan* diberikan oleh pemerintah agar penduduk terhindar dari penyakit *frambusia*. Penyakit *trachoom* banyak terdapat di wilayah pantai, untuk itu sebuah poliklinik didirikan di daerah Kraton. R. Sadan seorang ahli mata dipercaya untuk mengelola poliklinik tersebut. Kemudian kotapraja membuka lagi sebuah poliklinik di Pasar Pasuruan dan R. Sadan kemudian dipindahkan ke poliklinik yang baru. Dari rumah sakit yang dikelola pemerintah kota, pendapatan yang masuk ke kas sebesar f. 27.000 pada tahun 1925 dan lima tahun kemudian pendapatan dari rumah sakit naik menjadi f. 47.000.<sup>23</sup>

Kota yang berada dekat dengan pantai juga rawan terkena banjir apabila musim hujan tiba. Agar banjir yang melanda kota bisa dicegah, pemerintah telah membuat saluran yang menghubungkan Sungai Trajen Hilir dengan Sungai Gembong di Desa Patempen dan Trajeng. Saluran air itu juga menjadi bangunan *assainering* kota. Untuk kepentingan *assainering* Kota Pasuruan seperti yang sudah di tulis di bagian depan. Pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar, selain pembuatan saluran juga untuk membeli tambak-tambak ikan yang sudah tidak terpakai.

### 3. Pasar

Pasar merupakan salah satu aset yang menguntungkan bagi Pemerintah Kota. Pengelolaan pasar ini dikuasai pada masing-masing administratur pasar. Pemerintah kota menarik retribusi khusus untuk pasar. Pada tahun 1928, *Gemeenteraad* membuat peraturan tentang pasar. Peraturan itu untuk melengkapi peraturan yang sudah ada

<sup>20</sup> F.W.M. Krechman, *loc.cit.*, hal. 428.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. LXIX

<sup>22</sup> F.W.M. Krechman, *loc.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 426

yakni peraturan tanggal 18 Desember 1923 dan tanggal 13 Maret 1924 yang dimuat dalam *Javasche Courant*. Dalam peraturan tahun 1928 No 23 *Gemeenteraad* Pasuruan menetapkan bahwa di kotapraja dibentuk sebuah komisi pasar yang ditunjuk oleh dewan kotapraja. Komisi itu ditempati oleh dua orang. Administratur bisa membawahi seorang ajun administratur, kepala pasar, dan ajun kepala pasar, serta pegawai lain yang tunduk padanya. Untuk pemantauan dan pengawasan sehari-hari serta kebersihan dan ketertiban pasar, dibuat petunjuk tempat-tempat penjualan, serta pungutan retribusi. Administratur pasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan peraturan harus berunding dahulu dengan komisi pasar, putusan itu ditandatangani ketua *Gemeenteraad Pasuruan* V. Lafontaine.<sup>24</sup> Pembagian pasar dan administrasi seluruhnya telah diperbaiki dan diharapkan dengan pengelolaan pasar tersebut dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam laporan tahunan, los-los semi permanen sudah diperkuat dengan beton ikat. Tempat penjualan yang berada di sekitarnya telah ditinggikan lantainya dan diusahakan selalu kering. Penyelesaian dari berbagai pasar ini tak akan dapat terlaksana tanpa dukungan dana yang besar. Pasar Besar juga tak dapat diperluas tanpa biaya besar untuk membeli lahan untuk bangunan Pasar Besar.

Sampai tahun 1930-an, pasar merupakan pemasok uang tertinggi ke kas pemerintah kota. Tahun 1919 pasar menyeter f. 34.000, dan lima tahun kemudian tahun 1924 dana yang masuk mencapai f. 52.000. Kemudian tahun

1929, naik lagi menjadi f. 81.000.<sup>25</sup>

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan, menurut sumber lisan, penduduk kota rata-rata patuh dalam membayar pajak. Disamping karena faktor takut kepada tindakan tegas *gemeente*, pajak-pajak tertentu yang dikenakan kepada sebagian besar masyarakat pribumi relatif tidak terlalu memberatkan. Sebagai contoh, dalam pajak sepeda *gemeente* mewajibkan adanya *ploomber* (tanda pengenalan pada sepeda) untuk mencegah timbulnya potensi ketidakpuasan atau keluh kesah. Pajak-pajak lain yang bernilai tinggi seperti pajak *verponding* lebih banyak diterapkan pada warga Eropa.<sup>26</sup>

#### 4. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan

Sebuah kota tentunya memerlukan sarana dan prasarana agar kehidupan di dalam kota terasa nyaman. Distribusi barang dan juga aktivitas penduduk bisa lancar. Untuk itu jalan-jalan yang bagus dan aman sangat diperlukan bagi kenyamanan sebuah kota. Tidak terkecuali Kota Pasuruan. Kota ini pernah mendapat subsidi dari pusat guna memperbaiki jalan sepanjang 22 km. Dana sekitar f. 12.000 - f. 22.000 diambil dari keuangan kota setiap tahunnya untuk perbaikan dan perawatan jalan dan jembatan. Pembuatan trotoar juga menyita banyak anggaran, karena setiap tahun dikeluarkan anggaran sekitar f. 7.000 - f. 8.000. Pemerintah kota juga menganggarkan untuk pembelian pemecah batu, namun sampai tahun 1930, program itu belum bisa direalisasikan. Sementara itu pendapatan dari pajak jalan hanya kecil. Pajak jalan, minuman, kendaraan, anjing dan,

---

<sup>24</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie*. 1928.

<sup>25</sup> F.W.M., Krechman, *op.cit.* hal. 426.

<sup>26</sup> Wawancara dengan H. Unung Sutjahjo, di Pasuruan.

perapian setiap tahun berkisar f. 12.000.<sup>27</sup> Dewan Kotapraja (*Gemeenteraad*) pada tanggal 7 Agustus 1931 menetapkan peraturan tentang pungutan untuk pajak jalan. Sementara itu ada sebuah kritikan yang ditujukan pada dewan tentang turunnya peraturan itu, yakni apakah peraturan itu tidak memberatkan para wajib pajak.<sup>28</sup>

Direktur PU, tanggal 28 Oktober 1918 berkirim surat kepada Ketua Dewan Kotapraja Pasuruan (*Gemeenteraad*) tentang lingkup kerja yang menjadi kewenangan Kotapraja, dan PU menyangkut lahan di pelabuhan. Tanggal 28 Maret 1919, Ketua Dewan Kotapraja Pasuruan membalas surat dari direktur PU setelah sebelumnya mengadakan rapat dengan anggota dewan. Inti surat itu adalah bahwa Dewan Kotapraja Pasuruan pada dasarnya menerima rancangan telah yang telah diusulkan dan dibahas bersama. Dalam kaitannya dengan lahan, bangunan dan infrastruktur lain yang berada di wilayah pelabuhan, selain Kotapraja, dan PU, yang juga berkepentingan adalah Dinas Kereta Api dan *Tram*. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral tanggal 2 Juni 1920, No. 44, ditetapkan bahwa lahan milik negara yang berada di pelabuhan menjadi wewenang PU, kecuali infrastruktur yang dikelola oleh Kotapraja dan Dinas Kereta Api dan *Tram*.<sup>29</sup> Di lahan pelabuhan itu ada sebuah bangunan yang berfungsi untuk bongkar muat barang yang dikelola Kotapraja Pasuruan.

## DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT

### 1. Ekonomi

Status *gemeente* bagi Kota Pasuruan sedikit banyak memperlihatkan adanya sosok modern sebuah kota, yang di dalamnya menjanjikan berbagai fasilitas menarik bagi warganya. Daya tarik karena pembangunan yang dilaksanakan oleh kota itu akhirnya memberi dinamika tersendiri bagi warga kota. Berbagai pembangunan yang telah dilakukan dan beberapa peraturan yang ditetapkan mendapat apresiasi masyarakat secara berbeda.

Dalam bidang perdagangan berbagai aturan tentang pasar yang diterapkan terkadang membuat usaha menjalankan perdagangan menjadi lebih rumit. Kerumitan ini secara tidak langsung memunculkan fenomena penjual jalanan. Penjual jalanan ini menjadi masalah yang cukup kompleks dan menyita perhatian di *stadsgemeente-stadsgemeente* karena menyangkut masalah sosial ekonomi. Pemerintah kota pada umumnya melihat problem penjual jalanan (pedagang kaki lima) ini terletak pada masalah kesehatan, ketertiban dan lalu lintas umum.

Pusat perdagangan yang berada di sekitar pasar menjadi milik orang Eropa dan China juga sedikit warga timur Asing. Penduduk pribumi dalam bidang perdagangan hanya memegang “kelas kecil” atau skala kecil, para pedagang Chinalah yang memegang peran penting. Permasalahan lain yang muncul di pasar adalah berkembangnya lintah darat. Pasar Kotapraja Pasuruan kemudian membuka kesempatan bagi para pedagang-pedagang kecil yang mayoritas golongan pribumi untuk mendapatkan kredit. Usaha yang ditujukan untuk mengurangi aktivitas “Cina Mendring” tersebut sampai tahun

<sup>27</sup> F.W.M., Krechman, *loc. cit.*

<sup>28</sup> *Locale Belangen*, hal. 1091-1092.

<sup>29</sup> *Besluit No. 44, 22 Juni*. ANRI, Jakarta.

1930 dilaporkan cukup berhasil.<sup>30</sup>

## 2. Kesehatan, Penerangan, dan Kebersihan

Apabila melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Kotapraja dalam bidang kesehatan, nampak membutuhkan hasil yang menggembirakan. Penyakit malaria, pes, *trachoom*, *frambusia*, bisa diatasi dengan baik. Hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa masalah kesehatan meningkat dengan baik. Pemerintah memang telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk urusan kesehatan warganya. Poliklinik dibangun agar bisa memenuhi kebutuhan warga kota. Kotapraja Pasuruan memiliki poliklinik yang pegawai-pegawainya dari golongan pribumi. Para pasien yang berobat juga orang-orang pribumi. R. Sadan seorang ahli mata dari penduduk pribumi ditempatkan di poliklinik tersebut.

Kebersihan kota menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kegiatan pembangunan dan peraturan dikeluarkan agar kebersihan kota terjamin. Terkait dengan kebersihan yang diharapkan oleh pemerintah, maka yang juga menunjang agar kota menjadi cantik adalah sebuah penerangan dalam hal ini listrik. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membuat kotanya terang memakan biaya yang juga besar. Namun ternyata tidak semua warga kota bisa menikmati aliran listrik, sebab aliran itu hanya menjangkau daerah-daerah Eropa (pemukiman Eropa), dan juga pemukiman China, sedangkan untuk rakyat pribumi masih sedikit. Penerangan jalan juga begitu, dipasang di tempat-tempat yang banyak warga

Eropa dan China.<sup>31</sup>

## 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan mobilitas secara vertikal. Agar bisa duduk dalam pemerintah *gemeente* seseorang harus memiliki kemampuan baca tulis. Untuk itu bidang pendidikan merupakan jalan menuju “kursi *gemeente*”.

Pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pasuruan ada dasarnya sama dengan ketika pemerintah dipegang residensi. Kursus pertukangan dibuka dan mendapatkan perhatian yang besar dan warga kota.<sup>32</sup> Dengan adanya penghematan anggaran gedung-gedung sekolah negeri tidak lagi dibangun dengan biaya dari Dinas Pekerjaan Umum, pembiayaan kemudian dialihkan kepada Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. Pada tingkat HIS pernah terjadi anak-anak yang akan masuk ditolak oleh pihak sekolah. Penolakan itu bukan karena persyaratannya kurang, namun karena keterbatasan tempat.

Di Pasuruan terdapat HIS Negeri, HIS bersubsidi dan *Schakelschool* yang dikelola oleh Perserikatan Guru Bantu. Muhammadiyah juga mempunyai HIS, disamping itu ada HIS yang khusus untuk anak perempuan. Untuk anak-anak Eropa ada sebuah ELS. Sekolah itu selain menerima anak-anak Eropa, yang boleh masuk ke ELS adalah murid-murid dari etnis China. Sedang dari pribumi yang boleh masuk hanya anak-anak elit. Untuk murid-murid China ada HCS.<sup>33</sup>

Dari sekolah yang ada tampak bahwa penyelenggaraan pendidikan di Pasuruan ada tiga penggolongan yakni sekolah untuk anak-anak dari warga

---

<sup>30</sup> “Memori Residen Pasuruan”... *op.cit.*, hal. LXXIV.

<sup>31</sup> Wawancara dengan H. Sulaiman, warga Kota Pasuruan, pada tanggal 5 Oktober 2005.

<sup>32</sup> F.W.M., Krechman, *op.cit.*, hal. 428.

<sup>33</sup> “Memori Residen Pasuruan”... *op.cit.*, hal. LXXIV.

Eropa, China dan pribumi. Dari segi penjenjangan, pendidikan yang diselenggarakan di Kota Pasuruan mencakup jenjang dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah pertukangan, sekolah antara, hingga sekolah khusus untuk perempuan. Pada tahun 1932 seorang kepala sekolah swasta mendapat gaji yang cukup tinggi, dan setara dengan gaji para pegawai Eropa.<sup>34</sup> Oleh karena itu dia bisa masuk dalam kelompok orang-orang atas.

## PENUTUP

Pasuruan yang telah lama muncul dalam percaturan politik, ekonomi dan pemerintahan pada tahun 1918 mendapat status sebagai *gemeente* bersama kota-kota lainnya. Perjalanan yang dilaluinya membuat Pasuruan menjadi sebuah kota yang hibrid, antara kota tradisional dengan segala ciri-cirinya, dan kota kolonial juga dengan segala atribut yang menyertai.

Sebagai sebuah kota yang otonom, Pasuruan berhasil mengelola dan mencari sumber keuangannya sendiri. Pemasukan bagi keuangan *gemeente* di dapat dari berbagai pajak, dan pemasukan yang paling besar berasal dari pajak pasar dan rumah sakit. Pemerintah kota sibuk dengan upaya memperindah dan mempercantik diri dengan membangun dan memperbaiki beberapa bangunan kota seperti membuat kantor walikota, taman kota, penerangan listrik, air leding, sekolah, poliklinik Semua pembangunan tersebut

dibuat agar kenyamanan warga kota terjamin, selain itu juga berusaha menjadi sebuah kota yang modern.

Dalam usahanya menjadi modern setelah menjadi sebuah kotapraja, dinamika kehidupan masyarakat juga mengikutinya. Perkembangan pasar dan stasiun selain menjadi indikasi majunya perekonomian penduduk termasuk penduduk pribumi juga menjadi tempat bagi para pengemis dan gelandangan untuk “mangkal”. Hasil dari pendidikan yang diterima masyarakat adalah sebuah mobilitas vertikal. Seseorang yang telah mendapat pendidikan dapat menduduki atau bekerja pada beberapa sektor seperti menjadi mantri dan ahli mata, pegawai pasar atau duduk sebagai anggota dewan.

Desentralisasi dan pembentukan daerah-daerah yang otonom dengan pembentukan Dewan Kota, bisa dibilang merupakan suatu kursus politik bagi para anggota dewan yang berasal dari golongan pribumi. Dengan kedudukannya sebagai anggota dewan mereka bisa memperjuangkan kepentingan golongan pribumi dalam menentukan arah kebijakan untuk kota. Walaupun anggota yang dimiliki oleh Dewan Kota Pasuruan dari kalangan pribumi hanya empat orang, namun sedikit banyak itu juga membawa surat lokal, di dalam forum yang mayoritas adalah kolonial. Dan tidak bisa dipungkiri perkembangan dalam *gemeente* memang banyak mengarah pada kepentingan suara kolonial.

## DAFTAR PUSTAKA

*Algemeene Secreterie*. ANRI

*Biografi Prof. D.R., R. Soegarda Poerbakawatja Dari Prigi Purbalingga (1899) Sampai Jogja Kembali (1949)*. Tidak diterbitkan, 2005.

<sup>34</sup> Pada masa itu ada penggolongan gaji A, B, dan C. golongan C adalah untuk orang Eropa. Gaji yang diterima sebagai kepala sekolah swasta sebesar f. 600. *Biografi Prof. DR. R. Soegarda Poerbakawatja. Dari Prigi Purbalingga (1899) Sampai Jogja Kembali (1949)*. Tidak diterbitkan., hal. 60-62.

- Darmiati, *Otonomi Di Hindia Belanda 1903-1940*. Jakarta : ANRI, 1998.
- Decentralisatie Verslag*. Weltevreden : Landsdrukkerij, 1930.
- F.A. Sutjipto Tjiptoatmojo, “Kota-Kota Pantai Di Sekitar Selat Madura (Abad XVII Sampai Medio Abad XIX)”, *Disertasi*, UGM, 1983.
- Furnivall, J.S., *Netherlands India. A Study of Plural Economy*. Cambridge : Cambridge University Press, 1944.
- Harsono, *Hukum Tata Negara. Pemerintah Lokal Dari Masa Ke Masa* Yogyakarta : Liberty, 1992.
- Krechman, F.W.M., *25 Jaren Decentralisatie in Netherlandch-Indie 1905-1930*. Semarang : Uitgegeven Vereeniging voor Locale Belangen, 1930 Aksara, 1977.
- Locale Belangen*. Semarang : Druk van C.A. Misset, 1919-1930.
- Mumford, Lewis, *The City in History : Its Origins, Its Transformation and Prospects*. New York : 1961.
- Nas, P.J.M., *Kota di Dunia Ketiga*. Jakarta : Bharata Karya Aksara, 1979.
- N. Daldjoeni, *Geografi Desa dan Kota*. Bandung : Alumni, 1998.
- R. Reza Hudianto, “Gemeente Madiun,” *Thesis*, Yogyakarta : UGM, 2003.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*. Jakarta : ANRI, 1978.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*. 1918
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*. 1928
- Stibbe, D.G., *Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indie II*. Leiden : s'-Gravenhage : N.V.E.J. Brill, Martinus Nijhoff, 1919.
- Weber, Max “Apa yang disebut Kota” dalam, Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*. Jakarta : Bharatara Karya.

# GIANYAR KOTA BUDAYA : Dari Kota Keraton sampai Kota Seni, 1771 - 1980-an

A.A. Bagus Wirawan \*

## ABSTRACT

*A number of name to seek uniqueness characteristics were attached to cities in foreign countries and in Indonesia that underwent growth and their own dynamic process as a product of historical phenomenon. The city of Paris has the name "City of Fashion or Perfume City", Bandung is City of Flowers, Yogyakarta City of Students,, Denpasar City of Culture, Jakarta is City of Struggle or City of Proclamation", an so on. The giving of name to a city struggle with its environment within an ecosystem. The struggle constituted a process at that time that had been able to present a product of the dynamics of cultural elements which was then made characteristics and uniqueness of a space called city.*

*The name Gianyar comes from a name a kingdom built and functioned as the center of government of a kingdom by Ida Dewa Manggis Sakti, the first King of Gianyar, on April 19, 1771. Since then, the kingdom of Gianyar emerged as a kingdom which had its sovereignty among the other kingdoms in Bali such as Buleleng, Karangasem, Klungkung, Mengwi, Badung, Tabanan, and Bangli. The concept and theory concerning the formation of a city was used as a foundation to explain the birth of a city, a city of kingdom: and "city of art" in its temporary process.*

**Key word:** *city history, keraton city, and dynamics of culture.*

### 1. Pengantar.

Dalam proses sejarah, sebagian besar kota berawal dari komunitas elite bangsawan atau berkat adanya pasar. Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan politik daerah milik seorang bangsawan dapat mendorong orang untuk melakukan perdagangan guna memenuhi permintaan yang hanya dapat terlaksana dengan bekerja ataupun dengan menukar barang. Kota yang berasal dari komunitas seperti itu, barang keperluan keraton, dan istana bangsawan (*puri*) itu seringkali merupakan sumber

pendapatan, bahkan merupakan sumber pokok bagi penduduk daerah. Apabila kondisi demikian itu merupakan konfigurasi yang berlainan dengan desa, maka wajarlah bila kota itu menjadi tempat tinggal raja, para bangsawan, *baudanda bhagawanta* (keraton, puri) maupun tempat pasar, *bencingah*, alun-alun, dan lain-lainnya.<sup>1</sup>

Landasan tipologi terbentuknya Kota Gianyar dan untuk memahaminya mengikuti sejarah perkembangan kota, lokasi serta ekotipenya, fungsinya, dan unsur-unsur sosio-kultural

\* Penulis adalah Guru Besar Bidang Sejarah Indonesia di Jurusan Sejarah Fak. Sastra Univ. Udayana Denpasar

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo. *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial*. (Jakarta: Bharata, 1977).

menggunakan konsep dan tipe-tipe kota seperti yang terdapat di pelbagai negeri.<sup>2</sup> Akan tetapi, untuk menyoroti Kota Gianyar akan dipilih tipe kota yang relevan terutama kota-kota kuno di Asia.<sup>3</sup>

Di kota-kota Asia, apa yang disebut *gilde* belum sepenuhnya terlepas dari ikatan kerabat seperti ikatan klan (*kewangsaan-kewangsaan*) yang sebagai suatu komunitas ingin memegang monopoli dalam suatu pertukangan serta pemasaran hasil karyanya. Dalam kegiatan tukar menukar barang, muncul pula orang-orang asing misalnya Cina atau Arab. Mengenai lokasi kota-kota dapat dikatakan bahwa kota terletak di berbagai lokasi. Suatu lokasi yang sangat kuno ialah puncak gunung atau tempat yang tinggi di tempat kota itu didirikan, untuk keperluan pertahanan. Sedang perluasannya dapat meliputi daratan rendah atau pantai. Arti kota ekonomi itu sering mendorong perluasan ke suatu pelabuhan atau sungai yang dapat dilayari.<sup>4</sup>

Ekotipe kota atau komunitas sosial yang berkembang sangat ditentukan oleh pembagian pekerjaan, antara lain, prajurit, pedagang, pengrajin, yang pada umumnya tinggal di lokasi yang terpisah-pisah. Di kota-kota kuno, pada umumnya kuil atau tempat ibadah menjadi pusat dan lambat laun kota itu berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan serta hiburan. Ada pula kota-kota yang berpusat pada bangunan pertahanan seperti benteng yang kemudian meluas dan mencakup tempat aktivitas perdagangan. Kota-kota di Asia banyak berpusat pada keraton (istana raja)

sedangkan pelbagai lembaga terletak di bagian lain dari kota itu. Pada masa lampau selama berabad-abad, permukaan kota hanya merupakan titik yang tidak berarti di tengah paya-paya, hutan rimba, dan padang belantara. Pemusatan penduduk di tepi beberapa sungai besar, seperti Indus, Tigris, atau di pantai Lautan Tengah, menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, kerajinan, dan peribadahan. Pendeknya mencakup semua aktivitas kebudayaan.<sup>5</sup> Kota pelabuhan yang sekaligus menjadi pusat kerajaan (misalnya Sriwijaya) merupakan komunitas pedagang dari pelbagai golongan etnik yang berasal dari segala penjuru. Tujuan komersiallah yang memungkinkan kehidupan bersama serta memelihara suasana terbuka, suatu kondisi yang sangat berbeda apabila dibandingkan dengan keadaan masyarakat pedalaman (Mataram Hindu di Jawa). Selain itu, ada kota yang merupakan pusat pertahanan juga sekaligus menjadi pusat pemerintahan, tempat kediaman raja, dan pusat agama (Islam, Yogyakarta).

Fungsi kebudayaan kota tercermin pada struktur ekotipenya, yaitu sebagai pusat ibadah, keraton, dan benteng. Konsentrasi kekuasaan kultural dan fisik mendorong terjadinya komunikasi dan kerjasama sesama warga sehingga dapat mempertinggi kreativitas dan produktivitas mereka. Dengan demikian, nyata bahwa kota menjadi sinonim dengan kebudayaan. Selain itu, pelbagai institusi seperti pemerintahan, pusat pemujaan dan upacara, pasar, alun-alun, hiburan akan memperkuat integrasi antara golongan penduduk. Oleh karena itu, kota akan tetap berfungsi untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> M. Irfan Mahmud. *Kota Kuno Palopo: Dimensi Fisik Sosial dan Kosmologi*. (Makasar: Masagena Press, 2003), bab

II

<sup>4</sup> Sartono Kartodirdjo. *op.cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

mengubah kekuasaan menjadi bentuk energi menjadi kebudayaan, dan materi menjadi lambang kesenian. Ketiganya itu merefleksikan kreativitas manusia, yang melalui media itu berusaha merealisasikan dirinya, menemukan identitasnya sebagai makhluk yang berbudaya.<sup>6</sup> Konsep tipologi dan teori tentang terbentuknya kota digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan predikat yang melekat pada Kota Gianyar secara prosesusual di fasal-fasal yang akan dibahas. Akan tetapi untuk menguatkan tipologi dan pemberian predikat terhadap Kota Gianyar yang telah terbangun pada tahun 1771 perlu diketahui beberapa contoh pemberian predikat dari kota-kota lainnya di Nusantara untuk dijadikan pembanding sekaligus landasan pemberian predikat bagi Kota Gianyar yang saat ini berstatus kota kabupaten.

Dalam buku *Jakarta Kota Perjuangan, Jakarta Kota Proklamasi Januari 1945 Januari 1946*, ditulis oleh Susanto Zuhdi, diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1995, dinyatakan bahwa hari jadi Kota Jakarta jatuh pada tanggal 22 Juni 1527.<sup>7</sup> Dari segi ekotipe kota, Jakarta adalah tipe kota bandar atau pelabuhan, di Teluk Jakarta. Kota ini bermula dari sebuah komunitas pada masa Kerajaan Tarumanegara dan kemudian menjadi bandar Kerajaan Padjajaran, dengan nama Kalapa atau lebih dikenal sebagai Sunda Kelapa. Menurut Sukanto, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta oleh Fatahillah pada tanggal 22 Juni 1527 setelah pimpinan pasukan Demak ini mengalahkan tentara Portugis. Nama Jayakarta yang dapat dilafalkan dengan beberapa ragam, Jayakarta, Jakarta,

Jaketra, atau Jacatra, sesungguhnya telah berumur lebih dari empat abad dari tahun 1995. Ketika Belanda dengan VOC (kongsi dagang Hindia Timur) menancapkan kukunya di bumi Nusantara, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia pada tahun 1691. Namun, ketika pendudukan balatentara Jepang berhasil menggantikan kekuasaan Hindia Belanda di Batavia, pemerintah Jepang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta pada tanggal 8 Desember 1942. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Pemerintah RI memutuskan Jakarta sebagai ibukota negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemerintah DKI Jakarta menetapkan bahwa hari jadi kotanya selalu mengacu pada tanggal 22 Juni 1527, bukan momentum pada tanggal lainnya seperti proses perubahan nama yang sudah disebutkan di atas. Setelah mengalami proses perkembangan dan dari proses perjuangan bangsa Indonesia berkulminasi pada tonggak peristiwa 17 Agustus 1945 maka predikat yang melekat bagi kota Jakarta adalah “kota perjuangan” sekaligus “kota proklamasi”.<sup>8</sup>

Sebuah kajian penelitian yang dilakukan oleh tim dari Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta tentang hari jadi Kota Yogyakarta pantas untuk diketahui. Hasil kajian tim telah menunjukkan bahwa hari jadi Kota Yogyakarta ditandai oleh dibangun dan difungsikannya Keraton Yogyakarta Hadiningrat sebagai pusat pemerintahan Kasultanan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 7 Oktober 1756. Temuan tim sejarawan UGM, apa yang diperingati sebagai hari

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Susanto Zuhdi. *Jakarta Kota Perjuangan, Jakarta Kota Proklamasi, Jaman 1945-jaman 1966*. (Jakarta: Pemda DKI, 1995)

<sup>8</sup> *Ibid.*

jadi Kota Yogyakarta yang didasarkan pada keputusan pemerintah RI tentang Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947 yang dikenal selama ini, merekomendasikan untuk ditinjau ulang.<sup>9</sup> Disusul dengan terbitnya sebuah buku yang diberi judul *Yogyakarta ibukota Republik Indonesia*, terbit di Yogyakarta tahun 2002,. Buku edisi lux yang ditulis oleh Suhartono WP dan anggota timnya dengan jelas menyatakan bahwa berdasarkan proses sejarahnya berbagai predikat telah diberikan untuk Kota Yogyakarta. Bermula dari “Kota Keraton” yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 7 Oktober 1756. Selanjutnya berbagai predikat diberikan untuk Kota Yogyakarta seperti “Kota Perjuangan”, “Kota Revolusi”, “Kota Pelajar”, dan terakhir “Kota Budaya dan pariwisata”.<sup>10</sup>

Sebuah buku yang berjudul *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, ditulis oleh Ansar Rahman dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh pemerintah kota Pontianak pada tahun 2000 memberikan gambaran tentang proses lahirnya kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penulis menggambarkan kembali fenomena historis kelahiran Kota Pontianak dengan menggunakan momentum berdirinya kerajaan atau Kasultanan Pontianak dan tokoh pendirinya. Pengalaman mengembara dan sukses berdagang dari seorang tokoh yang bernama Syarif Abdurrahman Alkadri mendorong dia untuk mendirikan pusat perdagangan dan pusat kekuasaan Islam

di Pontianak. Tokoh putra asli Kalimantan Barat ini kemudian menjadi Sultan yang membangun dan mendirikan Kasultanan Pontianak yang berdaulat penuh dan otonom pada tanggal 23 Oktober 1771.<sup>11</sup> Dewasa ini, pemerintah Kotamadya Pontianak merayakan hari jadi kotanya pada tonggak sejarah peranan raja Islam (sultan) Syarif Abdurrahman Alkadri (1739-1808) membangun Kasultanan Pontianak pada tanggal 23 Oktober 1771. Oleh karena itu Kodya Pontianak dapat diberi predikat “Kota Muslim” hingga sekarang. Sesungguhnya periode abad-abad ke13 dan abad ke18 menjadi ciri pertumbuhan dan perkembangan kota-kota muslim dari pesisir hingga ke pedalaman di Nusantara.<sup>12</sup>

## **2. Kota Keraton Gianyar, 1771 - 1960.**

Dua seperempat abad lebih, tepatnya 233 tahun yang lalu, 19 April 1771, sampai diperingati hari jadinya pada 19 April 2004. Ketika kota yang dalam perkembangan selanjutnya nama Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton istana raja yaitu Puri Agung Gianyar oleh Ida Dewa Manggis Shakti, maka sebuah kerajaan yang berdaulat penuh dan otonom telah lahir serta ikut dalam pentas percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali. Persyaratan upacara *skala niskala* untuk berfungsinya Puri Agung Gianyar, keraton sebagai ibukota pusat pemerintahan kerajaan 19 April 1771 itu dapat dijadikan tonggak sejarah lahirnya Kota Keraton Gianyar.<sup>13</sup> Dari tonggak

<sup>9</sup> Tim Pengkajian FIB-UGM, *Laporan Akhir Kajian Hari Jadi Kota Yogyakarta*. (Yogyakarta: FIB-UGM, 2003)

<sup>10</sup> Suhartono, dkk. *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 4 Januari 1946 27 Desember 1949*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002)

<sup>11</sup> Ansar Rahman, dkk. *Syarif Abdurrahman Alkadri Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*. (Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak, 2000)

<sup>12</sup> Uka Tjandrasasmita. *Pertumbuhan dan Perekembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia: Dari Abad XVIII Masehi* (Kudus: Menara Kudus, 2000).

<sup>13</sup> Mahaudiana, *Babad Manggis Gianyar*. (Gianyar: A.A. Gde Taman, 1988), hal. 30

sejarah yang telah ditegaskan oleh raja (*Ida Anake Agung*) Gianyar I, Ida Dewa Manggis yang menggunakan nama alias Manggis Api, Manggis Shakti, dan Manggi Sukawati memberi isyarat kepada pembaca bahwa proses menjadi dan ada itu bisa ditarik ke belakang (masa sebelumnya) atau ditarik ke depan (masa sesudahnya) yang senantiasa menunjukkan nuansa seni dengan segala dinamika dan perkembangannya. Perlu dipahami bahwa sesempit apa pun wilayah kekuasaan kerajaan pada saat baru dibangun tidak akan mengurangi status kedaulatan dan otonomi kerajaan itu memberi peluang semaraknya kreativitas produk kesenian.

Secara geografis, wilayah yang sejak dahulu disebut Gianyar itu ternyata mengalami proses yang telah berlangsung berabad-abad sebelum tonggak sejarah yang sudah disebut di atas dan hanya dua seperempat abad lebih sesudahnya. Oleh karena itu, perlu dipahami dan akan semakin menarik jika generasi sekarang mampu merekonstruksinya dan menangkap makna untuk dijadikan spirit (revitalisasi) menghadapi tantangan saat ini dan yang akan datang.

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di wilayah dan kawasan Gianyar, dapat diduga bahwa telah muncul komunitas di Gianyar sejak 6000 tahun yang lalu. Itu terkait dengan ditemukannya situs atau perkakas (artefak) berupa batu, logam perunggu yaitu *nekara (bulan Pejeng)*, relief yang menggambarkan kehidupan dan candi atau gua di tebing-tebing sungai (*Tukad*) Pakerisan sebagai produk berkesenian pada tahap awal.<sup>14</sup> Setelah ditemukan bukti-bukti tertulis berupa prasasti di atas batu atau logam dapat diidentifikasi

situs pusat kerajaan dari dinasti Warmadewa di Keraton Singamandawa, Bedahulu. Setelah ekspedisi Gajah Mada (Majapahit) dapat menguasai Pulau Bali, maka di bekas pusat markas laskarnya didirikan sebuah keraton, yaitu Keraton Samprangan kemudian menjadi sebuah desa di Kabupaten Gianyar. Keraton ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja adipati (Ida Dalem) Kresna Kepakisan (1350 - 1380). Dia adalah pendiri dari dinasti Ida Dalem Kresna Kepakisan. Keraton Samprangan berusia lebih kurang tiga warsa kemudian keraton pusat Kerajaan Bali itu dipindahkan ke Gelgel oleh putra bungsunya yang bernama Ida Dalem Ketut Ngulesir, (1380 - 1460) raja adipati di Bali. Keraton Gelgel kemudian diberi nama Swecalingsarapura dan berlangsung lebih kurang tiga abad. Selama pusat pemerintahan berada di Gelgel ada lima raja dari keturunan Ida Dalem Kresna Kepakisan yang memerintah yaitu : Ida Dalem Ketut Ngulesir (1380-1460), Ida Dalem Waturenggong (1460 - 1550), Ida Dalem Bekung (1550-1580), Ida Dalem Segening (1580 - 1630), dan Ida Dalem Dimade (1630 - 1651). Selama periode 1651 - 1686 kekuasaan pemerintahan di Gelgel diambil alih oleh I Gusti Agung Maruti, dari keturunan Arya Kepakisan.<sup>15</sup>

Cikal bakal penguasa (raja) yang kemudian dikenal sebagai daerah Gianyar berasal dari keturunan Dalem Segening dan Ida Dalem Dimade. Sementara itu, pada periode yang bersamaan muncul juga dua pusat kekuasaan, yaitu I Gusti Ngurah Jelantik di Blahbatuh dan I Gusti Agung Maruti di Keramas, keduanya berasal dari keturunan Arya Kepakisan, kemudian daerah kekuasaannya diserahkan dan

<sup>14</sup> I Made Sutaba, *Prasejarah Bali*. (Denpasar: Yayasan Purbakala Bali, 1980)

<sup>15</sup> *Babad Dalem, Teks dan Terjemahannya* (Denpasar: Dinas P dan K Bali, 1986)

dimasukkan ke wilayah kerajaan Gianyar.<sup>16</sup>

Periode Gelgel berakhir dengan kekalahan dan berakhirnya kekuasaan I Gusti Agung Maruti pada tahun 1686. Salah satu putra dari Dalem Dimade yang bernama I Dewa Agung Jambe dan dengan didukung oleh laskar gabungan (Singarsa, Denbukit, Badung dan laskar *pering gading oncer ganda* dari desa Beng) dapat merebut kembali tahta kerajaan. Selanjutnya, para *anglurah* yang memimpin laskar gabungan sepakat menobatkan Ida I Dewa Agung Jambe sebagai raja (Ida Dewa Agung). Ida I Dewa Agung Jambe selanjutnya memindahkan keraton pusat pemerintahannya ke Klungkung, yang dinamai Keraton Semarapura. Periode Klungkung sebagai kerajaan yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh berlangsung dua abad lebih, tepatnya 222 tahun (1686 - 1908).

Salah seorang putra Ida Dalem Segening yang bernama Ida I Dewa Manggis Kuning (1600-an) adalah cikal bakal dinasti Manggis yang kemudian muncul setelah generasi IV. Sementara itu, salah seorang putra Ida Dalem Dimade yang bernama Ida I Dewa Agung Pelayun (1640-an) adalah cikal bakal dinasti Pelayun yang muncul setelah generasi II dan yang membangun keraton-keraton pusat kekuasaan di Tampaksiring, Pejeng, dan Kerajaan Payangan (1735-1843) kemudian termasuk wilayah Kerajaan Gianyar. Salah seorang putra dari Ida I Dewa Agung Jambe yang bernama Ida I Dewa Agung Anom muncul sebagai cikal bakal dinasti raja-raja yang berkuasa di Keraton Sukawati (1711-1771). Daerah kekuasaannya kemudian diambil alih

oleh raja Gianyar pada tahun 1771.<sup>17</sup>

Ketiga cikal bakal penguasa yang muncul di Gianyar yang berasal dari dinasti Ida Dalem Kresna Kepakisan sejak periode Gelgel sampai periode Klungkung, mengalami pergumulan, silih-berganti, pasang-surut, malang melintang untuk menuju puncak kekuasaan kerajaan, baik dengan cara kekerasan maupun secara damai. Dinamika pergumulan antara elite tradisional dari generasi ke generasi telah berproses. Pada momentum tertentu, salah seorang di antaranya adalah pembangun kota keraton, atau kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang disebut Gianyar. Pembangun kota kerajaan yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh adalah Ida I Dewa Manggis Shakti, generasi keempat dari Ida I Dewa Manggis Kuning. Berdirinya Puri Agung Gianyar 19 April 1771, yang sekaligus menjadi ibukota, dan pusat pemerintahan Kerajaan Gianyar dipakai sebagai tonggak sejarah. Sejak itu Kerajaan Gianyar yang berdaulat ikut mengisi lembaran sejarah kerajaan-kerajaan di Bali, yang terdiri atas sembilan kerajaan yaitu: Klungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Bangli, Payangan, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Namun, sampai akhir abad ke-19, setelah runtuhnya Kerajaan Payangan dan Mengwi di satu pihak dan munculnya Jembrana di lain pihak, maka hanya ada delapan kerajaan di Bali (*asta negara*), yaitu : Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bandung, Bangli, dan Gianyar.<sup>18</sup>

Petunjuk tertulis dalam dokumen arsip Belanda memberikan bukti kuat

<sup>16</sup> *Ibid.*; lihat juga CC.Berg. *Babad Blah-Batuh* (Santpoort: C.A. Mees, 1932)

<sup>17</sup> *Ibid.*; lihat juga *Babad Dalem Sukawati* (milik A.A. GdeRai, Puri Kandel Sukawati)

<sup>18</sup> *Encyclopedia van Nederlandsh Indie*, 1971

bahwa Kerajaan Gianyar yang memiliki otonomi dan kedaulatan wilayah, kekuasaannya diakui oleh kekuasaan asing Belanda atau kekuasaan pribumi, dan raja-raja di Bali. Surat perjanjian pertama, antara Letkol van Swieten dari pihak *Gubernemen* Hindia Belanda dan Ida I Dewa Pahang dari pihak Kerajaan Gianyar, ditandatangani pada tanggal 25 Juli 1849. Isi perjanjian itu adalah kerjasama untuk saling membantu antara pihak kerajaan pribumi dan pihak asing *Gubernemen*, yang sama-sama memiliki otonomi dan kedaulatan atas wilayah kekuasaannya dan yang secara kenegaraan keduanya berstatus sederajat.<sup>19</sup> Perlu diketahui sejak didirikannya Kerajaan Gianyar oleh raja yang pertama, yaitu Ida I Dewa Manggis Shakti pada tahun 1771 sampai ditandatanganinya surat perjanjian dengan pihak *Gubernemen* oleh Ida I Dewa Pahang (1847 - 1892) yang juga bergelar Ida I Dewa Manggis Mantuk Di Satria, telah terjadi beberapa kali suksesi pewarisan takhta.

Sesudah wafatnya Ida I Dewa Manggis Shakti sebagai peletak dasar Kerajaan Gianyar yang berdaulat penuh, tahta kerajaan diwariskan kepada putera mahkota yang bergelar Ida I Dewa Manggis Di Madya (1814 - 1839), raja Gianyar II. Kekuasaannya berakhir karena wafat kemudian digantikan oleh putera mahkota yang bergelar Ida I Dewa Manggis Di Rangki (1839 - 1847), raja Gianyar III. Kekuasaannya singkat, hanya berlangsung delapan tahun dan berakhir karena wafat.

Pewaris tahta berikutnya adalah Ida I Dewa Pahang atau Ida I Dewa Manggis Mantuk Di Satria (1847 - 1892), raja IV. Gelar Mantuk Di Satria itu diberikan

untuk mengingatkan pada peristiwa bahwa raja ini wafat dalam pengasingan (1885-1892) di Satria (Klungkung). Pengasingan itu melibatkan intervensi dari pihak Ida I Dewa Agung di Kerajaan Klungkung. Raja Gianyar IV, Ida I Dewa Pahang (menurut sumber Belanda) dimusuhi oleh raja-raja Klungkung, Bangli, Badung, Tabanan, dan Mengwi. Setelah Ida I Dewa Pahang berhasil diperdaya dan ditawan oleh Ida I Dewa Agung di Klungkung pada tahun 1885, tahta di Keraton Gianyar mengalami kekosongan sampai wafatnya Ida I Dewa Pahang di pengasingan Satria (Klungkung) pada tahun 1892. Selanjutnya, wilayah kekuasaan Kerajaan Gianyar dikuasai oleh Kerajaan Bangli dan Kerajaan Klungkung.

Ketika Ida I Dewa Manggis Mantuk Di Satria wafat di Satria (Klungkung), kedua puteranya, yaitu Ida I Dewa Pahang dan adiknya Ida I Dewa Gde Raka beserta keluarganya berhasil lolos meninggalkan tempat pengasingan untuk kembali ke Gianyar pada bulan Januari 1893. Berkat dukungan para punggawa yang masih setia di Gianyar, Ida I Dewa Pahang, raja Gianyar V (1893 - 1896), berhasil membebaskan Kerajaan Gianyar dari cengkraman pendudukan raja-raja tetangga sehingga Kerajaan Gianyar berdaulat kembali. Setelah wafat digantikan oleh adiknya yang bernama Ida I Dewa Gde Raka, sebagai raja Gianyar VI. Atas dasar musyawarah dan mufakat dari para manca, punggawa dan dukungan rakyat di Kerajaan Gianyar, maka dinobatkanlah Ida I Dewa Gde Raka, adik dari raja Gianyar V, sebagai raja Gianyar VI (1896 - 1912).<sup>20</sup>

Upacara resmi penobatan sesuai

<sup>19</sup> *Surat-Surat Perjanjian antara Kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1841-1938* (Jakarta: ANRI, 1964)

<sup>20</sup> *Ibid.*

dengan tradisi Bali (*mabiseka ratu*) Ida I Dewa Gde Raka sebagai raja Gianyar VI ini sangat unik karena dilaksanakan setelah penyerahan kedaulatan kerajaannya kepada pemerintah Belanda. Keputusan Ida I Dewa Gde Raka, raja Gianyar VI untuk menempatkan diri di bawah perlindungan dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1900 adalah karena alasan permusuhan yang tidak pernah henti dengan kerajaan-kerajaan tetangga yaitu : Badung, Mengwi, Bangli, dan Klungkung. Situasi pada akhir abad ke-19 itu sangat mengacaukan kehidupan di Kerajaan Gianyar. Pertimbangan yang matang dari seorang pemimpin dan juga raja yang sangat memperhatikan *kawulanya* itu memperoleh perlindungan dari pihak *Gubernemen* itu dapat diterima dengan baik pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk mencari tempat berlindung guna menyelamatkan kerajaan dari keruntuhan karena diancam dan diserang oleh empat kerajaan tetangga dari pelbagai penjuru, seperti yang disebutkan di atas.<sup>21</sup>

Untuk menangkis tekanan-tekanan kerajaan tetangga, raja Gianyar Ida I Dewa Raka meminta bantuan kepada Karangasem I Gusti Gde Jelantik pada tahun 1898. Akan tetapi, karena status Kerajaan Karangasem sudah menjadi *stedehouder* (wakil) pemerintah *Gubernemen*, maka permintaan tersebut dikonsultasikan dulu kepada residen di Singaraja. Keputusan yang diterima ialah bahwa Residen Lieftrinck menolak usul I Gusti Gde Jelantik dengan alasan agar kerajaan yang merupakan bagian (wakil) pemerintah *Gubernemen* tidak terlibat dalam sengketa antar kerajaan di

Bali.<sup>22</sup>

Raja Gianyar, Ida I Dewa Raka putus asa atas penolakan bantuan dan berusaha memohon bantuan lagi kepada pemerintahan *Gubernemen*, Residen Lieftrinck pada tanggal 28 Desember 1899 dan pada tanggal 8 Januari 1900. Isinya yang terpenting adalah penyerahan Kerajaan Gianyar kepada pemerintah *Gubernemen*, dengan alasan untuk lestari lembaga-lembaga yang ada dan menghindari kepungan musuh dari segala penjuru.<sup>23</sup> Karena lama tidak mendapat jawaban dari Residen Lieftrinck atas suratnya, raja Gianyar selanjutnya mengirim surat susulan pada tanggal 14 Januari 1900. Sementara itu Ida I Dewa Agung di Klungkung menawarkan perdamaian dengan raja Gianyar, Ida I Dewa Raka. Tawaran tersebut disertai dengan suatu imbalan bahwa Ida Dewa Agung bersedia menjadi perantara dengan raja-raja lain di Bali, terutama raja Bangli untuk menghentikan permusuhan dan peperangan dengan Kerajaan Gianyar, asalkan Kerajaan Gianyar bersedia mengakui kekuasaan tertinggi Ida Dewa Agung Klungkung. Meskipun tawaran perdamaian tersebut tidak mendapat respons yang menggembirakan dari sebagian besar punggawa Kerajaan Gianyar, raja Gianyar tidak dapat menolak tekanan Ida Dewa Agung Klungkung untuk mengadakan perdamaian. Perdamaian antara Ida Dewa Agung Klungkung dengan raja Gianyar akhirnya dikukuhkan juga dengan suatu upacara sumpah yang berlangsung di Pura Kentel Gumi, Banjarrangkan pada tanggal 26 Januari 1900.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Bali Abad XIX* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989)

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Peristiwa sumpah perdamaian itu dilaporkan oleh raja Gianyar, Ida I Dewa Gde Raka kepada Residen Liefrinck dalam suratnya tertanggal 17 Februari 1900. Disampaikan dalam suratnya itu bahwa perdamaian disetujui karena raja Gianyar berada dalam keadaan sulit dan meminta jawaban atas permohonan penggabungan Kerajaan Gianyar ke dalam pemerintah *Gubernemen*. Surat yang terakhir ini dipertimbangkan masak-masak oleh Residen dan dikonsultasikan kepada Gubernur Jenderal di Batavia.<sup>25</sup>

Permohonan saran dan argumentasi yang disampaikan Residen Liefrinck dibalas dengan sebuah keputusan Gubernur Jenderal yang disampaikan oleh sekretaris Umum Hindia Belanda dengan kawat tanggal 28 Februari 1900. Isinya menerima tawaran raja Gianyar agar ditempatkan dalam hubungan yang sama dengan *Gubernemen* seperti Karangasem. Selain petunjuk di atas, Residen Liefrinck mendapat instruksi dari Gubernur Jenderal untuk menyelidiki kemungkinan penempatan seorang pejabat Belanda di Gianyar. Berdasarkan instruksi tersebut, Liefrinck bertolak ke Gianyar untuk mengadakan perundingan dengan raja Gianyar dan para punggawa kerajaan tersebut guna menyelesaikan masalah Gianyar.. Dengan menumpang kapal pemerintah *Condor*, Liefrinck disertai oleh *kontrolir* urusan politik dan agraris, H.E.J.F. Schwatz dan dua punggawa dari Buleleng, mereka berlabuh di pantai Lebih pada tanggal 5 Maret 1900. Residen dengan rombongan diterima oleh para pembesar Kerajaan Gianyar dan diantar ke Ibukota dan mereka menginap di Puri Agung Gianyar.<sup>26</sup>

Pertemuan berlangsung selama sehari penuh pada tanggal 7 Maret 1900.

Untuk menjamin kelangsungan pemerintahan, maka dimuat ketentuan tentang pengangkatan Ida I Dewa Gde Raka, raja Gianyar VI untuk sementara waktu sebagai *stedehouder* (wakil) pemerintah Hindia Belanda di Gianyar. Sambil menunggu keputusan tetap mengenai pengangkatannya dari Gubernur Jenderal, dan raja bertindak sebagai wali negeri yang baik, seperti yang berlaku di Karangasem. Pada hari Kamis malam tanggal 8 Maret 1900, berita acara tersebut ditandatangani oleh residen Liefrinck dan Ida I Dewa Gde Raka.<sup>27</sup> Isinya menegaskan bahwa Ida I Dewa Gde Raka, raja di Kerajaan Gianyar berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan yang diemban sebagai *stedhouder* (wakil) pemerintah Hindia Belanda senantiasa akan memerintah Kerajaan Gianyar sebagai seorang wali negeri yang baik dan setia kepada pemerintah Hindia Belanda.

Dengan keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 29 November 1900 No.15, ditetapkan bahwa Ida I Dewa Gde Raka dikukuhkan dalam kedudukan dan martabatnya sebagai *Stedehouder* (wakil) pemerintah Hindia Belanda di Kerajaan Gianyar.<sup>28</sup> Pelantikannya dilakukan dengan suatu upacara yang disaksikan oleh semua punggawa di Kerajaan Gianyar pada tanggal 2 Januari 1901. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juni 1903 Ida I Dewa Gde Raka dinobatkan dalam suatu upacara penobatan menurut adat agama (*mabiseka ratu*) sebagai raja Gianyar dengan gelar Ida I Dewa Manggis, seperti lazimnya dipakai oleh raja-raja yang berkuasa di Gianyar turun-temurun (sejak Ida I Dewa Manggis

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*.

Shakti).

Selama satu dekade, sejak penobatan Ida I Dewa Gde Raka sebagai *stedehouder* terjadilah suksesi kepemimpinan. Beliau mengundurkan diri secara sukarela dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah *Gubernemen* pada tanggal 12 Mei 1912. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 11 Januari 1913, Ida I Dewa Gde Raka diberhentikan dengan hormat sebagai *Stedehouder* di Kerajaan Gianyar. Sementara itu, di Bangli juga terjadi suksesi karena Dewa Gde Tangkeban, raja Bangli wafat pada tahun 1912. Baik Ida I Dewa Ngurah Agung yang menggantikan ayahnya, Ida I Dewa Gde Raka (Ida I Dewa Manggis VIII) di Gianyar maupun pengganti Dewa Gde Tangkeban di Bangli tidak diberi gelar *stedehouder* oleh pemerintah *Gubernemen*. Akan tetapi mereka diangkat sebagai *regent* untuk kepala pemerintahan di Gianyar atau daerah-daerah yang disamakan pada waktu itu berlangsung sampai tahun 1929. Oleh J. Caron sebagai residen Bali dan Lombok pada waktu itu diadakan perubahan tata pemerintahan di Bali.

Berdasarkan prinsip bahwa pulau Bali adalah suatu wilayah yang langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, maka mulai tahun 1929 pulau Bali dibagi menjadi delapan *resort* (daerah) pemerintahan. *Resort* (daerah) pemerintahan itu adalah Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem. Tiap-tiap *resort* pemerintahan dikepalai oleh seorang pribumi putra warga Bali yang akan ditunjuk, dari keturunan raja-raja yang dahulu memerintah kerajaan-kerajaan di Bali. Untuk *resort* pemerintahan Karangasem, Bangli, dan Gianyar tidak perlu diadakan

penunjukan kepala pemerintahan baru, karena di sana keturunan raja-raja yang berkuasa terdahulu di tiga kerajaan tersebut sudah memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi, untuk daerah-daerah lainnya, residen J. Caron mengadakan penyelidikan seksama siapa-siapa yang dianggap masih keturunan terdekat dari dinasti kerajaannya masing-masing. Keseragaman tata pemerintahan di Bali dapat diwujudkan pada tahun 1929. Pulau Bali dibagi menjadi delapan *resort* pemerintahan yang diberi nama Bali asli yaitu *negara* di bawah pimpinan kepala-kepala pemerintahan yang ditunjuk dari keturunan raja-raja Bali terdahulu. Para kepala pemerintahan di tiap-tiap *negara* diberi gelar *negara berstuuder* (penguasa Negara) dengan disertai pengukuhan gelar tradisional yang menyerupai tradisi yang berlaku di tiap-tiap kerajaan.

Ida I Dewa Ngurah Agung, sejak tahun 1929 dikukuhkan oleh pemerintah *Gubernemen* dengan dua gelar yaitu secara modern (*Bestuurder*) atau secara tradisi adat di negara Gianyar (*Anak Agung*). Kepala pemerintahan pribumi (*Bestuurder, Anak Agung*) yang baru dibentuk ini memiliki tiga ciri dalam sistem pemerintahannya, yaitu pemerintahan rangkap, adanya jabatan *patih* sebagai pembantu raja, dan adanya dewan kerajaan. *Patih* raja Gianyar berasal dari keturunan Pasek, sedangkan dewan kerajaan (*pesamuan agung*) terdiri dari pembesar kerajaan, yaitu para punggawa, para manca, para pendeta.<sup>29</sup> Keistimewaan dalam sistem pemerintahan di Gianyar adalah pembentukan korps abdi raja yang disebut *prayoda* pada tahun 1936. Pembentukan korps tersebut yaitu diilhami oleh barisan sebagai abdi

<sup>29</sup> W.F. van der Kaaden. *Nota van Toelichtingen Landschap Gianyar*, (Singaradja: 1937)

*Sentana* di Madura.<sup>30</sup>

Selama pemerintahan *stedehouder* dan *regent* (1913 - 1929) kemudian *bestuurder* sampai tahun 1938 dan selama Anak Agung Ngurah Agung, raja Gianyar VII (1913 - 1943) memimpin daerah kerajaannya suasana aman dan tertib mewarnai kehidupan masyarakatnya. Secara perlahan bakat alam bersentuhan dengan kemampuan berkreasi para warganya. Kreativitas waktu-waktu luang telah menampilkan aktivitas seni dan pelbagai produk karya seni yang sejak semula terkait erat dengan persembahan untuk keperluan upacara keagamaan Hindu di *pura-pura* (*kahyangan*) untuk kepentingan kehidupan di keraton (*puri*, istana raja, *court art*) yaitu, hiburan dan keindahan bagi raja dan para bangsawan, elite kerajaan, dan untuk kepentingan rakyat yaitu hiburan dan keindahan yang dinikmati oleh masyarakat luas (*folk art*). Sejak itu berkembang pelbagai produk karya seni antara lain: seni lukis, seni ukir, seni patung, seni tari, pertunjukan wayang, seni karawitan dan gamelan, seni sastra kekawin. Melalui kreativitas para seniman dan produk karya-karya seni mereka, Kerajaan Gianyar di Bali semakin dikenal oleh wisatawan mancanegara.<sup>31</sup>

### 3. Kabupaten Gianyar “Kota Seni”, 1961 - 1980-an

Kehadiran seniman-seniman berkebangsaan asing : Walter Spies dari Rusia dan Rudolf Bonnet dari Belanda pada tahun 1928 yang menetap di Ubud dapat dijadikan tonggak akulturasi terjadinya dinamika kebudayaan pada unsur karya seni. Atas inisiatif kedua seniman Barat yang memperoleh

dukungan para bangsawan Ubud: Tjokorda Gde Raka Soekawati (punggawa Ubud), Tjokorda Gede Agung Soekawati dan Tjokorda Gede Rai (punggawa Peliatan) beserta para seniman Gianyar mereka bersama-sama membentuk sebuah organisasi modern pertama para seniman yaitu “Pita Maha” pada tanggal 29 Januari 1936. Keanggotaannya terdiri dari para pelukis, pemahat, pengukir, pengrajin anyaman, pengrajin perak dan emas hingga mencapai jumlah 159 orang di Ubud dan di luar Ubud sampai di Badung. Melalui pameran-pameran yang diselenggarakan di kota-kota di Bali (Singaraja), di Jawa: Bandung, Yogya, dan Batavia, Surabaya, Tegal, di Sumatra (Medan dan Palembang), di Kalimantan (Pontianak), bahkan hingga ke luar negeri (Amsterdam, Den Haag, London), organisasi seniman “Pita Maha” semakin luas dikenal. Akan tetapi selama pendudukan Jepang dan revolusi Indonesia aktivitas “Pita Maha” terhenti.<sup>32</sup>

Selama masa revolusi, ketika daerah Bali termasuk ke dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT), otonomi daerah kerajaan/swapraja tetap diakui. Namun, semuanya itu dikoordinasikan dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Raja-raja. Raja Gianyar Ida A.A. Gde Oka, diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja pada tahun 1947 menggantikan A.A. Pandji Tisna, raja Buleleng. Selain itu, pada periode NIT dua tokoh lainnya, yaitu Tjokorda Gde Rake Soekawati (Puri Kantor Ubud) diangkat menjadi presiden NIT dan Ide A.A. Gde Agung (Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara

<sup>30</sup> Kuntowidjojo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002)

<sup>31</sup> *Selayang Pandang Profil Kabupaten Gianyar 2005*. (Gianyar: Pem.Kab. Gianyar, 2005), bab VII

<sup>32</sup> “Pita Maha 29 Jan 1936 - 29 Jan 1940” dalam *Djatayoe*, No. 7, 25 Feb 1940, Th 4, (Singaradja) hal. 195 - 202).

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, Undang-Undang NIT No. 44 tanggal 15 Juni 1950 tetap diberlakukan. Daerah swapraja di wilayah NIT disebut dengan daerah bahagian/swapraja. Namun, untuk keseragaman pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Undang-undang No. 69 tahun 1958 yang mengubah daerah bahagian/swapraja menjadi daerah swatantra tingkat II (Daswati II). Daswati II itu berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960.

Setelah itu, nama tersebut diganti lagi dengan nama daerah tingkat II (Dati II), Kabupaten Dati II, dan kabupaten. Dari sisi otonomi, jelas tampak proses perkembangan yang terjadi di Kota Gianyar. Status otonomi dan berdaulat penuh melekat pada pemerintah Kerajaan Gianyar sejak 19 April 1771, yang terus berproses sampai otonomi daerah tingkat II kabupaten diberlakukan dewasa ini. Proses otonomi sejalan dengan dinamika kebudayaan yang tetap menunjukkan perkembangannya. Produk kesenian untuk kepentingan keraton (*puri*), tempat-tempat pemujaan Hindu (*pura*) baik yang diskralkan maupun yang diprofankan telah menyentuh pula kepentingan masyarakat dan bisa dinikmati oleh masyarakat lokal dan oleh masyarakat dunia melalui wisatawan yang datang ke Gianyar. Akibatnya nuansa seni semakin melekat dan memberi jatidiri terhadap daerahnya.

Setelah Pemilu I tahun 1955 timbul lagi inisitif R. Bonnet, Tjokorda Gede Agung Sukawati dan beberapa seniman Ubud untuk menghimpun para seniman. Mereka mendirikan organisasi

“Golongan Pelukis Ubud” pada tahun 1956. Ketuanya adalah A.A. Gede Sobrat. Kehadiran seorang pelukis Belanda yang menjadi warga negara Indonesia Arie Smith pada tahun 1961 telah menciptakan pembauran lewat karya seni lukisan yang kemudian dikenal dengan aliran “*the young artist*”. Gaya *young artist* menghasilkan lukisan-lukisan yang bertemakan kehidupan sehari-hari dengan polesan warna-warna cerah, kontras, bebas dan ekspresif.<sup>33</sup>

Visi dan misi organisasi “Pita Maha” yaitu menampung hasil karya seniman-seniman berbakat sekaligus sebagai dokumentasi dan pameran yang mendunia terutama kota-kota di benua Eropa terwujud pada tahun 1959. Ketika itu didirikan sebuah museum yang diberi nama “Museum Puri Lukisan Ratna Warta” di Ubud. Museum ini cukup menarik kehadiran wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan karya seni yang terlukis dari bumi seniman di Kabupaten Gianyar. Disusul dengan dibukanya museum lukisan oleh Pande Wayan Suteja Neka, seorang pelukis kelahiran tahun 1939 maka menambah semarak pengenalan jatidiri yang bernuansa semu untuk dipamerkan. Museum lukisan yang dibukanya sendiri pada tahun 1976 diberi nama “Museum Neka” diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 Juli 1982 ternyata mengundang antusias pada penikmat keindahan lewat karya-karya seni lukisan. Setelah itu berdiri pula museum-museum lukisan lainnya seperti “Museum Arma”, “Museum Rudana”.<sup>34</sup> Dapat dikatakan bahwa berdirinya museum-museum seni lebih memperkaya lagi khazanah nuansa seni

<sup>33</sup> I Nyoman Suasta. “Pita Maha dan Perubahan Sosial di Ubud Tahun 1936-1942” *Skripsi* (Denpasar: Jurusan Sejarah FS-UNUD Denpasar, 1981), hal. 62-63

<sup>34</sup> Garrett Kam. *Suteja Neka dan Museum Neka*. (Ubud: Yayasan Dharma Seni Museum Neka, 2002), hal. 10 11, lihat juga Profil Kabupaten Gianyar 2005, bab VII.

di Kabupaten Gianyar.

Untuk menampung produk karya-karya seni dan menjualnya kepada konsumen bermunculan pula bengkel kerja (*work shop*), studio-studio, *galery-galery*, *artshop-artshop* yang tersebar di kecamatan-kecamatan hingga ke desa-desa di seluruh Kabupaten Gianyar : Batubulan, Celuk, Guang, Sukawati, Bona, Gianyar, Ubud, Tegallalang, Kedewatan, dan lain-lain. Dari pihak pemerintah Kabupaten Gianyar menjadi fasilitator pembangunan “Pasar Seni” di Sukawati pada tahun 1983 dan “Pasar Seni” di Blahbatuh pada tahun 1987. Selain itu pemerintah juga memfasilitasi tanah dan pembangunan gedung Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI) di Ubud dan Guwang serta Sekolah Seni Karawitan di Batubulan. Atraksi kesenian seperti tari barong dan keris, kecak bisa ditemukan di desa-desa Singapadu, Bedulu dan Bona.

#### 4. Simpulan.

Sesungguhnya dinamika kebudayaan yang melekat pada tepian ruang yaitu di Gianyar sejak dijadikan nama keraton (Puri Agung Gianyar) ibukota pusat pemerintahan kerajaan pada tahun 1771 hingga dijadikan nama

ibukota kabupaten tahun 1960-an hingga sekarang tidak pernah kehilangan nuansa seni dan kreativitas para senimannya. Kota-kota di Kabupaten Gianyar adalah buminya seniman dunia berakulturasi dengan seniman lokal yang telah menghasilkan kreativitas karya-karya seni penuh dinamika dari gaya klasik sampai gaya modern dan kontemporer. Jadi sangatlah pantas apabila Kabupaten Gianyar saat ini diberi predikat “Kota Seni” yang semula “Kota Keraton” berdasarkan realitas bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah yang ditemukan.

Predikat bagi setiap kota sebagai pusat produk kebudayaan sebagian besar dapat dilacak hingga ke masa lampau. Tipologi dan keunikan-keunikan yang diciptakan para warganya telah menghasilkan identitas kota yang bersangkutan. Oleh karena itu seperti juga predikat yang diberikan kepada kota-kota: Jakarta, Yogyakarta, Pontianak, Palopo dan kota-kota muslim lainnya di Nusantara seperti yang telah diuraikan di depan maka untuk Kabupaten Gianyar di Propinsi Bali dengan segala dinamikanya saat ini sangat pantas diberi predikat “Kota Seni”.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ide Anak Agung Gde, 1989. *Bali pada Abad XIX*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- ANRI, 1964. *Surat-surat Perdjudjian antara Keradjaan-Keradjaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1841 s/d 1938*. Djakarta: ANRI.
- Babad Dalem : Teks dan Terjemahan*. Denpasar : Dinas P&K Propinsi Dati I Bali, 1986.
- Babad Dalem Sukawati*. Milik A.A. Gde Rai Puri Kandel Sukawati.
- Berg, C.C., 1932. *Babad Bla-Batuh*. Santpoort : C.A. Mees.
- Kaaden, van der W.F. *Nota van Toelichtingen Landschap Gianjar*. Singaradja, 1937.
- Kam, Garrett, 2002. *Suteja Neka dan Museum Neka*. Ubud : Yayasan Dharma Seni Museum Neka.

- Kuntowijoyo, 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura, 1850 1940*. Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Mahaudiana, 1968. *Babad Manggis Gianyar*. Gianyar : A.A. Gde Taman.
- Mahmud, M. Irfan, 2003. *Kota Kuno Palopo : Dimensi Fisik Sosial dan Kosmologi*. Makasar : Masagena Press.
- Paulus, J., 1917. *ENI. s'- Gravenhage* : Martinus Nijhoff.
- Peringatan 233 Tahun Kota Gianyar, 19 April 1771 19 April 2004*. Gianyar : Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2004.
- Putra, dkk. 2003. *Sejarah Kerajaan Gianyar*. Tanpa Penerbit.
- Rahman, Ansar, dkk., 2000. *Syarif Abdurahman Alkadri Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*. Pontianak : Pemerintah Kota Pontianak.
- Sartono, Kartodirdjo, 1977. *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*. Jakarta : Bharata.
- Selayang Pandang Profil Kabupaten Gianyar 2005*. Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Suasta, I Nyoman, 1981. "Pita Maha dan Perubahan Sosial di Ubud Tahun 1936 1942", *Skripsi*. Jurusan Sejarah FS UNUD Denpasar 1981.
- Suhartono WP, dkk., 2002. *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 4 Januari 1946 27 Desember 1949*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sutaba, I Made, 1980. *Prasejarah Bali*. Denpasar : Yayasan Purbakala Bali.
- Tim Pengkajian FIB UGM, 2003. *Laporan Akhir Kajian Hari Jadi Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : FIB UGM.
- Tjandrasasmita, H. Uka, 2000. *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia : Dari Abad XVIII Masehi*. Kudus : Menara Kudus.
- Utrecht, E., 1962. *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung : Sumur Bandung.

# DARI KAMPUNG DESA KE KAMPUNG KOTA: PERUBAHAN EKOLOGI KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PERMUKIMAN PADA MASA KOLONIAL

Purnawan Basundoro<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Banyak ahli tentang kota berpendapat bahwa sebagian besar kota di dunia berawal dari kawasan pedesaan. Aktifitas manusia yang intensif telah mengubah kawasan tersebut secara berangsur-angsur menjadi kawasan yang ramai dan sibuk yang kemudian disebut sebagai kawasan perkotaan. Dengan demikian maka perubahan itu tidak bisa dipisahkan dengan perubahan ekologi. Perubahan ekologi yang cepat tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kecepatan manusia dalam mengubah kawasan-kawasan tertentu menjadi permukiman. Terbentuknya Kota Surabaya sejalan dengan pendapat para ahli tersebut. Embrio Kota Surabaya adalah kawasan pedesaan agraris di tepi pantai. Kedatangan orang-orang Eropa di kawasan tersebut telah merubah kawasan itu menjadi kawasan kota. Namun pada saat terjadi perubahan radikal dari kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan, sebagian besar masyarakat bumiputra tidak mampu mengikuti perubahan tersebut. Pemukiman bumiputra yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kemudian tetap bertahan menjadi permukiman yang memiliki budaya masa lampau dan agraris, yang disebut kampung.*

*Kata Kunci: Surabaya, kampung, ekologi, permukiman*

## *Abstract*

*Many experts on the city argued that most cities in the world originated from rural areas. Intensive human activities have changed the region gradually became the area's hustle and bustle which is then referred to as the urban area. Thus, changes can not be separated with ecological changes. Rapid ecological changes are one of them is influenced by the speed of humans in changing certain areas into settlements. The formation of the city of Surabaya in line with the opinion of these experts. The origins of the city of Surabaya is a rural area on the beach. The arrival of the Europeans in the region has turned the region into areas of the city. But in times of radical change from rural areas into urban areas, most of the bumiputra community can not afford to follow such changes. bumiputra settlements which are unable to adapt to change and then persist into settlements that have past and agrarian culture, the so-called kampoong.*

*Key Word: Surabaya, kampoong, ecology, housing*

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Kandidat Doktor di Universitas Gadjah Mada.

## A. Pengantar

Banyak teori menerangkan bahwa asal-usul kota berawal dari desa. Artinya, tidak ada satupun kota yang lahir dengan tiba-tiba. Perspektif evolusionis selalu menganggap bahwa kota lahir secara berangsur-angsur dari wilayah pedesaan menjadi wilayah kota. Lewis Mumford salah satu pendukung perspektif evolusionis merumuskan paling tidak ada 6 tahap perkembangan kota mulai dari *eopolis* (kota yang baru berdiri) sampai ke *nekropolis* (kota yang telah menjadi bangkai alias telah runtuh).<sup>2</sup> Dengan demikian maka kota terbentuk berbarengan dengan proses perubahan ekologi, dari ekologi pedesaan ke ekologi perkotaan. Tulisan di bawah ini akan menguraikan dampak dari perubahan ekologi terhadap formasi permukiman di Kota Surabaya beserta dinamika sosial yang mengiringinya.

## B. Surabaya pada Periode Awal

Sampai saat ini tidak ada satupun bukti tertulis -baik dalam bentuk prasasti, inskripsi, atau bukti tertulis lainnya- yang menerangkan tentang asal-usul Kota Surabaya. Salah satu cerita rakyat yang dianggap sebagai legenda dari lahirnya Kota Surabaya adalah cerita perkelahian antara ikan *Suro* dan binatang buaya (*Boyo*) yang melahirkan nama *Suroboyo* (Surabaya). Legenda biasanya lahir dari masyarakat pedesaan ketika mereka tidak mampu mengurai kenyataan yang dihadapi dengan akal yang mereka miliki. Walaupun terdapat legenda yang lahir di kota (*urban*

*legend*), namun cerita tentang ikan *Suro* dan *Boyo* adalah legenda yang lahir dari masyarakat pedesaan (*rural legend*). Legenda itu menjadi salah satu bukti bahwa asal mula Kota Surabaya adalah desa di tepi pantai.<sup>3</sup> Sebuah keputusan resmi Walikota Surabaya Nomor 64/WK/75 tanggal 18 Maret 1975 menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari kelahiran Kota Surabaya. Tanggal tersebut dikaitkan dengan kemenangan Raden Wijaya ketika menghadapi Pasukan Tartar, yang dipercaya terjadi di sebuah desa pantai yang saat ini berkembang menjadi Kota Surabaya.<sup>4</sup>

Pantai Surabaya dan Sungai Kali Mas merupakan faktor utama yang menjadi pendorong berkembangnya wilayah ini menjadi sebuah kota. Hal ini sesuai dengan teori *break in transportation* seperti yang dirumuskan oleh Charles H. Cooley yang menyebutkan bahwa tempat-tempat terjadinya pergantian moda transportasi memiliki kecenderungan paling besar untuk tumbuh menjadi kota, karena di tempat-tempat itulah akan berkumpul massa yang cukup besar yang mampu memancing terbentuknya aglomerasi.<sup>5</sup> Sebuah peta kuno yang dibuat tahun 1677 oleh VOC dalam rangka persiapan pasukan Cornelis Speelman yang akan menyerang Surabaya untuk menaklukkan Trunojoyo memperlihatkan bahwa hampir seluruh aktifitas di kota ini terpusat di sepanjang muara Sungai Kali Mas. Peta tersebut memperlihatkan rumah-rumah dibangun berderet-deret di

---

<sup>2</sup> Perspektif evolusionis dari Lewis Mumford mengatakan bahwa kota berkembang dari *eopolis* (kota yang baru berdiri), *polis* (kota), *metropolis* (kota besar), *megalopolis* (kota yang sudah amat besar), *tyranopolis* (kota yang sudah ekspansif dan kejam), serta *nekropolis* (kota mayat, kota yang telah runtuh). Lewis Mumford, *The Culture of Cities*, (New York: Harcourt Brace: 1938)

<sup>3</sup> James Danandjaja, *Folklore Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*, (Jakarta: Grafitipers, 1986), hal. 66-83

<sup>4</sup> Subbag Humas dan Protokol Kotamadya Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*, (Surabaya: Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya, 1980), hal. 19

<sup>5</sup> Purnawan Basundoro, "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940," *Tesis Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 1999*, hal. 27

kanan dan kiri muara sungai serta masuk satu atau dua kilometer ke daratan. Jika dibandingkan dengan peta yang dibuat belakangan, maka peta tahun 1677 tersebut memperlihatkan bahwa batas paling selatan Kota Surabaya pada waktu itu masih di sekitar alun-alun yang pada masa kolonial terkenal dengan sebutan *Kebon Raja*. Di bagian-bagian belakang terlihat tanah-tanah kosong yang dibelah oleh banyak aliran sungai. Selain sebagai sumber kehidupan nampaknya aliran Sungai Kali Mas juga menjadi media yang efektif untuk transportasi penduduk setempat, baik untuk menuju ke wilayah pedalaman maupun untuk menuju ke dunia luar melalui lautan bebas.<sup>6</sup>

Peta tersebut juga memperlihatkan hubungan darat yang masih polos antara kota ini dengan kawasan darat lainnya. Hubungan Surabaya-Gresik yang merupakan kota terdekat juga masih sangat terbatas. Bahkan peta tersebut tidak memperlihatkan gambar jalan ke luar daerah. Berdasarkan kesaksian van Imhoff setibanya di Surabaya pada tahun 1746, hubungan antara Surabaya dengan Gresik masih amat sulit. Keinginan dia untuk pergi ke Gresik melalui jalan darat akhirnya dibatalkan dengan alasan jalan menuju ke kota itu amat tidak memadai. Satu-satunya cara adalah dengan berjalan kaki melalui pematang-pematang sawah, sehingga diperlukan waktu enam sampai tujuh jam untuk menempuh jarak yang tidak sampai 30 kilometer.<sup>7</sup> Kisah rencana perjalanan van Imhoff tersebut telah menunjukkan bahwa di luar kawasan pemukiman yang

mengular mengikuti aliran sungai adalah kawasan pertanian, yaitu sawah, ladang, yang bercampur dengan tanah-tanah kosong yang ditumbuhi semak-semak dan tumbuhan bambu. Foto-foto yang dibuat belakangan juga memperlihatkan pohon-pohon yang terlihat amat rindang dan besar-besar yang menunjukkan bahwa kawasan itu sebelumnya adalah hutan yang ditumbuhi tanaman keras.

Kedatangan orang-orang Eropa (Belanda) ke Surabaya pada perkembangan selanjutnya berhasil mempertegas titik-titik tertentu di kota tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Sebelum kedatangan mereka sebenarnya telah ada beberapa titik pertumbuhan, seperti pusat keagamaan di sekitar masjid Ampel yang telah berkembang sejak abad ke-15 bersamaan dengan lahirnya kegiatan penyiaran Islam oleh Sunan Ampel. Sebagaimana dikemukakan oleh Denys Lombard, Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebenarnya berhasil mengembangkan kawasan Ngampel Denta sebagai kawasan niaga, namun kemunculan kerajaan pedalaman yang bersifat agraris yaitu Mataram telah merontokkan peran Surabaya sebagai kota dagang.<sup>8</sup> Dengan menurunnya peran Surabaya sebagai kota dagang maka melambat pula proses peng-kota-an wilayah tersebut.

Titik-titik yang dikembangkan oleh pendatang Eropa itulah, yang dalam konteks teori inti berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945, menjadi inti perkembangan Kota

<sup>6</sup> G.H. Von Faber, *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's eerste Koopstad van de Oudste tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906)*, (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931), hal. 11

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 57).

Surabaya.<sup>9</sup> Kawasan pemukiman bisa dijadikan petunjuk awal untuk melihat proses perkembangan titik-titik tertentu sebagai inti perkembangan. Sebuah kawasan pemukiman biasanya lebih potensial untuk berkembang menjadi kawasan yang lebih ramai dibandingkan dengan kawasan kosong yang baru saja dibuka. Menurut J. Hageman sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Surabaya, pola pemukiman yang sudah terbentuk di kota ini berdasarkan atas pengelompokan etnis, yaitu etnis Cina, etnis Melayu, dan masyarakat bumiputera setempat.<sup>10</sup> Hageman menggambarkan bahwa pemukiman etnis Cina menggerombol menjadi satu, demikian pula pemukiman etnis Melayu, sedangkan perkampungan orang bumiputera letaknya terpencar-pencar di sekitar perkampungan tersebut serta berada di tanah-tanah pertanian mereka.<sup>11</sup> Formasi pemukiman di pusat Kota Surabaya bertambah satu lagi ketika para pedagang dari Eropa mulai menetap di kota ini. Menurut Von Faber para pedagang dari Portugis lebih dulu “menemukan” Surabaya dibandingkan dengan para pedagang Belanda. Ketika Hendrik Brouwer, seorang pedagang dari Belanda, mengunjungi pantai

Surabaya yang pertama kalinya pada tahun 1612 ia menjumpai banyak pedagang dari Portugis sedang membeli rempah-rempah dari penduduk setempat.<sup>12</sup>

### C. Pemukiman sebagai Inti Perubahan

Menguatnya eksistensi para pendatang dari Eropa di Kota Surabaya mulai terjadi ketika pada tahun 1617, Jan Pieterzon Coen mendirikan loji (*loge*) di kota ini. Loji tersebut telah menjadi simbol bahwa Kota Surabaya pada titik tertentu telah berada di bawah kekuasaan bangsa Eropa. Loji tersebut menjadi modal bagi para pendatang Eropa untuk mengembangkan kota ini menjadi basis yang strategis untuk melakukan ekspansi ekonomi dan politik. Pada periode awal ini loji menjadi orientasi utama pemukiman Eropa di Kota Surabaya, artinya rumah-rumah yang dibangun untuk tempat hunian berada di sekeliling loji. Namun demikian, pada periode awal ini pemukiman Eropa belum menjadi titik strategis untuk inti perkembangan. Bahkan pada peta yang dibuat oleh VOC tahun 1677 sebagaimana disebutkan di atas, bangunan-bangunan penting di kota ini di luar pemukiman Eropa merupakan

<sup>9</sup> Teori inti berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman mengatakan bahwa kebanyakan kota besar tidak tumbuh dalam ekspresi ruang yang sederhana yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja (*uncentered theory*) namun terbentuk sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi yang berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain dalam suatu sistem perkotaan (*multi centered theory*). Pusat-pusat ini dan distrik-distrik di sekitarnya di dalam proses pertumbuhan selanjutnya kemudian ditandai oleh gejala spesialisasi dan deferensiasi ruang. C.D. Harris dan F.L. Ullman, “The Nature of Cities,” dalam *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 242, 1945

<sup>10</sup> Tidak ada keterangan yang pasti kapan kelompok etnis Cina mulai tinggal di Kota Surabaya. Menurut Claudine Salmon mereka sudah sejak berabad-abad yang lalu tinggal di Kota Surabaya dan aktif sebagai pelaku bisnis di kota bandar ini. Claudine Salmon, “The Han Family of East Java: Entrepreneurship and Politics (18<sup>th</sup> 19<sup>th</sup> Centuries),” *Archipel* 41, 1991, hal. 53.

<sup>11</sup> J. Hageman, *Oostelijk Java en Madoera*, II prgf. 108

<sup>12</sup> Menurut Von Faber orang Portugis yang pertama kali mengunjungi Jawa bagian timur adalah Antonio de Abreu yang dikirim oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. ia mengunjungi pelabuhan Gresik yang pada waktu itu memiliki posisi lebih strategis dibandingkan pelabuhan Surabaya. Sekitar sepuluh tahun kemudian singgah pula beberapa kapal Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Brito yang sempat tinggal beberapa bulan di Gresik karena cuaca sangat buruk. Cornelius Houtman seorang pelaut Belanda berhasil mendaratkan kapalnya di Sedayu, Gresik pada tahun 1596 dan pada tahun 1598 Jacob van Heemskerck dari Belanda juga mendarat di Gresik. Keterangan ini menguatkan dugaan bahwa pada periode awal Surabaya belum menjadi bandar yang penting bila dibandingkan dengan Tuban, Gresik, atau Sedayu. G.H. von Faber, *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indies Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906)*, (Surabaya: Gemeente Soerabaia, 1931), bab 2

bangunan milik penguasa pribumi. Bangunan penting yang paling menonjol adalah kawasan masjid dan makam di Ampel yang terletak di sebelah timur Sungai Kali Mas, kompleks *paseban* lama Pangeran Trunajaya yang dikelilingi oleh dinding, dan kompleks *paseban* baru Pangeran Trunajaya yang terletak di barat Sungai Kali Mas. Beberapa kampung yang disebut-sebut dalam peta tersebut antara lain kampung Kaliwatu (*Caliwato*), Kalisosok (*Calisosok*), Kalianak (*Calianak*), serta Cregis (?). Sedangkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Speelman menempati sebuah titik di muara Sungai Kali Mas di tepi timur.<sup>13</sup> Pada titik inilah Belanda kemudian membangun benteng yang diberi nama Prins Hendrik yang berada pada wilayah yang diapit antara Sungai Kali Mas dengan Sungai Pegirian.

Pada waktu itu Sungai Kali Mas adalah orientasi utama perkembangan Kota Surabaya. Sungai itu mulai dari muara sampai ke kawasan yang kemudian disebut Jembatan Merah dapat dilayari perahu-perahu yang membawa barang dagangan. Dengan demikian maka Sungai Kali Mas merupakan pintu masuk ke Kota Surabaya dari arah laut. Muara sungai ini menjadi pelabuhan penting yang disebut pelabuhan Kali Mas. Kapal-kapal yang menghubungkan Kota Surabaya dengan daerah-daerah lain di luar pulau bersandar di pelabuhan Kali Mas. Letak pelabuhan ini berada di sisi barat benteng Prins Hendrik. Pemanfaatan Sungai Kali Mas sebagai jalur transportasi sungai, walaupun untuk jarak yang tidak terlalu jauh, telah mendorong proses terbentuknya

aglomerasi di kedua tepinya yaitu di tepi barat dan tepi timur. Kawasan Pecinan yang berada di sisi timur Sungai Kali Mas bisa dikatakan merupakan aglomerasi yang cukup penting yang berada di tepi sungai. Beberapa penelitian memang menyebutkan bahwa munculnya pemukiman etnis Cina (Pecinan) yang menggerombol menjadi satu merupakan rekayasa pemerintah kolonial Belanda. Namun jika kita melihat aspek psikologis dari terbentuknya kawasan pemukiman para pendatang, maka kebijakan pemerintah kolonial tersebut nampaknya kebijakan yang diberlakukan setelah pemukiman etnis Cina tersebut terbentuk.<sup>14</sup>

Secara psikologis para pendatang biasanya akan merasa aman jika tinggal dalam satu pemukiman. Para pendatang awal yang menetap di Kota Surabaya pasti masih menjumpai kawasan ini sebagai kawasan pedesaan yang belum berkembang dengan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit. Dalam kondisi seperti itu ancaman terhadap para pendatang cukup besar. Dengan alasan demi keamanan dan solidaritas sesama pendatang mereka menetap dalam satu kawasan. Kebijakan untuk “menutup” pemukiman para pendatang baru diberlakukan kemudian oleh pemerintah kolonial yang juga merasa terancam dengan adanya etnis lain di sekitar mereka. Kebijakan tersebut kemudian menghendaki agar para pendatang asing yang disebut sebagai “orang asing di bawah angin” harus melaporkan diri ke pemerintah. Dengan kewajiban melapor tersebut maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menempatkan mereka pada area tertentu

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>14</sup> Kebijakan pemerintah kolonial tentang penyatuan pemukiman etnis Cina pada suatu tempat secara rinci dapat dilihat pada J.E. Albrecht, *Soerat Ketrangan dari pada Hal Keadaan bangsa Tjina di Negri Hindia Olanda*, (Batavia: Albrecht & Rusche, 1890)

yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Kebijakan ini telah melahirkan kawasan pemukiman berdasarkan etnis yang kemudian dikukuhkan dengan adanya kewenangan berlebihan pada gubernur jenderal yang disebut *exorbitante rechten*.<sup>16</sup> Alasan pemusatan pemukiman berdasarkan kelompok etnis adalah karena penduduk Hindia Belanda sangat heterogen, artinya terdiri dari berbagai macam suku dan golongan etnis, maka untuk menghindari konflik horisontal perlu ditunjuk tempat tinggal tertentu. Dengan kebijakan ini maka terbentuklah di Kota Surabaya kawasan Pecinan (*Chinese Kamp*) yang dihuni para pendatang dari Cina, kawasan Kampung Melayu (*Malaise Kamp*), dan kawasan perkampungan Arab (*Arabische Kamp*).<sup>17</sup> Bunyi salah satu aturan tentang pemusatan pemukiman adalah sebagai berikut:

Menoeroet soerat Staatsblad tahoen 1866 no.57 maka diberi idzin kepada orang-orang asing jang di bawah angin aken doedoek di tempat tempat, di mana soedah ditetapkan kempoeng-kampoeng bagi bangsanja, oleh Sri Padoeka jang di Pertoean Besar. Tempatnja di dalam kampoeng, jang aken didoedoeki, di atoeer oleh kepala pemarentahan negri (Staatsblad tahoen 1871 no.145).<sup>18</sup>

Kebijakan pembatasan area pemukiman berdasarkan etnis berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan Kota Surabaya.

Kebijakan tersebut telah menyebabkan orang tidak bebas bergerak ke luar wilayah yang telah ditunjuk. Akibatnya pemukiman menjadi berjejal karena komunitas mereka terus bertambah sebagai akibat jumlah kelahiran yang terus naik serta jumlah pendatang dari etnis sejenis yang naik pula. Hanya orang-orang Eropa sajalah yang memiliki kebebasan untuk berpindah tempat atau mengembangkan wilayah dari satu titik ke titik lain karena merekalah yang memiliki otoritas. Dengan kebijakan semacam itu maka para pemukim Eropa lah yang memiliki peran terbesar dalam mengembangkan luas Kota Surabaya terutama sebelum akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-19 kawasan benteng Prins Hendrik sudah menjadi kawasan yang ditinggalkan oleh para pendatang awal Eropa. Pemukiman Eropa sudah menyebar ke segala arah namun berpusat di kawasan Jembatan Merah.

Ketika orang-orang Eropa sudah mulai menetap secara *establish* di Kota Surabaya maka formasi spasial dan formasi sosial sudah semakin jelas. Kedua formasi tersebut sebenarnya menyatu dengan erat. Orang-orang Eropa memposisikan diri di kawasan Jembatan Merah dan menjadikan kawasan tersebut sebagai inti perkembangan kota yang digerakkan oleh aktivitas mereka, yaitu sebagai birokrat, pekerja di sektor swasta, dan sebagai pedagang. Di seberang Jembatan Merah terbentang kawasan Pecinan yang telah memposisikan dirinya sebagai kawasan perdagangan sehingga jalan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>16</sup> *Exorbitante rechten* adalah hak bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi tertentu. Hak tersebut dikatakan *exorbitant*, artinya 'khusus-istimewa' karena menurut hukum Barat memang luar biasa dan tidak lazim. Lihat Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 34-35

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 35

<sup>18</sup> Albrecht, *op.cit.*, hal. 6

utama yang membelah kawasan tersebut disebut *Handelstraat* (Jalan Perdagangan). Pecinan menjadi inti yang lain yang mendorong perkembangan kawasan seberang Sungai Kali Mas. Beberapa pasar yang cukup besar pada akhirnya tumbuh dan berkembang di kawasan ini. Kawasan utara Pecinan, yang oleh orang-orang Eropa dikelompokkan secara etnis sebagai Kawasan Perkampungan Melayu (*Malaise Kamp*) perkembangannya tidak terlalu signifikan dan hanya menjadi kawasan pemukiman biasa. Perkampungan Melayu di Kota Surabaya tidak terlalu istimewa, bahkan tidak memperlihatkan sebagai kawasan yang spesifik. Kawasan yang lain yang justru menjadi perhatian warga Kota Surabaya dari berbagai lapisan masyarakat adalah perkampungan kuno yang berintikan makam keramat, yaitu makam Sunan Ampel. Di sana berdiri masjid besar yang menjadi orientasi utama penganut kepercayaan Islam. Ketika para pendatang Arab mendarat di pelabuhan Surabaya mereka memilih kompleks makam Sunan Ampel ini sebagai pusat pemukiman mereka. Dengan demikian maka kompleks makam dan masjid Sunan Ampel identik dengan pemukiman Arab atau Kampung Arab (*Arabisch Kamp*).

Dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial sebagaimana telah dikutip di atas, pemukiman berdasarkan etnis bisa bertahan. Mereka beranak-pinak di tempat tersebut. Jika anak-anaknya sudah berkeinginan untuk berkeluarga, mereka akan menikahkannya. Setelah menikah tentu saja anak-anak tersebut membutuhkan tempat tersendiri. Maka tanah-tanah mereka sebagian akan disisihkan untuk mendirikan rumah bagi anaknya yang telah berkeluarga tersebut. Proses

semacam itu terus berlanjut, sehingga perkampungan berdasarkan etnis tersebut terus melahirkan rumah-rumah baru yang mengakibatkan kampung menjadi penuh-sesak.

#### **D. Pemukiman Bumiputra**

Berbeda dengan perkampungan yang oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai kawasan hunian “orang asing di bawah angin” yang cenderung memusat dan mendapatkan aturan ketat untuk tidak meloncati batas, orang-orang bumiputera tinggal di kawasan yang memencar sesuai dengan profesi mereka. Jika mereka adalah seorang petani mereka akan tinggal di dekat ladang-ladang mereka atau sawah-sawah mereka. Jika mereka seorang nelayan maka mereka akan tinggal di tepi pantai atau tinggal di tepi kiri dan kanan Sungai Kali Mas. Demikian pula yang berprofesi di sektor-sektor perkotaan, seperti sebagai buruh atau pemilik usaha, mereka lebih suka tinggal di kampung-kampung di tengah kota. Dengan mendekati kepada area yang menjadi sandaran profesi mereka, maka mereka tidak terlalu memikirkan aspek transportasi. Tidak mungkin seorang petani mampu dan mau berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk bekerja di ladang mereka. Demikian pula, seorang nelayan tidak akan mungkin menambatkan perahu mereka di daratan yang berjarak beberapa ratus meter dari pantai atau sungai. Secara naluriah seorang pekerja akan mendekati tempat tinggal mereka dengan tempat pekerjaan mereka. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan tempat bekerja hanya dimungkinkan di tempat-tempat yang sistem transportasinya sudah berkembang dengan baik.

Penduduk bumiputra yang rata-rata berprofesi sebagai petani, nelayan, dan

buruh oleh para pendatang Eropa selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Orang Eropa melihat derajat sosial seseorang biasanya dengan melihat tempat tinggal yang bersangkutan. Pandangan semacam ini didasari kepercayaan bahwa dalam kacamata orang Eropa, rumah yang terbuat dari batu bata adalah simbol kemakmuran. Maka hampir dipastikan semua rumah dan bangunan lain yang dibangun oleh orang Eropa sebisa mungkin merupakan rumah batu bata. Demikian pula bangunan yang dibuat oleh orang-orang Cina. Sehingga di Kota Semarang muncul istilah “Gedong Batu” untuk menyebut bangunan klenteng Cina yang memang terbuat dari batu bata. Karena sebagian besar, atau rata-rata rumah yang ditinggali penduduk bumiputera tidak terbuat dari batu bata maka mereka dikategorikan sebagai orang miskin. Rumah-rumah penduduk bumiputera yang rata-rata terbuat dari bahan seadanya seperti tiang-tiangnya yang hanya terbuat dari bambu atau kayu seadanya, dindingnya yang terbuat dari anyaman daun kelapa atau anyaman bambu yang dibelah (*gedhek*), dan beratapkan daun-daunan atau genting tipis dianggap sebagai pemukiman yang dihuni oleh orang-orang miskin. Rumah-rumah semacam itu merupakan hunian sebagian besar penduduk bumiputera Kota Surabaya sejak zaman dahulu kala. Standar-standar baru tentang pemukiman yang sehat, bersih, dan nyaman yang dibuat oleh orang-orang Eropa yang baru tiba dan menetap di Surabaya telah menyebabkan rumah-rumah yang bentuknya dibuat secara sengaja seperti itu telah jatuh nilainya di mata orang-orang Barat.

Pandangan bahwa rumah-rumah penduduk bumiputera rata-rata tidak memenuhi standar hidup yang layak dalam kacamata orang-orang Barat salah satunya dilontarkan oleh N. Van Meeteren Brouwer yang tiba di Kota Surabaya pada tanggal 21 Juni 1825. Dalam catatan hariannya ia mengatakan bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu kota di tepi sungai yang cukup bagus. Jalan-jalannya cukup lebar, rata dan berpagar. Namun pada saat yang bersamaan ia juga menggambarkan kekontrasan kota ini. Ia mengatakan bahwa rumah-rumah kebanyakan terbuat dari bambu yang diberi atap dari *adap* atau ilalang.<sup>19</sup> Model rumah yang seperti itu hampir menyeluruh terdapat di Kota Surabaya. Foto-foto dan lukisan yang dibuat lebih belakangan memperlihatkan secara visual bentuk fisik secara umum rumah-rumah di kota tersebut. Bentuk rumah yang seadanya mengesankan rumah-rumah di daerah pedalaman sebagaimana diekspos secara besar-besaran oleh H.F. Tillema dalam enam jilid bukunya yang amat spektakuler, *Kromoblada*.<sup>20</sup>

Heldring yang pernah tinggal di Kota Surabaya pada pertengahan sampai akhir abad ke-19 banyak membuat uraian visual dalam bentuk lukisan tentang kampung-kampung di kota tersebut. Salah satu lukisan yang berangka tahun 1880 memperlihatkan sebuah rumah di bawah kerimbunan rumpun bambu dan di sela-sela pepohonan pisang. Rumah yang terletak di sekitar kawasan Simpang tersebut terlihat *doyong* ke kanan yang menandakan bahwa struktur dasarnya tidak terlalu kuat, bisa jadi karena sambungan antara tiang-tiangnya

---

<sup>19</sup> *Dagverhaal van eene reis door den Oosthoek van Java in het Jaar 1825 door den heer N. Van Meeteren Brouwer* (tanpa tempat dan tanpa tahun), hal. 15-16

<sup>20</sup> H.F. Tillema, *Kromoblada: Over het Vraagstuk van 'het Wonen' in Kromo's Grote Land*, 6 Jilid, ('s-Gravenhage: Uden Masman, De Atlas dan Adi Peostoko, 1915-23)

dengan struktur atas sudah tidak sempurna lagi atau karena rumah tersebut tidak berpondasi sehingga tiangnya ambles dan lapuk dimakan rayap. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu seadanya dan atapnya terbuat dari tumbuhan ilalang bercampur genting tipis.<sup>21</sup>

Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan mengapa pemukiman penduduk bumiputera di Kota Surabaya mayoritas sangat mengenaskan dan kurang layak sebagai tempat hunian yang “memenuhi standar.” Pertama, sebagian besar penduduk bumiputera mengalami kemiskinan akut sehingga tidak mampu membangun rumah yang layak. Kedua, sebagian besar penduduk Kota Surabaya pada hakekatnya masih bergulat dengan budaya agraris yang tidak terlalu memperhatikan standarisasi tempat tinggal sehingga ketika masuk standar baru yang dibawa para pendatang dari Eropa akan terjadi kontrasiasi antara kedua tipe pemukiman tersebut. Antara faktor pertama dengan yang kedua sebenarnya memiliki pertalian yang erat, yaitu bahwa kemiskinan akut yang melanda penduduk Kota Surabaya adalah karena mereka mewarisi profesi dan budaya masa lalu, yaitu budaya agraris. Beberapa teori yang membahas kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang selalu mengaitkan kemiskinan dengan budaya agraris.

Ketika Surabaya perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kota, pada saat itu berubah pula ekologi di kawasan tersebut. Pada satu sisi terdapat wilayah yang berubah menjadi sebuah kota dengan fungsi-fungsinya, tetapi pada

saat yang bersamaan masih terdapat kawasan yang bertahan dengan keadaan masa lalunya yaitu kawasan dan budaya agraris. Secara fisik kawasan yang amat cepat mengalami perubahan adalah kawasan yang paling dekat dengan jalur-jalur transportasi karena kawasan inilah yang paling cepat mendapat pengaruh dari luar. Surabaya berkembang menjadi sebuah kota terkemuka pada dasarnya karena kota ini memiliki pantai yang bisa disandari kapal, yang pada perkembangannya berubah menjadi pelabuhan dagang, bukan karena fungsinya sebagai pusat pemerintahan tradisional. Walaupun kota ini sering dikaitkan dengan seorang penyebar Islam, Sunan Ampel, tetapi otoritasnya tidak mampu menjadi sebuah faktor penentu berkembangnya Surabaya menjadi sebuah kota karena aktifitas penyebaran Islam tidak melibatkan manusia dalam jumlah massal.<sup>22</sup> Banyak ulasan yang menyebutkan bahwa berkembangnya kota-kota pantai di Jawa terkait erat dengan datangnya para pedagang dari luar pulau. Namun berkembangnya kota-kota tersebut menjadi sebuah kota yang tertata dan memiliki zona-zona yang terencana adalah setelah kedatangan orang-orang Eropa terutama bangsa Belanda.

Meskipun Kota Surabaya berkembang menjadi kota dagang sejak zaman dahulu kala, kondisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi sosial di kota tersebut. Tidak ada satupun sumber sejarah yang mendeskripsikan atau menjadi bukti bahwa perdagangan di kota ini telah memunculkan kelompok-kelompok saudagar terkemuka bumiputera Kota

<sup>21</sup> Lukisan karya Heldring bertanggal 5 Nopember 1880, [www.kitlv.nl](http://www.kitlv.nl).

<sup>22</sup> Sebuah daerah bisa berkembang menjadi sebuah kota jika di daerah tersebut bisa memunculkan aktifitas yang bisa mengundang orang dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun aktifitas tersebut bukan berbentuk kerumunan. Perdagangan atau aktifitas di pelabuhan dan pusat-pusat dagang lainnya adalah aktifitas yang mampu mengumpulkan orang dalam jumlah yang cukup banyak. Hal inilah yang mendorong proses pengkotaan sebuah wilayah.

Surabaya. Lapisan sosial yang terbentuk ketika para pendatang Eropa sudah mulai *establish* di kota ini justru menempatkan orang-orang Eropa, Cina, Arab, dan India sebagai pedagang. Secara lebih rinci pelapisan berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut, pertama orang-orang Eropa kulit putih sebagian besar adalah pegawai pemerintah, pemegang otoritas di pabrik-pabrik, atau pedagang. Kedua, orang Cina, Arab, dan India sebagian besar adalah pedagang eceran dan tukang meminjamkan uang atau *minding*. Ketiga, masyarakat bumiputera yang bekerja di sektor agraris, nelayan, pengrajin, dan menjadi buruh di sektor-sektor perkotaan.<sup>23</sup>

Pelapisan sosial tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan penduduk bumiputera, karena posisi mereka berada pada lapisan yang paling bawah karena sektor pertanian, perikanan, dan sektor perburuhan merupakan sektor yang menghasilkan sumber penghidupan yang paling sedikit. Golongan yang bekerja pada sektor agraris menempati posisi terbesar walaupun Kota Surabaya sedang beranjak menuju kota. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Surabaya sebenarnya berada pada tarikan antara dua kutub, yaitu kutub agraris murni yang meliputi pertanian dan perikanan (nelayan) dan kutub sektor perkotaan seperti sektor-sektor industri rumah tangga, buruh-buruh pabrik, dan sektor jasa lainnya. Berdasarkan catatan Hageman yang berangka tahun 1859 menyebutkan bahwa penduduk dewasa yang terserap di sektor pertanian dan perikanan

(tersier) menempati prosentase terbesar yaitu 59 persen, sedangkan sektor jasa seperti buruh pabrik, kuli angkut, pembantu rumah tangga, pedagang kecil, pelaut, menempati posisi kedua yang menyerap tenaga kerja dewasa 31,5 persen, dan posisi ketiga adalah sektor industri rumah tangga menyerap 8 persen tenaga kerja.<sup>24</sup>

Bagi penduduk Kota Surabaya yang bekerja di sektor pertanian, posisi mereka sangat dipengaruhi oleh status tanah yang mereka olah. Sejak akhir abad ke-18 tanah-tanah di Kota Surabaya dan sekitarnya terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tanah hak milik. Tanah ini dimiliki secara individual oleh penduduk setempat. Rata-rata kepemilikan mereka kecil dan hanya cukup untuk tempat mendirikan rumah serta tersisa sedikit untuk pekarangan. Tanah yang berstatus hak milik bebas terletak di seputar pusat kota. Kedua, tanah partikelir, yaitu tanah-tanah yang dijual oleh penguasa kolonial kepada para pengusaha. Tanah-tanah yang dijual tersebut umumnya adalah tanah yang berpenghuni sehingga status si penghuni adalah hamba sahaya dari tuan tanah pemilik tanah partikelir tersebut.<sup>25</sup> Ketiga, tanah-tanah perkebunan yang disewa oleh pemerintah dalam kerangka Sistem Tanam Paksa sejak tahun 1830. Pada masa Sistem Tanam Paksa, perkebunan pemerintah di Karesidenan Surabaya hanya terdapat di pinggiran Kota Surabaya, wilayah Kabupaten Surabaya, dan wilayah Kabupaten Mojokerto.<sup>26</sup>

Perkebunan yang dikelola oleh pemerintah antara lain perkebunan kopi,

<sup>23</sup> P. Bleeker, "Fragmenten Eener Reis over Java, dalam *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie*, Jilid I tahun 11, 1850

<sup>24</sup> J.J. Hageman, "Aanteekeningen nopens de industrie, handel en nijverheid van Soerabaja," dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*, Nomor 5, Tahun 1859, hal. 137-152

<sup>25</sup> J. Heemstra, "Particuliere Landerijen in En Om Soerabaia," dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 29<sup>e</sup> Jaargang 1940, hal. 48-62

<sup>26</sup> Bleeker, *op. cit.*, hal. 105

teh, tembakau, tebu, serta persawahan yang ditanami padi walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari seluruh jenis perkebunan, tebu menempati posisi teratas. Tanah di kawasan Surabaya dan sekitarnya yang berkontur landai sangat cocok untuk tanam penghasil gula tersebut. Sejak tahun 1840 produksi gula di beberapa pabrik yang terdapat di pinggiran Kota Surabaya cenderung terus menaik.

Pada awal abad ke-19 sebagian besar petani di pinggiran Kota Surabaya berada dalam penguasaan para tuan tanah partikelir.<sup>27</sup> Tuan tanah partikelir adalah para pengusaha yang diberi kesempatan untuk membeli tanah-tanah yang dijual oleh pemerintah kolonial dalam rangka mengumpulkan uang. Mereka dengan leluasa membeli tanah-tanah pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Menurut Heemstra penjualan tanah kepada pihak swasta di Kota Surabaya banyak dilakukan pada masa pemerintah Daendels dan Raffles antara tahun 1808-1813.<sup>28</sup>

Penjualan tanah kepada pihak swasta membawa konsekuensi yang luar biasa berat terhadap penduduk yang tinggal di kampung-kampung di tanah yang dijual tersebut. *Pertama*, penduduk kehilangan haknya atas tanah tempat tinggal mereka dan tanah yang mereka garap sebagai mata pencaharian. Sejak tanah tersebut dijual kepada para tuan tanah maka tanah-tanah tersebut

sepenuhnya menjadi hak milik si pembeli. Penduduk yang tinggal di atas tanah itu berubah statusnya menjadi hamba-sahaya dari para tuan tanah. Ketika pada masa Raffles dilakukan rasionalisasi kepemilikan tanah, hak mereka atas tanah yang mereka tinggali dan mereka garap hilang. Hak atas tanah tersebut ada di tangan para tuan tanah. Status para penduduk yang tinggal di tanah partikelir adalah sebagai penyewa atau numpang. Konsekuensi *kedua*, sebagai hamba-sahaya mereka harus melakukan berbagai kewajiban yang ditunjukkan kepada para tuan tanah. Mereka harus mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuan-tuan mereka. Status mereka berubah dari orang merdeka menjadi setengah budak.

Penderitaan para penghuni tanah partikelir amat berat karena para tuan tanah memiliki kekuasaan untuk memungut penghasilan dan pelayanan jasa dari penduduk yang tinggal di wilayah mereka. Dengan adanya kekuasaan yang tidak terbatas tersebut maka menurut W.H. van Ijseldijk dan N. Engelhard tanah partikelir untuk jangka pendek biasanya dihisap habis-habisan, tidak peduli apakah penduduknya rusak atau tidak.<sup>29</sup> Tuan tanah pemilik tanah partikelir ibarat raja-raja kecil di dalam sistem pemerintahan kolonial. Mereka memiliki hak *prerogative* atas tanah yang menjadi hak milik mereka beserta penduduk yang tinggal di atasnya.

<sup>27</sup> Pada tahun 1831 Pemerintah kolonial mengeluarkan *Gouvernement Besluit* No. 17 tanggal 11 Oktober 1831 yang kemudian diperbaiki dengan keputusan No. 15 tanggal 30 September 1835 yang menerangkan batas-batas Kota Surabaya. Batas-batas tersebut ditandai dengan dinding tembok dimulai pada jarak kurang lebih 300 langkah (*schreden*) dari tepi laut. Panjang dinding dari utara ke selatan ada 2.700 el atau sekitar 1.857 meter (1 el = 0.688 meter), sedang panjang dinding dari timur ke barat 1.850 el atau 1.272,8 meter. Dengan angka-angka tersebut maka sebenarnya yang disebut Kota Surabaya pada waktu itu hanya seluas sekitar 2,5 kilometer persegi. J. Hageman, *Soerabaja 1857 en Vroege*, M.S. KITLV, H.15

<sup>28</sup> J. Heemstra, "Particuliere Landerijen in en om Soerabaia," dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 29E Jaargang, 1940, hlm. 48-62. Namun menurut H. Th. Kal, pejabat *Controlir Binnenlandsch Bestuur* Kota Surabaya pada tahun 1906 munculnya tanah partikelir di Kota Surabaya sudah dimulai sejak masa Dirk van Hogendorp. Hogendorp menjual tanah di Gunungsari kepada Rothenbuhler, penguasa Jawa Pantai Timur pada tahun 1799. Di atas tanah itulah Rothenbuhler yang wafat pada tahun 1836 dimakamkan. Namun pada masa Daendels lah dilakukan penjualan tanah besar-besaran kepada pihak ketiga. H.Th. Kal, "Mededeelingen Over de Hoofdplaats Soerabaja," dalam *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* (Een-en-dertigste Deel, 1906), hal. 390

<sup>29</sup> D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hal. 103-104

Mereka membebani para penghuni tanah mereka dengan kewajiban yang berat dan menekan. Akibatnya para penghuni tanah partikelir rata-rata hidup dalam kemiskinan. Penduduk yang tinggal di tanah partikelir ibarat telah diikat kakinya agar tidak bisa pergi dari tempat tinggal mereka. Dengan kondisi semacam itu maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara wajar.<sup>30</sup>

Penduduk yang tinggal di tanah-tanah partikelir yang sebagian besar adalah para petani penggarap lahan milik tuan tanah adalah kelompok penduduk yang amat rentan dalam menghadapi berbagai perubahan di Kota Surabaya. Memasuki pertengahan abad ke-19 Surabaya memasuki periode perubahan besar-besaran. Kota semakin melebar yang dengan sendirinya mengekspansi kawasan pedesaan yang semula ada di pinggiran kota. Segala fasilitas yang dibutuhkan untuk melengkapi kota sebagian besar membutuhkan ruang. Ketika pemerintah membutuhkan ruang untuk pengembangan kota, salah satu usaha yang dilakukan adalah membeli kembali (*buy back*) atau tukar guling tanah-tanah partikelir. Sebagai contoh misalnya pada tahun 1855 pemerintah kolonial terpaksa membebaskan tanah-tanah partikelir di kawasan Wonokromo

karena di tanah tersebut akan dibangun kanal untuk memecah Sungai Brantas yang seringkali menyebabkan banjir di Kota Surabaya. Sebagai gantinya pemerintah memberikan tanah-tanah di Kawasan Dinoyo dengan sistem *tukar guling*. Proses pengalihan tanah tersebut tentu saja sangat merepotkan penduduk yang tinggal di Wonokromo tersebut. Mereka harus pindah ke tempat lain tanpa mendapat uang sepeser pun, baik dari tuan tanah maupun dari pemerintah.<sup>31</sup>

Namun perluasan Kota Surabaya lebih banyak karena disebabkan kebutuhan untuk pemukiman, penambahan fasilitas publik, serta untuk perluasan dan pemindahan kawasan industri. Pada awalnya perluasan kota ingin dilaksanakan dengan sistem radikal, yaitu dengan membangun rumah-rumah dan bangunan lain di sepanjang jalan utama yang mulai muncul setelah tahun 1870, seperti di Jalan Pasar Besar, Jalan Tunjungan, Jalan Kaliasin, Jalan Simpang, Jalan Embong Malang, Jl. Kedungdoro, dan Jalan Blauran. Di samping itu pembangunan juga dilakukan di tepi sungai Kali Mas, seperti di Genteng, Ketabang Kali, dan Kayoon.<sup>32</sup> Tetapi dalam perkembangannya tanah-tanah di sepanjang jalan dan tepi sungai tidak mencukupi karena kebutuhan

---

<sup>30</sup> Beberapa status dan kewajiban penghuni tanah partikelir di wilayah sekitar Surabaya adalah sebagai berikut: Di Gunungsari orang bisa mengenal *gogol ageng* disamping *gogol alit*. Yang disebut pertama adalah pemilik rumah dan pekarangan, dan yang terakhir adalah sebagai *wong* penumpang lain. Keduanya membayar sewa pekarangan kepada pemilik tanah. Di tanah Karah, Ketintang, orang mengenal *gogol ageng*, yaitu pemilik pekarangan, yang dibebaskan dari beban bayar sewa pekarangan, meskipun mereka memperoleh hak untuk menanam tanah pertanian dengan padi, mereka tetap harus berperan serta melakukan *heerendienst* (kerja wajib) dalam bentuk menanam tebu, jika kebetulan tanah itu untuk penanaman tebu. Mereka adalah petani, mereka menerima kewajiban sebagai ganti dari kerja di pertanian, seperti kerja wajib dan menyerahkan sebagian dari hasil padi setelah dikurangi *bawon*. Disamping *gogol ageng*, orang juga mengenal *gogol sewan*. Mereka membayar sejumlah tertentu untuk sewa pekarangan, sebagai imbalan mereka memiliki hak untuk tinggal di pekarangan. Jumlah yang dibayarkan tergantung pada lokasi dan luas pekarangan, lewat ini mereka dibebaskan dari tugas kerja wajib (*heerendienst*), sepanjang itu berkaitan dengan penanaman tebu. Jadi, mereka harus melakukan kerja wajib lainnya seperti *cawis-diensten* dan *bandul-diensten*. Status yang melekat pada penduduk yang tinggal di tanah-tanah partikelir secara tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan mereka. Hal itu disebabkan karena status yang melekat tentu saja membawa konsekuensi terhadap kewajiban yang harus mereka pikul terhadap para tuan tanah yang memiliki kekuasaan tidak terbatas di tanah-tanah yang telah menjadi hak mereka. Kal, *op.cit.*, hal. 54

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 395

<sup>32</sup> Faber, 1931, *op.cit.*, hal. 45

perumahan dan fasilitas lain juga sangat tinggi. Hal ini menandai bahwa Kota Surabaya sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tanah-tanah baru akhirnya harus dibuka untuk kebutuhan fasilitas kota. Kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para tuan tanah pemilik tanah partikelir. Banyak dari mereka akhirnya mendirikan biro pembangunan (*developer*), membangun rumah-rumah yang dijual atau disewakan kepada pemukim Eropa.

Kawasan pertama yang dikembangkan menjadi kawasan pemukiman adalah tanah partikelir di Keputran Lor. Tanah ini pada awalnya milik P. Janssens, pengelola pelabuhan Surabaya, yang dibeli seharga 4.000 *rijksdaalders*. Pada tahun 1888 tanah ini dibeli oleh *Bouwmaatschapij Keputran* (Perusahaan Pembangunan Keputran).<sup>33</sup> Pada awal abad ke-20 perusahaan tersebut kemudian membangun rumah-rumah untuk disewakan dan dijual kepada para pendatang dari Eropa. Karena proses penjualannya kurang lancar, akhirnya tanah seluas seratus hektar tersebut dijual per kavling. Dengan sistem seperti itu dalam sekejap

lahan yang semula merupakan lahan pertanian, pemukiman penduduk bumiputra, dan tanah kosong tersebut laris terjual. Dalam waktu tidak lebih dari enam tahun kawasan yang kemudian dikenal dengan nama *Palmenlaan* sudah terbangun. Pada lingkungan pemukiman Eropa tersebut dibangun taman yang diberi nama *Scheepmaker Park* yang merupakan bagian dari gaya masyarakat Eropa di negara jajahan pada waktu itu. Ketika Kota Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1906, kawasan *Palmenlaan* sudah menjadi kawasan elit dan menjadi batas paling selatan Kota Surabaya.<sup>34</sup>

Pengembangan kawasan *Palmenlaan* merupakan proses lebih lanjut dari berkembangnya salah satu inti (*nuclei*) dalam konteks teori inti berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh Harris dan Ullman, yaitu kawasan Simpang dan kawasan Tunjungan.<sup>35</sup> Kawasan Simpang kemudian menjadi stimulus berkembangnya kawasan lainnya, yaitu kawasan Darmo dan Gubeng yang juga dikembangkan menjadi kawasan pemukiman,<sup>36</sup> serta kawasan Ngagel yang dikembangkan menjadi kawasan

<sup>33</sup> Tillema, *op.cit.*, hal. 925

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Pada saat Dirk van Hogendorp menjabat sebagai penguasa Jawa bagian Timur (Gezegeber van den Oosthoek) dan berkedudukan di Kota Surabaya (1794-1798) ia membangun sebuah rumah taman yang besar di kawasan Simpang di tepi Sungai Kali Mas dengan biaya yang amat besar yaitu sekitar 14.000 *ringgit*. Oleh Daendels rumah tersebut kemudian diperbaiki dan menjadi tempat resmi kediaman Residen Surabaya. Ketika pada tahun 1928 berdiri Propinsi Jawa Timur, rumah tersebut kemudian dijadikan tempat kediaman resmi Gubernur Jawa Timur. Kawasan Simpang yang semula merupakan kawasan terbuka yang relatif masih kosong secara perlahan-lahan berkembang menjadi pusat pertumbuhan Kota Surabaya di bagian selatan. Pada tahun 1808 di kawasan ini dibangun rumah sakit militer yang terletak di sebelah timur rumah taman. Faber, *op.cit.*, hal. 28

<sup>36</sup> Kawasan Darmo yang berada di sebelah selatan *Palmenlaan* dikembangkan menjadi pemukiman elit untuk orang-orang Eropa. Kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1916 dan menjadi satu-satunya kawasan di Kota Surabaya yang dikembangkan berdasarkan perencanaan dari seorang planolog dan arsitek yaitu Ir. Henri Maclaine Pont. G.H. von Faber, *Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's Voornaamste Koopstad in de eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931*, (Surabaya: N.V. Boekhandel en Drukkerij, 1934), Bagian 1 "De Stadsuitbreiding".

industri.<sup>37</sup>

Contoh di atas adalah sebagian kecil dari proses ekspansi kota ke kawasan yang semula merupakan kawasan pedesaan. Proses perluasan kota yang pada gilirannya menciptakan proses urbanisasi di kawasan sub-urban dan *rural* membawa konsekuensi yang besar baik secara estetika maupun secara sosial. *Pertama*, pengembangan kawasan pinggiran kota yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian dan pemukiman penduduk bumiputra telah menciptakan suasana yang amat kontras. Ketika gedung-gedung dibangun maka pada saat yang bersamaan rumah-rumah penduduk bumiputra yang rata-rata berprofesi sebagai petani tetap bertahan pada bentuknya yang semula, yaitu rumah-rumah beratapkan daun ilalang, berdinding anyaman bambu atau bahan lain apa adanya, serta bertiang kayu dan atau bambu pula. Dengan kondisi seperti itu maka Kota Surabaya tumbuh menjadi kota yang indah pada bagian tertentu tetapi kumuh pada bagian yang lain. Kondisi ini telah memunculkan kalimat sindiran yang diungkapkan oleh warga Belanda penghuni kota itu bahwa: *Surabaia van buiten blink, van binen sting* yang maksudnya adalah bahwa Surabaya hanya terlihat indah pada bagian luarnya saja yaitu pada jalan-jalan utamanya saja, tetapi pada saat yang bersamaan di balik bangunan yang indah tersebut terdapat perkampungan kumuh yang dihuni oleh warga bumiputra.

*Kedua*, pengembangan kota yang banyak menggusur ladang-ladang dan sawah-sawah yang semula merupakan bagian dari mata pencaharian penduduk pribumi telah menciptakan pengangguran baru bagi para penggarap lahan tersebut. Penduduk yang telah kehilangan mata pencahariannya sebagian akhirnya tidak memiliki pekerjaan atau tetap menjadi petani penggarap di tanah-tanah partikelir tetapi dengan luas lahan yang digarap yang semakin sempit. Akibatnya kemiskinan tetap bertahan di kawasan tersebut bahkan sebagian semakin menjadi-jadi. *Kedua* hal tersebut, yaitu kemiskinan dan pemukiman miskin pada akhirnya menyatu menjadi bagian dari perkembangan Kota Surabaya selanjutnya.

Sejak Kota Surabaya berkembang menjadi kota besar memang banyak peluang untuk mencari pekerjaan, namun tidak semua kesempatan bisa didapatkan oleh warga kota. Banyak alasan mengapa banyak warga kota yang tidak mau memanfaatkan kesempatan tersebut. *Pertama*, banyak pekerjaan memerlukan keahlian dan persyaratan khusus terutama syarat pendidikan. Pekerjaan yang memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu terutama pekerjaan di kantor *gemeente*. Sejak Kota Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1906, kantor *gemeente* membutuhkan banyak tenaga kerja. Lowongan tenaga kerja di kantor *gemeente* bisa dimasuki oleh siapa saja tanpa memandang latar

<sup>37</sup> Kawasan tersebut dibeli oleh pihak Gemeente Surabaya pada tanggal 16 Oktober 1916 dengan akta pembelian tertanggal 20 Maret 1917. Pembelinya adalah *Burgemeester* (walikota) Surabaya, Mr. A. Meyroos. Harga keseluruhan tanah tersebut adalah 850.000 *gulden* yang dibayar kontan. Oleh pihak *gemeente* sebagian tanah tersebut dijual kembali kepada *N.V. Machinefabriek Braat*. Tanah yang dijual kepada pabrik mesin tersebut seluas 150.000 meter persegi seharga 150.000 *gulden*, jadi satu *gulden* per meter persegi. Pada tahun 1920 *N.V. Machinefabriek Braat* mulai membangun pabriknya di kawasan ini. Lihat, N.V. Braat, 1901-1921 *N.V. Machinefabriek Braat*, (Surabaya: TP, 1921), hal. 5. Setelah pabrik mesin Braat membangun pabriknya di Ngagel, berturut-turut di kawasan tersebut dibangun beberapa pabrik lain, yaitu *N.V. Constructiewerkplaats Noordijk*, *N.V. Constructiewerkplaats Bakker*, *N.V. Smederij en Gieterij de Vulcaan*, dan *Constructie Werkplaats Eiffel*. Lihat, *Koster Algemeen Adressboek voor Soerabaja 1928*, (Surabaya: J.W.F. Sluyler, 1928), hal. 50. Tidak semua tanah di Ngagel yang dibeli oleh *gemeente* dipergunakan untuk pabrik. Di bagian timur pabrik dibangun pula kawasan perumahan untuk pekerja industri Ngagel. Pada tanggal 30 Mei 1924 pihak *gemeente* memberikan sebagian tanah di kawasan ini kepada perusahaan kereta api secara cuma-cuma agar dipergunakan untuk keperluan industri perkeretaapian. Faber, 1934, op.cit., hal. 240-256

belakang etnis, kecuali untuk posisi tertentu yang menghendaki jabatan tersebut dijabat oleh orang Belanda. Pada tahun 1930 jumlah penduduk bumiputra Kota Surabaya yang bekerja di kantor *gemeente* serta di kantor-kantor dinas yang berada di bawah *gemeente* sebanyak 511 orang. Jumlah tersebut belum termasuk yang bekerja di bagian kebersihan kota (*stadsreiniging*) yang jumlahnya mencapai 968 orang, serta pejabat politik yang bekerja di *gemeenteraad* sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat tersebut yang jumlahnya delapan orang.<sup>38</sup> Jika angka-angka tersebut dijumlahkan maka jumlah pegawai bumiputra yang bekerja di *gemeente* sebanyak 1.487 orang. Namun pekerjaan di kantor *gemeente* rata-rata memerlukan orang yang pernah sekolah minimal pernah menempuh jenjang pendidikan yang paling rendah.<sup>39</sup> Persyaratan tersebut telah membuat sebagian besar penduduk yang tinggal di kampung-kampung di Kota Surabaya tidak memungkinkan untuk mengakses pekerjaan di *gemeente* karena mereka rata-rata tidak berpendidikan. Dalam rapat *gemeenterad* pada bulan Februari 1941 diketahui bahwa penduduk bumiputra Kota Surabaya yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah di kota tersebut hanya 7 persen dari seluruh jumlah penduduk.<sup>40</sup> Pekerjaan sebagai buruh pabrik di berbagai pabrik yang banyak berdiri di Kota Surabaya pada awal abad ke-20 juga sebagian menuntut tenaga yang berpendidikan. Dengan syarat ini maka hanya orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah-

sekolah umum sajalah yang bisa mengakses.

*Kedua*, perkembangan Kota Surabaya menjadi kota industri juga telah menawarkan beragam pekerjaan kasar terutama di pelabuhan. Namun banyak penduduk asli Surabaya yang tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar sehingga peluang menjadi buruh angkut di pelabuhan diambilalih oleh para pendatang. Pada tahun 1927 sekitar sepuluh ribu buruh angkut harian di pelabuhan Tanjung Perak berasal dari Madura.

### E. Penutup

Perubahan ekologi dari pedesaan menjadi ekologi perkotaan membawa konsekuensi sosial yang besar bagi penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Ketika pedesaan sebagai basis mata pencaharian penduduk yang berprofesi sebagai petani berubah menjadi perkotaan, di mana tanah-tanah pertanian diakuisisi, maka pada saat itu sebagian area untuk mencari makan hilang. Hilangnya tanah-tanah pertanian telah menyebabkan sebagian masyarakat yang semula tinggal di kawasan pertanian kehilangan mata pencahariannya. Hal tersebut telah menciptakan perubahan sosial ekonomi yang drastis. Perubahan yang amat drastis tersebut telah sangat dirasakan oleh golongan bumiputra. Berubahnya ekologi desa menjadi ekologi kota tanpa diikuti dengan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru telah menciptakan kompleksitas di Kota Surabaya, terutama pada sektor permukiman. Ketika kawasan Surabaya

<sup>38</sup> Angka-angka tersebut dijumlahkan dari nama-nama pegawai *Gemeente* Surabaya yang tercantum dalam *Verlag van den Toestand der Gemeente Soerabaja over 1930*, hal. 46-69, 256

<sup>39</sup> William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 66

<sup>40</sup> *Notulen en Gemeentebladen van de Openbare Vergadering van den Stadsgemeenteraad van Soerabaja Gehouden op 5 Februari 1941*, hal. 239

berubah menjadi kota metropolis yang disebut kampung. Kampung adalah berkembang pesat, pada saat yang sama pemukiman bumiputra yang masih terdapat kawasan pemukiman memiliki corak budaya agraris yang yang masih berorientasi pada masa lalu, sangat kuat, yaitu pemukiman bumiputra yang

### **Daftar Pustaka**

- Albrecht, J.E. *Soerat Ketrangan dari pada Hal Keadaan Bangsa Tjina di Negri Hindia Olanda*. Batavia: Albrecht & Rusche, 1890
- Bleeker, P. "Fragmenten Eener Reis over Java. dalam *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie*, Jilid I tahun 11, 1850
- Burger, D.H. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnjaparamita, 1962
- Dagverhaal van eene reis door den Oosthoek van Java in het Jaar 1825 door den heer N. Van Meeteren Brouwer* (tanpa tempat dan tanpa tahun). Koleksi KITLV, Leiden
- Danandjaja, James. *Foklore Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Grafitipers, 1986
- Dick, H.W. *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Athens: Ohio University Press, 2002
- Faber, G.H. Von. *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's eerste Koopstad van de Oudste tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906)*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931
- Faber, G.H. Von. *Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's Voornaamste Koopstad in de eerste Kwarteeuw Sedert Hare Instelling 1906-1931*. Surabaya: N.V. Boekhandel en Drukkerij, 1934
- Frederick, William H. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia, 1989
- Hageman, J. J. *Oostelijk Java en Madoera II*. prgf. 108. Koleksi KITLV, Leiden
- Hageman, J.J. *Soerabaja 1857 en Vroeger*. M.S. Koleksi KITLV, H.15
- Hageman, J.J. "Aanteekeningen nopens de industrie, handel en nijverheid van Soerabaja," dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*, Nomor 5, Tahun 1859
- Harris, C.D. dan F.L. Ullman. "The Nature of Cities." dalam *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 242, 1945
- Heemstra, J. "Particuliere Landerijen in En Om Soerabaia." dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 29<sup>E</sup> Jaargang 1940
- Kal, H.Th. "Mededeelingen Over de Hoofdplaats Soerabaja." dalam *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur*, Een-en-dertigste Deel, 1906

- Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 2000
- Mumford, Lewis. *The Culture of Cities*. New York: Harcourt Brace, 1938
- Notulen en Gemeentebleden van de Openbare Vergadering van den Stads Gemeenteraad van Soerabaja Gehouden op 5 Februari 1941*
- Purnawan Basundoro. "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940." *Tesis* Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 1999
- Purnawan Basundoro. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak, 2009
- Salmon, Claudine. "The Han Family of East Java: Entrepreneurship and Politics (18<sup>th</sup> 19<sup>th</sup> Centuries)", *Archipel* 41, 1991
- Subbag Humas dan Protokol Kotamadya Surabaya. *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*. Surabaya: Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya, 1980
- Tillema, H. F. *Kromoblanda: Over het Vraagstuk van 'het Wonen' in Kromo's Grote Land*, 6 Jilid. 's-Gravenhage: Uden Masman, De Atlas dan Adi Peostoko, 1915-23
- Verslag van den Toestand der Gemeente Soerabaja over 1930*

# BATU MALANG: DARI KOTA PERKEBUNAN KE KOTA AGROWISATA

Retna Astuti \*

## Abstrak

*Dahulu Kabupaten Malang disebut dengan Karesidenan Malang, yang daerahnya meliputi wilayah Batu. Kota Batu dahulu (pada jaman Kolonial Belanda) merupakan lahan perkebunan yang luas dan subur, yaitu perkebunan kopi, kina dan teh. Selain itu di wilayah Batu ini juga digunakan sebagai pemukiman orang-orang Belanda, karena udaranya yang dingin sehingga sering disebut dengan Swis kecil. (Klein Switserland). Setelah menjadi otonomi daerah Kota Batu berkembang menjadi satu “kota agrowisata” dengan andalannya perkebunan apel hijau, kentang, stroberi, jeruk, bunga dan lain-lain. Ternyata dengan sebutan “kota agrowisata” ini Kota Batu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Kota Batu, sehingga pemerintah Kota Batu bisa mencukupi kebutuhan pemerintahannya dengan baik.*

*Kata Kunci: Malang-Batu-Perkebunan-Agrowisata*

## Pengantar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kota” diartikan sebagai perkampungan yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam buku *Kota dan Kabupaten dalam Lintasan Sejarah* yang dikutip oleh Lasmiyati menyebutkan bahwa “kota” adalah gundukan masal dari pada penduduk yang tidak agraris, dengan penghidupan ekonomis yang diatur secara rasionil dan kurang menunjukkan ikatan kelompok seperti di desa-desa. Karena lingkungan hidupnya (ekologis itu), maka penduduk kota berjiwa sangat

mobil, yang membuat kebudayaan kota pada umumnya menjadi sangat minim.<sup>2</sup>

Kota-kota di Indonesia mulai bergerak menuju sebuah identitas baru, meninggalkan identitasnya yang lama. Perubahan ini hasil dari aplikasi modernisasi yang mulai bergulir sejak awal abad 20. Kosmopolitanisme yang mengasosiasikan diri pada kepemilikan benda-benda simbol modernitas telah menjadi orientasi baru masyarakat perkotaan. Pembangunan infrastruktur dan fisik kota pun disesuaikan untuk memenuhi selera kosmopolit.<sup>3</sup>

Kota Batu merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang pada mulanya merupakan wilayah

---

\* Penulis adalah staf peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 463

<sup>2</sup> Lasmiyati, dkk. *Sejarah Kota Banten Lama dalam Kota dan Kabupaten Dalam Lintasan Sejarah*. (Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006), hal. 3

<sup>3</sup> SriMargana dan Umi Barjiyah. *Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. (Yogyakarta: Ombak, 2010), hal.1

Kabupaten Malang. Pada perkembangannya dengan adanya otonomi daerah, Kota Batu lepas dari Kabupaten Malang dan berdiri sendiri dengan nama Kota Batu.

Kota Batu sejak menjadi salah satu daerah otonomi tingkat II, maka kewajiban mengurus rumah tangga sendiri, sudah tentu memunculkan berbagai cara agar bisa memperoleh pendapatan serta meningkatkan pendapatan tersebut guna keperluan pelaksanaan pemerintahan. Hal ini tentu saja mengakibatkan perubahan-perubahan baik dalam pemerintahan maupun perkembangan pembangunan, yang pada mulanya Kota Batu merupakan Kota Perkebunan setelah otonomi daerah menjadi satu buah kota dengan sebutan Kota Agrowisata.

### Pembahasan.

Apabila kita mendengar kata Kota Batu, maka akan terlintas di benak kita bahwa kota ini banyak di temukan batu-batu, seperti batu kali, batu akik, batu permata ataupun batu marmer. Tampaknya bukan demikian, Kota Batu yang satu ini merupakan satu kota yang ada di wilayah Malang, Propinsi Jawa Timur, terletak 15 km di sebelah Kota Malang. Berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara dan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan dan barat. Wilayah Kota Batu, yang letaknya di daerah pegunungan berada di ketinggian 700 - 1100 m di atas ketinggian laut, dengan suhu 15 - 19 derajat Celcius. Oleh karena letak geografisnya ini maka tidak mengherankan kalau daerah Kota Batu merupakan daerah berhawa dingin, sehingga banyak dipergunakan sebagai

tempat tinggal orang Belanda, maupun tempat peristirahatan orang-orang berada.

Menurut legenda, asal mula nama *batu* ada yang mengatakan bahwa sebutan *batu* berasal dari seorang ulama pengikut pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin. Ia melarikan diri menghindari kejaran pasukan Belanda dan sampai di wilayah Karesidenan Malang. Di sini Kyai Gubug Angin kemudian melakukan babad alas membangun sebuah desa. Selama tinggal di desa itu Kyai Gubug angin memberikan ajaran ilmu pengetahuan dan ilmu agama, yang selanjutnya masyarakat setempat sering menyebut dengan panggilan Mbah Wastu. Karena dirasa sebutan itu terlalu panjang maka sering disebut dengan Mbah Tu, bahkan bila diucapkan secara cepat menjadi *Mbatu* atau *Batu*. Oleh karena desa tersebut belum mempunyai nama maka nama Mbah Wastu sebagai cikal bakal desa digunakan untuk nama desa tersebut, sehingga sebutan itu digunakan untuk menyebut kota dingin di Jawa Timur.<sup>4</sup>

Sejak abad ke 10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahan bagi kalangan keluarga kerajaan (pemerintahan raja Sendok). Pada masa pemerintahan Raja Sendok, seorang petinggi kerajaan bernama Mpu Supo diperintahkan oleh Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti. Atas persetujuan raja, Mpu Supo mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan

<sup>4</sup> Dinas Pariwisata Kota Batu. *Legenda Kota Batu*. (Malang: Dinas Pariwisata, 2008),

keluarga kerajaan, serta dibangun sebuah candi yang kemudian diberi nama candi Supo. Candi Supo yang berada di sumber air panas Songgoriti, sebagai bukti sejarah bahwa Kota Wisata Batu sejak jaman kerajaan sudah dijadikan tempat untuk rekreasi mengolah spiritual oleh para raja dan empu.

Wilayah Songgoriti Batu ini adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam dengan ciri khas daerah pegunungan, serta sumber mata air yang jernih. Di tempat ini sering digunakan untuk mencuci keris-keris pusaka kerajaan yang bertuah, dan mempunyai kekuatan supranatural (magis). Oleh karenanya sumber mata air ini yang semula dingin dan sejuk berubah menjadi sumber air panas, yang sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Songgoriti.<sup>5</sup>

Dahulu Kota Batu yang merupakan tempat yang indah, merupakan daerah dataran tinggi dan di kanan kirinya terdapat pohon cemara yang subur sehingga terlihat hijau dan segar. Selain itu belum banyak terdapat rumah-rumah bertembok seperti sekarang, masih jarang penduduknya sehingga masih sangat lengang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di wilayah ini banyak orang-orang Belanda, karena memang sebagian besar bermukim di wilayah ini.

Pada jaman Belanda, Kota Wisata Batu ini menjadi tempat peristirahatan yang nyaman. Orang Belanda banyak membangun villa-villa sebagai tempat peristirahatan. Selecta pun dibangun sebagai tempat rekreasi, karena Selecta merupakan pemandian para *meneer* dan *noni-noni* Belanda yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati

keindahannya. Selecta yang berada di lembah hijau dengan latar belakang membentuk vista yang menjadi bingkai keindahan sebuah pilihan alam yang penuh perhitungan oleh arsitek Belanda. Selecta tetap mempertahankan keindahan bangunan peninggalan jaman Belanda.

Adapun pemukiman orang-orang Belanda ini terdapat di tempat-tempat strategis, dan lokasinya berada di tempat yang lebih tinggi dari pemukiman warga pribumi atau penduduk asli. Lokasi pemukimannya ini hampir menyerupai bukit kecil yang di atasnya dibangun rumah-rumah Belanda dengan arsitektur Barat atau Eropa. Kebanyakan rumah-rumah itu mempunyai halaman yang luas, bangunan rumahnya tidak jauh beda dengan bangunan rumah-rumah Belanda pada umumnya dengan langit-langit yang dibuat tinggi dan atap rumahnya dibuat dengan kayu sirap. Tidak ketinggalan dalam bangunan rumah itu terdapat banyak jendela besar yang berfungsi sebagai ventilasi. Sedangkan halaman yang luas biasanya dipagari kawat dan tanaman pohon cemara di setiap sudut rumah yang kadangkala diselingi dengan bunga *bougenvile*.<sup>6</sup>

Situs dan bangunan peninggalan Belanda semasa pemerintahan Hindia Belanda inipun masih berbekas dan menjadi aset dan kekayaan wisata hingga saat ini, yang perlu dijaga dan dilestarikan. Atas kekaguman bangsa Belanda akan keindahan dan keelokan Batu, mereka mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara Eropa yaitu Switserland dan memberikan predikat *De Klein Switserland* atau Swis kecil di Jawa.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Fitri Neky. "Batu, Swiss-e Malang" dalam *Malang Tempo Doeloe* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 190

<sup>7</sup> *Ibid.*

Orang-orang Belanda ini diantaranya bertempat tinggal di Desa Sisir, Desa Ngaglik, Tulungrejo, Punten Sidomulya dan di Desa Songgokerto. Mereka yang tinggal di pemukiman ini pada umumnya berasal dari berbagai profesi, antara lain yaitu pastur, suster, pengusaha, pengelola *onderneming*, peternak dan lain sebagainya.

Batu sebagai wilayah yang subur dan memiliki panorama yang indah dan kawasan pegunungan yang sejuk, menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjungi dan menikmati. Untuk itulah maka di awal abad 19 Batu menjadi daerah tujuan wisata, terutama orang-orang Belanda. Mereka ini kemudian membangun tempat-tempat peristirahan (*villa*), kolam renang, taman-taman dan lain sebagainya.

Pada masa Kolonial Belanda, Kota Batu merupakan lahan perkebunan yang luas dan subur. Lahan perkebunan ini memakai tanah-tanah milik penduduk asli yang disewa tanpa batas waktu yang jelas. Namun penduduk tidak bisa berbuat banyak mereka tidak berani untuk angkat bicara atau protes, hanya menurut saja. Lahan perkebunan ini ditanami kopi dengan jenis *hebiria-bestek* dan jenis kopi lokal. Di daerah Ngaglik dan Sisir selain lahannya digunakan untuk perkebunan kopi, di gunakan pula untuk proses pembuatan kopi mulai dari penjemuran, penggorengan sampai dengan penggilingan. Semua proses pembuatan kopi ini dilakukan di dalam gudang yang berada di wilayah perkebunan tersebut.<sup>8</sup>

Selain perkebunan kopi, di wilayah Batu juga terdapat perkebunan kina yang dikelola oleh orang asing (bangsa Belanda) yang bernama Mr. Danger. Perkebunan kina ini banyak terdapat di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo di

kawasan Puncak Utara Kecamatan Batu. Seperti kita ketahui bahwa pada waktu itu penyakit malaria banyak menyerang di berbagai wilayah di Indonesia, oleh karenanya maka kina sebagai obat malaria sangat dibutuhkan sekali, sehingga adanya perkebunan kina ini cukup membantu untuk bisa mencukupi kebutuhan pengobatan malaria.

Di Dusun Junggo Desa Tulungrejo Kecamatan Batu, selain terdapat perkebunan kina, juga terdapat perkebunan teh, yang letaknya berada di kaki Gunung Arjuna. Perkebunan teh ini dikelola seorang Belanda bernama Van de Klay, dan letaknya berada di daerah yang cukup tinggi, sehingga untuk sampai ke lokasi harus melalui jalan yang berkelok-kelok dan cukup sulit.

Selain perkebunan kopi, kina dan teh, wilayah Batu juga dikenal dengan apelnya. Apel Batu Malang amat dikenal di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1920, tanaman apel sudah dikenal oleh para petani, namun baru dikembangkan pada sekitar tahun 1930. Ide pengembangan tanaman apel ini dilakukan oleh seorang warga Belanda bernama Tuan Pegtel yang amat menyukai buah apel. Kemudian diikuti pula oleh orang Belanda lainnya yaitu Tuan Pool yang mengembangkan tanaman apel di Desa Tulungrejo, Tuan Rockmaker di daerah Desa Sidomulyo dan Tuan Roonkwis di daerah Desa Sisir. Dalam pengembangan penanaman buah apel ini Tuan Pegtel dibantu oleh penduduk asli yang bernama Pak Kandar yang kemudian melakukan penelitian secara cermat baik dari batangnya, daun, dan akarnya agar hasil buah apel dapat maksimal. Pada waktu itu buah apel merupakan buah mahal, karena sebagian besar diusahakan oleh orang Belanda dan untuk mencukupi kebutuhan para warga

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 191

Belanda saja. Tidak seperti saat ini yang kita ketahui bahwa masyarakat umumpun sudah menyukai makan apel. Oleh karenanya maka petani pada waktu itu tidak tertarik untuk ikut menanam dan mengembangkan buah apel. Waktu itu para petani banyak yang mengembangkan buah lokal yaitu buah jeruk yang konsumennya banyak diminati para warga pribumi.<sup>9</sup>

Memasuki tahun 1950-an, tanaman jeruk panennya mengalami kemerosotan, karena banyak terkena penyakit. Oleh karenanya para petani jeruk mulai melirik untuk mengembangkan buah apel sendiri bahkan mereka pun mulai melakukan penyilangan-penyilangan untuk bisa memproduksi berbagai jenis apel. Seperti kita ketahui bahwa di Kota Batu ada beberapa jenis buah apel misalnya apel manalagi yang rasanya cukup manis, kemudian apel hijau yang rasanya sedikit asam, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pada tahun 2008 - 2012, pemerintah Kota Batu mencanangkan Kota Batu sebagai Kota Wisata berbasis pertanian. Mengingat Kota Batu yang sejak dulu kala merupakan daerah pertanian dan perkebunan, maka pemerintah daerah ingin mengembangkannya sebagai salah satu tujuan wisata di Propinsi Jawa Timur dengan mengandalkan potensi yang sudah ada. Dengan demikian maka pendapatan daerah akan semakin naik.<sup>11</sup>

Sesuai dengan alamnya bahwa Kota Batu sudah terbentuk menjadi sebuah kota agropolitan yang didukung oleh keadaan alam dan lingkungan wisata yang potensial. Dengan potensi daerah yang seperti ini yaitu potensi wisata pertanian dan potensi wisata alam,

menjadi komoditi andalan yang komparatif. Sektor pertanian atau agrowisata merupakan salah satu pilihan untuk dikembangkan di Kota Batu.

Ternyata pencanangan ini direspon oleh masyarakat secara positif, karena pertanian bukanlah merupakan hal baru bagi masyarakat Kota Batu. Pada umumnya masyarakat Kota Batu telah lama berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya yaitu dengan mengambil manfaat dari lahan-lahan pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan jasa pariwisata.

Di Kota Batu banyak obyek wisata yang berbasis pertanian, antara lain 1). Tanaman hias di sepanjang jalan Bukit Berbunga di Desa Sidomulyo. Kemudian 2). Pasar bunga dan sub terminal agrobisnis (STA) di Desa Sidomulyo. 3). Wisata Ikan (kolam dan kuliner) di pasar Benih Ikan (PBI) di Desa Sidomulyo. 4) Wisata Selecta dengan pedagang bunga dan buah apel serta pangan olahan untuk oleh-oleh. 5). Wisata hutan rakyat di Cangar Desa Sumberbrantas. 6) Wisata Bunga potong (Krisan) di perusahaan Inggulaut di Desa Tulungrejo. 7) Wisata Bunga Potong (Mawar) di Desa Gunungsari. 8) Wisata petik apel, jambu biji dan strawberi di kawasan Agrowisata Batu dan 9) Wisata Desa Ternak Sapi perah di Desa Oro-Oro Ombo.<sup>12</sup>

Disamping itu hasil pertanian berupa sayuran dataran tinggi seperti kubis, wortel, kentang, kembang kol dan lain-lain juga merupakan daya tarik tersendiri untuk datang ke wilayah wisata Kota Batu. Kemudian hasil buah-buahan selain apel, seperti jeruk, strawberi, buah naga, kesemek dan buah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 192

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pemda Kota Batu. *Sejarah Kota Batu*. (Batu: Pemda Kota Batu, 2008)

<sup>12</sup> Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Wisata Batu. *Wisata Pertanian Kota Batu*. (Batu: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Wisata Batu, 2009).

bluebery pun juga tak kalah menarik. Berjuta pohon apel tumbuh di lembah dan perbukitan, ketika dipandang dari kejauhan nampak seperti permadani berbukit-bukit, tetapi apabila didekati wisatawan bisa berteduh dibawahnya bahkan bisa memetik buahnya dan memakannya sepuas mungkin.<sup>13</sup>

Ratusan mata air alami tersebar di cekungan lembah, yang memancar dan mengalir menjadi sungai yang berkilauan. Keindahan dan kesegaran air pegunungan ini kemudian dikembangkan menjadi satu buah wisata alam. Wisata alam yang juga dikembangkan di Kota Batu antara lain yaitu Coban Talun, Coban Rais, Coban Kethak, yang merupakan beberapa air terjun di Kota Batu yang dapat dinikmati keindahannya.

Aroma bunga sudah dapat kita hirup sejak memasuki gerbang Kota Wisata Batu. Bunga sudah menjadi hal yang tak terpisahkan dari masyarakat. Di sepanjang jalan menuju Kota Batu baik dari arah Kota Malang ataupun dari arah Kota Kediri, banyak dijumpai para pedagang bunga dengan beranekawarna tanaman maupun anekawarna bunga, sehingga menambah keasrian sepanjang jalan yang kita lalui.<sup>14</sup> Setiap bunga mempunyai keunikan dan mempunyai makna sendiri-sendiri. Ternyata bunga tidak sekedar dimaknai sebagai tanaman, tetapi sudah menjadi sahabat, penghidupan, harapan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Batu. Apabila kita berada di kebun bunga, banyak makna yang dapat digali dari bunga-bunga tersebut. Begitu banyak kenangan manis yang dapat kita rasakan bila dikelilingi bunga-bunga. Inilah daya tarik dari wisata kebun bunga,

Belum lagi wisata kuliner dan

kerajinan. Apabila kita berada di Kota Wisata Batu, makan apa saja terasa enak. Hal ini disebabkan karena udaranya yang sejuk. Apalagi kalau menu yang disajikan benar-benar mengundang selera makan. Di Kota Wisata Batu ini dapat dijumpai sajian yang lezat, mulai kelas hotel berbintang sampai kelas kaki lima. Adapun masakan khas Kota Batu adalah nasi *ampok*, ketan kicir yang cocok dimakan di pagi hari, pecel, tape ketan hitam yang dapat menghangatkan tubuh, banyak dijumpai di pemandian Selecta. Kemudian jagung bakar, wedang angsle, yaitu sejenis kolak dengan ketan dan serabi juga *petulo* yang sangat nikmat untuk suasana dingin Kota Batu, dan lain-lain. Semua makanan ini dapat dinikmati dengan enak dan dengan suasana kesejukan alami.

Untuk wisata kerajinan ada beberapa produk yang dihasilkan di daerah Kota Wisata Batu ini. Kerajinan di Kota Wisata Batu sangat berkembang. Keahlian para pengrajin diperoleh dari warisan turun-temurun, yaitu berupa keahlian mengolah kayu dan pembuatan alat dapur dari bahan batu kali. Hal ini karena bahan kayu dan batu kali sangat banyak bahkan melimpah dan mudah didapat di wilayah Kota Batu. Karena keunikan dan keindahan kerajinan dari bahan kayu dan batu kali ini, maka banyak seniman dan pengrajin dari luar kota yang datang dan tinggal di Kota Batu untuk belajar menimba ilmu pada para pengrajin lokal yang sudah mempunyai keahlian secara turun-temurun. Dengan demikian sering terjadi proses transfer ilmu.

Disamping itu, banyak pula anak-anak muda dari Kota Batu yang merantau ke Bali dan Yogyakarta, untuk belajar dalam bidang kerajinan. Mereka setelah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

kembali ke daerah, kemudian mengembangkan kerajinan yang berasal dari daerahnya yang sudah mempunyai ciri khas dan keunikan sendiri, menjadi suatu hasil kerajinan yang mempunyai nilai seni dan nilai jual yang lebih tinggi.

Potensi-potensi wisata yang ada di Kota Batu ini merupakan sektor agrowisata yang memiliki potensi yang kuat. Dengan didukung keadaan alam dan lingkungan yang kondusif, Kota Batu bisa merupakan daerah wisata yang nyaman. Terutama di musim liburan, hari Sabtu dan hari Minggu, sektor agrowisata ini banyak diminati oleh para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana lebih lanjut secara optimal, dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan.

## **PENUTUP**

Kota Batu yang dahulunya merupakan lahan perkebunan kopi, teh dan kina sehingga Kota Batu mendapat sebutan Kota perkebunan, kini hanya tinggal kenangan. Saat ini semua lahan perkebunan sudah menyempit atau berkurang, sebagian besar telah berubah menjadi villa atau perumahan, bahkan ada pula yang digunakan sebagai lahan penanaman sayur.

Kota Batu dengan sebutan Kota Perkebunan kini menjadi sepeinggal kisah masa lalu. Kota Batu saat ini menjadi salah satu kota tujuan wisata alam dan pertanian (agrowisata) yang mempunyai daya tarik tersendiri. Banyak hasil pertanian yang bisa dikembangkan sehingga menjadi satu produk yang menjadi ciri khas daerah Kota Batu. Hasil-hasil dari pertanian ini agar lebih tahan lama menjadi lahan kreativitas para pengusaha untuk memproduksi hasil buah-buahan menjadi produk olahan pangan yang cukup menjanjikan.

Selain itu wisata peninggalan jaman kerajaan dan pemerintahan Belanda masih dipertahankan dan dikembangkan menjadi lebih menarik. Bahkan wahana-wahana wisata baru dibangun di setiap tahunnya. Ternyata kesadaran wisata tidak hanya dari pemerintahan, tetapi telah menjadi budaya masyarakat Kota Wisata Batu. Pencanangan pemerintah tentang pengembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata Pertanian direspon masyarakat dengan baik. Karena hal ini bisa menjadikan mereka bisa berkehidupan menjadi jauh lebih baik. Oleh karenanya maka masyarakat Kota Batu mempunyai slogan *pariwisata telah menjadi budaya masyarakat Kota Wisata Batu*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Wisata Batu, 2009, *Wisata Pertanian Kota Batu*. Batu: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Wisata Batu
- Fitri Nedy. 2006. "Batu, Swiss-e Malang" dalam *Malang Tempo Doeloe* Malang: Banyumedia Publishing
- Lasmiyati, dkk., 2006, Sejarah Kota Banten Lama dalam *Kota dan Kabupaten Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006
- Pemda Kota Wisata Batu. 2008. *Sejarah Kota Batu*. Batu: Pemda Kota Wisata Batu

SriMargana dan Umi Barjiyah, 2010, *Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak

Tim Penyusun Kamus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH, KEMBANG DAN PUDARNYA PELABUHAN TUBAN**

**Taryati \***

## **Abstrak**

*Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh, kembang dan pudarnya pelabuhan. Pelabuhan Tuban dikenal pada masa Erlangga (abad X) dan mencapai puncak perkembangan pada zaman Majapahit terutama pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (abad XIV). Selanjutnya banyak faktor pula yang mempengaruhi pudarnya pelabuhan tersebut. Faktor dominan penyebab terangkatnya Pelabuhan Tuban dari pelabuhan biasa menjadi pelabuhan utama, adalah faktor geografis dan politik yaitu terpenuhi idealnya suatu pelabuhan. Idealnya pelabuhan adalah cukup lebar-luas, airnya dalam, ombak tenang, karena terletak di teluk yang besar dan dengan mulut teluk yang agak menciut dan berada di jalur lalu lintas perdagangan laut dan darat yang ramai. Kebijakan politik para penguasa juga menjadikannya sebagai pelabuhan penting atau utama.*

*Selanjutnya faktor dominan yang mempengaruhi pudarnya Pelabuhan Tuban juga faktor geografis terutama terjadinya pendangkalan dan faktor politik karena penguasa yang memindahkan fungsi pelabuhan utama ke lain tempat. Namun demikian faktor ekonomi dan sosial budaya ikut pula andil dalam pudarnya pelabuhan ini menjadi seperti sekarang yaitu sebagai pelabuhan rakyat yang kecil saja.*

*Kata Kunci : Pelabuhan Tuban, Tumbuh-Kembang, Pudarnya Pelabuhan*

## **Pengantar**

Pelabuhan merupakan tempat kapal berlabuh. Tempat ini memiliki fasilitas yang dapat melayani kegiatan bongkar muat, baik penumpang maupun barang. Lokasi suatu pelabuhan yang baik antara lain terlindung, terletak pada jalur perdagangan dan kemudahan pencapaian dari belakang yang merupakan daerah produksi maupun sebagai daerah konsumen barang.<sup>1</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa

sejumlah pelabuhan di Indonesia mengalami masa muncul, berkembang dan memudar, bahkan lenyap sama sekali. Keadaan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang memperkuat dan memperlemah fungsi pelabuhan tersebut dapat diketahui. Memang pertumbuhan atau perkembangan banyak diharapkan, namun sejarah menunjukkan bahwa sebagian pelabuhan memudar bahkan ada pula yang kemudian lenyap sama

---

\* Penulis adalah staf peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta

<sup>1</sup> Suprapti, *Studi Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Pelabuhan: Kasus Gilimanuk Jepara*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hal. 1.

sekali.

Pelabuhan Tuban, misalnya, walaupun pernah menjadi pelabuhan sangat penting atau utama, kini pelabuhan tersebut masih hidup walaupun hanya sebagai pelabuhan kecil tidak seperti pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Faktor-faktor yang mempengaruhi hingga pada keadaannya sekarang antara lain faktor geografis, politik, ekonomi dan sosial budaya.

### **Pelabuhan Tuban**

Pelabuhan merupakan tempat kapal berlabuh bertolak dengan aman. Lokasinya tentu saja yang baik, terlindung, dan terletak pada jalur perdagangan dengan lalu lintas yang lancar. Secara astronomis Kabupaten Tuban terletak pada posisi  $6^{\circ} 40' - 7^{\circ} 18'$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ} 30' - 112^{\circ} 35'$  Bujur Timur. Lokasi ini berada di tepi pantai utara Kabupaten Tuban, tepatnya di depan atau di sebelah utara alun-alun dengan jarak 200 m. Batas kedua tempat tersebut berupa jalan raya PANTURA yang menghubungkan Surabaya Jakarta. Kawasan Pelabuhan Tuban terletak pada teluk yang cukup besar dan luas dengan ombak yang relatif tenang. Selain itu juga merupakan pelabuhan yang aman dan baik bagi transportasi laut, ataupun darat tentunya, mengingat letaknya di tepi jalan raya PANTURA

Kawasan Pelabuhan Tuban ini merupakan daratan rendah pantai (daratan alluvial) yang sebenarnya merupakan kaki dari *Pegunungan Kendeng Utara*. Ketinggian kawasan ini antara 0-5 m di atas permukaan air laut. Menurut geologinya *Pegunungan Kendeng Utara* ini terbentuk sejak zaman Miocen. Pegunungan ini terjadi dari endapan laut atau merupakan

sedimentasi dari fosil-fosil binatang laut dan pelapukan batuan sekitarnya yang kemudian terangkat ke permukaan oleh gaya endogin pada zaman Plistosen, menjadi daratan antiklinal. Pada zaman Holosen terjadi pelapukan serta erosi batuan karst (kapur) dan berubah menjadi daratan alluvial. Proses pelapukan serta erosi tersebut masih terjadi hingga sekarang.

Kawasan Pelabuhan Tuban yang merupakan bagian dari *Pegunungan Kendeng Utara* ini bila dilihat dari laut, nampak seperti berada di atas batu putih terapung (*watu kambang putih*) sehingga tempat tersebut diberi nama Kambang Putih.<sup>2</sup> Bukti nama tersebut terdapat pada prasasti Raja Erlangga yang berada di tempat ini dengan nama Prasasti Kambang Putih yang diperkirakan berangka tahun sekitar 1052 M.

Sesuai dengan jenis tanahnya (yang merupakan pegunungan kapur) daerah Pelabuhan Tuban terdapat sungai di bawah tanah yang bermuara di pantai. Di kawasan Pelabuhan Tuban juga terdapat sumber air tawar yang kemungkinan merupakan sungai di bawah tanah, di bagian barat bernama Sumur Srumbung (jarak dari pantai 10 m) dan di bagian timur bernama Sumur Belandong. Sampai saat ini kedua sumur tersebut masih digunakan oleh rumah tangga para nelayan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada kawasan Pelabuhan Tuban, tidak banyak sungai. Sungai yang mengalir ke wilayah bagian utara Tuban hanyalah Sungai Klero, namun inipun terletak agak jauh dari kawasan Pelabuhan Tuban. Pada umumnya sungai di wilayah Kabupaten Tuban banyak mengalir ke arah selatan yaitu dari *Pegunungan Kendeng Utara* ke arah Sungai Bengawan Solo.

---

<sup>2</sup> Parastuti, dkk., *Pemerintah Kabupaten Tuban Dalam Untaian Sejarah* (Tuban: Pemerintah Kabupaten Tuban, 2007), hal. 55.

Dengan keadaan yang demikian letak kawasan Pelabuhan Tuban dari dahulu hingga sekarang tidak berubah karena tidak terjadi endapan atau sedimentasi baru. Laut Tuban yang merupakan bagian dari Laut Jawa adalah merupakan bagian dari Paparan Sunda yang mempunyai kedalaman 100 *fatkom* (183 m). Laut Jawa ini merupakan laut landas kontinen Benua Asia dan menghubungkan pulau yang ada di dalamnya yaitu : Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.<sup>3</sup>

Adapun asal-usul nama "Tuban" terdapat beberapa versi. Kata "Tuban" berasal dari *me(tu) (ban)yu* (keluar air). Nama ini diberikan oleh Raden Aryo Dandang Wacana (bupati) pada saat pembukaan hutan Papringan, secara tidak terduga keluar sumber air. Sumber air ini sangat sejuk dan tawar atau tidak mengandung garam walaupun berada di tepi pantai. Versi yang lain adalah bahwa "Tuban" berasal dari kata *wa(tu) ti(ban)* (batu yang jatuh dari langit). Legenda bahwa batu yang jatuh tersebut adalah Pusaka Kerajaan Majapahit yang konon sedang dipindahkan ke Demak. Batu pusaka Majapahit itu berupa yoni, kemudian diangkut oleh sepasang burung bangau, namun ketika sampai di atas wilayah Kota Tuban batu itu jatuh akibat kelalaian dari sepasang burung tersebut. Versi lain dari nama "Tuban" adalah bahwa kata "Tuban" berasal dari kata '*tuba*' atau racun (*jenu*), dan kenyataan di sebelah barat Kota Tuban terdapat daerah yang bernama Kecamatan Jenu.

Berbicara tentang Pelabuhan Tuban tentunya tidak bisa lepas dari peran penguasa-penguasa setempat, sebab bagaimanapun tentu memberi andil

dalam tumbuh kembangnya pelabuhan tersebut. Mengenai cikal bakal penguasa Negeri Tuban adalah keturunan raja Pajajaran.<sup>4</sup> Diceritakan bahwa salah satu dari cucu raja Pajajaran (Prabu Banjaransari) yang bernama Raden Haryo Randukuning telah diijinkan dan direstui mengembara ke timur untuk menyempurnakan ilmu dan menambah pengetahuan. Dalam mengembara jauh ke daerah timur yaitu sampai di kaki Gunung Kalakwilis (wilayah Jenu), Raden Haryo Randukuning membuka hutan Srikandi dan dibuatlah sebuah Kadipaten serta diberi nama Kadipaten Lumajang Tengah.

Setelah menjadi Kadipaten Lumajang Tengah, Raden Haryo Randukuning bergelar Kyai Ageng (Kyai Gede Lebe Lontang). Kemudian putra dan cucunya juga membuka hutan untuk dijadikan kadipaten, demikian selanjutnya, sehingga pusat kadipaten berpindah-pindah. Akhirnya pada keturunan yang ke-6 yang bernama Raden Harya Dandhang Wacana membuka hutan di arah barat laut yang bernama Hutan Papringan dan diberi nama Tuban. Oleh karena itu cikal bakal adipati Tuban yang banyak dikenal adalah Haryo Dandhang Wacana. Adipati berikutnya adalah keturunannya hingga yang ke-17 yang bernama Pangeran Dalem. Adipati inilah yang terakhir karena sejak tahun 1619 dengan berhasilnya Kerajaan Mataram (Sultan Agung) mengalahkan kadipaten ini maka menandai pergantian garis keturunan penguasa *trah* Kyai Ageng Papringan ke tangan penguasa Mataram (Pangeran Pojok). Selanjutnya digantikan oleh saudara dan keturunan Pangeran Pojok. Adipati-adipati

---

<sup>3</sup> Wahyudi, A.A., *Tuban Sebagai Pelabuhan Utara Majapahit Abad XIII XV*, (Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana, 2004), hal. 50.

<sup>4</sup> Parastuti, dkk., *op. cit.*, hal. 38 - 39.

berikutnya mereka yang ditunjuk oleh Raja Mataram termasuk diantaranya adalah Adipati Tjitrosoana ke VI-IX yang sebenarnya *trah* dari Kabupaten Jepara Jawa Tengah.

### **Tumbuh-Kembang Pelabuhan Tuban.**

Dalam membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh, kembang dan pudarnya Pelabuhan Tuban akan ditinjau dari sudut pandang keadaan geografis, politik, ekonomi dan sosial budaya. Tumbuh dan kembangnya Pelabuhan Tuban, sudah barang tentu seperti halnya pelabuhan pantai lainnya yaitu bermula merupakan tempat pemberhentian atau menambatkan perahu-perahu dan memasarkan hasil tangkapan laut para nelayan. Teluk Tuban sendiri sejak dahulu di samping ideal kedalaman airnya dan gelombang yang aman bagi nelayan juga kaya ikan. Laut Jawa dan Selat Madura merupakan daerah operasi produktif penangkapan ikan bagi masyarakat nelayan pantai utara Jawa Timur termasuk wilayah Tuban, dengan jenis ikan antara lain: ikan *estuarin*, ikan *bantik*, ikan *benthopelagik*, dan ikan *pelagik*. Disebutkan pula bahwa menurut berita Cina (Dinasti Sung) hasil dari Jawa yang terutama adalah ikan.<sup>5</sup>

Dipilihnya tempat tersebut (teluk Tuban) sebagai pemberhentian dan pemasaran hasil kenelayan tentu saja dilihat dari kondisi lingkungan fisik. Kondisi tersebut antara lain adalah kapal dapat berlabuh dengan aman karena airnya tenang atau terlindung dari ombak besar, angin dan arus yang kuat.

Berdasarkan peta geologi Jawa Timur, Tuban merupakan sebuah teluk yang cukup baik untuk berlabuh. Mulut

teluk tidak terlalu besar, tetapi bagian dalamnya cukup luas. Kondisi yang demikian menjadikan arus air lautnya cukup tenang, atau arus gelombang tidak terlalu kuat. Keadaan yang demikian menjadikan kegiatan pelayaran baik bertolak ataupun berlabuh di Pelabuhan Tuban ini menjadi lebih aman.<sup>6</sup>

Mengenai kondisi kedalaman laut dan sedimentasi kawasan Pelabuhan Tuban, sepertinya tidak menjadi masalah. Hal tersebut karena tidak banyak sungai besar yang mengalir ke arah kawasan Pelabuhan Tuban. Berdasarkan hasil survey geologi yang pernah dilakukan, dinyatakan bahwa garis pantai Tuban relatif tidak ada perubahan sejak zaman Majapahit hingga sekarang. Bukti bahwa kawasan Pelabuhan Tuban cukup ideal pada masa lalu dan mempunyai kapasitas menampung kapal besar yaitu diketemukannya jangkar yang berjumlah 4 buah. Jangkar-jangkar tersebut cukup besar, sehingga diduga kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tuban tentulah kapal-kapal besar.<sup>7</sup>

Ukuran jangkar biasanya disesuaikan dengan besar kecilnya kapal, sehingga saat melempar sauh, kapal dapat berhenti dengan tenang. Jangkar tersebut adalah milik tentara Monggol yang ingin menghukum Raja Kertanegara (Singosari). Saat itu tahun 1292-1293, armada-armada tentara Monggol mendarat di Pelabuhan Tuban. Jadi pada masa Dinasti Ming, Pelabuhan Tuban masih menjalankan fungsinya secara aktif dalam kaitannya dengan perhubungan antar negara.<sup>8</sup>

Kondisi geografis yang lain adanya iklim. Laut Jawa termasuk juga laut

<sup>5</sup> Wahyudi, A.A., *ibid.*, hal. 65.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 51.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Parastuti, *op. cit.*, hal. 67.

Pelabuhan Tuban dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson ini mempengaruhi wilayah di sekitar khatulistiwa dengan arah gerak yang dipengaruhi oleh letak matahari. Angin ini bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah minimum. Oleh karena itu di Laut Jawa pada bulan Oktober-April angin dari arah barat yang biasanya mengakibatkan turun hujan dan sebaliknya pada bulan April-Oktober angin dari arah timur yang biasanya tidak mendatangkan hujan atau musim kemarau. Perjalanan angin inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan dalam melakukan aktifitasnya terutama dalam perdagangan khususnya kapal yang menggunakan layar. Kemudian arus laut juga dipengaruhi oleh angin maka arahnya juga searah dengan arah angin.

Keadaan geografis lainnya adalah tentang hidrologi. Pelabuhan harus menyediakan segala kebutuhan bagi para pelaut, misal penyediaan air tawar. Adanya sumber air tawar yang bersih tidak jauh dari Pelabuhan Tuban sangatlah menunjang perkembangan pelabuhan. Di sebelah barat dari *Boom* (dermaga) tepat 10 m dari pantai terdapat sumber air tawar yang besar dan bersih yang bernama Sumur Srumbung, sedang sebelah timur *Boom* sumber air tawarnya dinamai Sumur Belandong. Sumber air tawar yang besar dan bersih dan terletak di tepi pantai jarang ada, oleh karena itu kenyataan ini menimbulkan beberapa legenda di kalangan masyarakat. Konon sumber air tersebut dibuat oleh Sunan Bonang yang ingin memberi pelajaran kepada musuhnya yang sombong. Cerita lain bahwa sumber air tawar ini dibuat karena kesaktian dari jenderal tentara Cina yang mendarat di Pelabuhan Tuban ini.

Pertumbuhan dan perkembangan Pelabuhan Tuban juga dipengaruhi oleh keadaan politik pada waktu itu. Ketika pengaruh Kerajaan Sriwijaya terhadap Jawa melemah, Erlangga berusaha merebut kembali wilayah bekas kekuasaan pemerintahan Darmawangsa. Erlangga dalam memerintah sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Saat itu Pelabuhan Tuban bernama *K a m b a n g P u t i h*, Erlangga menjadikannya sebagai lalu lintas antar negara. Untuk menarik para pedagang asing agar singgah di Kambang Putih, memajukan perdagangan. Sehingga Erlangga membuat kebijakan penting yaitu dengan membebaskan beberapa jenis pajak. Akibatnya pelabuhan tersebut menjadi ramai karena banyak disinggahi perahu dagang dari India, Birma, Kamboja dan Campa.<sup>9</sup>

Kebijakan politik dari penguasa berikutnya yang juga putra Erlangga terhadap Pelabuhan Tuban tercatat sebagai bukti dalam Prasasti Kambang Putih. Inti dari Prasasti Kambang Putih ini adalah bahwa Raja Sri Mapanji Garasakan berkenan memberikan hadiah *sima* yaitu berupa tanah *perdikan* (otonomi) dan pembebasan berbagai macam pajak kepada Kepala Desa *K a m b a n g P u t i h*. Peristiwa penganugerahan ini disaksikan oleh semua (12) sesepuh (*buyut*) atau kepala-kepala kampung di Kambang Putih dan prasasti ini diberi tanda Garuda Muka.<sup>10</sup>

Angka tahun Prasasti Kambang Putih ini memang sudah rusak tak terbaca jadi tidak dapat dikenali lagi. Namun apabila dikaitkan dengan Mapanji Garasakan dia pun juga membuat Prasasti Malenga di Tuban yang berangka tahun 974 Saka (1052 m) maka Prasasti Kambang Putih

---

<sup>9</sup> Soeparma, R., *Tjataan Sejarah 700 tahun Tuban*. (Tuban: Percetakan "Sruni", 1971), hal. 53.

<sup>10</sup> Parastuti, dkk., *op. cit.*, hal. 58.

diperkirakan berangka tahun sekitar itu juga.<sup>11</sup> Pelabuhan Kambang Putih yang telah menjadi ramai karena perdagangannya sehingga disinggahi oleh berbagai perahu dagang yang berasal dari daerah lain ataupun dari negara lain akibat kebijaksanaan para penguasanya, menjadikan Pelabuhan Kambang Putih tumbuh makin berkembang.

Oleh karena daerah *Sima* adalah daerah yang bebas pajak atau daerah *perdikan* dan diberi otonomi sendiri, maka konsekuensinya adalah berupa pengurangan bahkan penghapusan terhadap berbagai macam pajak yang harus disetor ke kas kerajaan. Oleh karena itu sangat menguntungkan dari segi ekonomi karena berpengaruh terhadap kemudahan-kemudahan para *buyut* dalam mengelola daerahnya. Dengan demikian, berdagang dan bermukim di daerah tersebut menyenangkan dan memperoleh untung besar. Kambang Putih selain sebagai pelabuhan yang ramai dan menguntungkan juga merupakan pemukiman yang menyenangkan karena banyak penduduk asing tinggal di daerah ini.

Penguasa Kambang Putih selanjutnya yaitu pada masa Kerajaan Singosari. Pada masa tersebut juga merupakan kejayaan Kaisar Shih Tsu Kubilai Khan dari Dinasti Yuan. Agar tidak berada di bawah kaisar tersebut, Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari bertindak cepat membentengi kerajaannya dengan kekuatan yang lebih besar yaitu menyatukan Nusantara di bawah panji-panji Singosari. Maka pada tahun 1275 Kertanegara mengirim ekspedisi untuk menaklukkan Melayu

dan menurut Kitab Pararaton, ekspedisi prajurit-prajurit Singosari ke Melayu tersebut melalui Pelabuhan Tuban. Dari fakta tersebut dapat diketahui betapa pentingnya Pelabuhan Tuban pada masa Singosari karena untuk melakukan ekspedisi yang besar. Kertanegara memilih Pelabuhan Tuban sebagai tempat bertolak para prajuritnya. Jelas pada saat itu Pelabuhan Tuban menjadi andalan dan memegang peran penting bagi kerajaan besar Singosari.

Kekuasaan Singosari akhirnya surut selanjutnya pemegang kekuasaan Pelabuhan Tuban adalah Kerajaan Majapahit. Rupa-rupanya Kerajaan Majapahit menaruh harapan yang sangat besar bahwa Pelabuhan Tuban dapat mengantarkan Majapahit mencapai kejayaannya. Pada masa itu Majapahit menggunakan sarana Pelabuhan Tuban baik dalam urusan politik (khususnya politik ekspedisi) maupun perniagaan.<sup>12</sup> Memasuki abad ke 13 Tuban semakin berkembang dan mengalami pertumbuhan secara penuh pada masa Majapahit. Pada saat itu Pelabuhan Tuban berkembang menjadi 'enterpot' yang tidak hanya menjadi pusat pertemuan perdagangan dari berbagai negeri, tetapi juga mengimpor dan mengeksport barang-barang yang berasal dari berbagai negeri. Dijelaskan pula bahwa komoditi perdagangan yang menjangkau wilayah jauh, memperdagangkan barang-barang yang nilainya tinggi dan tahan lama seperti: batu mulia, kain sutera dan barang-barang lain yang hanya dapat diproduksi di tempat-tempat tertentu.<sup>13</sup>

Pelabuhan Tuban menjadi berkembang pesat tidak lain karena kebijakan politik penguasa Pelabuhan

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>12</sup> Wahyudi, AA., *op. cit.*, hal. 40.

<sup>13</sup> Parastuti, dkk., *op. cit.*, hal. 62.

Tuban yaitu Majapahit. Kebijakan politik tersebut berhubungan dengan perdagangan antara lain, mengadakan kerjasama perdagangan dengan negeri lain. Disebut juga dalam Negarakertagama bahwa Kerajaan Majapahit menjalankan kebijakan kerjasama perdagangan untuk menarik pedagang asing dengan cara mengundang pedagang asing pada saat diadakan upacara perayaan keagamaan di ibukota Kerajaan Majapahit. Disebutkan pula bahwa Pelabuhan Tuban merupakan suatu pelabuhan yang memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur dan merupakan daerah pelaksana perdagangan pemerintahan Majapahit.

Bentuk penerapan kebijakan perdagangan internasional Majapahit adalah dengan cara melarang pelayaran niaga asing berdagang ke sebelah timur Jawa, atau Jawa sebagai basis perdagangan, dan menjadikan Tuban sebagai pelabuhan tujuan dagang. Para pelayaran niaga asing diwajibkan berlabuh di pelabuhan Tuban, apabila tidak mematuhi akan diadakan pemaksaan dan penyerangan.<sup>14</sup>

Kebijakan Majapahit dalam politik perdagangan ini berhasil, informasi ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari catatan-catatan asing. Catatan Wong Ta-Yuan (1349), menyatakan bahwa pedagang Cina pada tahun 1349 sudah tidak lagi mencapai kepulauan Maluku (pulau rempah-rempah). Begitu pula ekspedisi-ekspedisi Cheng-Ho dari tahun 1371 hingga 1435 juga tidak mencapai kepulauan Maluku.<sup>15</sup> Dengan demikian penerapan kebijakan Majapahit untuk menguasai perdagangan Nusantara dan menjadikan Tuban sebagai pelabuhan utama yang

harus dikunjungi terlebih dahulu nampaknya sudah mencapai keberhasilan pada tahun 1349 dan mencapai puncak kebesarannya pada saat Majapahit yang dipimpin Hayam Wuruk. Pada masa ini, negeri Cina sendiri mengakui saat itu kerajaan Jawa sebagai negeri di luar Cina yang terkaya sesudah Arab. Dari pernyataan-pernyataan tersebut bahwa kebijakan kerajaan terhadap pelabuhan mengakibatkan kemakmuran kerajaan tersebut, juga terhadap kemakmuran Tuban sendiri khususnya kawasan Pelabuhan Tuban.

Faktor ekonomi jelas mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya Pelabuhan Tuban. Ini dimulai sejak wilayah tersebut mendapat perhatian dari penguasanya yaitu Raja Erlangga. Kebijakan di bidang ekonomi untuk daerah Kambang Putih adalah dibebaskannya beberapa jenis pajak, dengan harapan pelabuhan tersebut menjadi ramai dan banyak disinggahi perahu-perahu dagang termasuk dari luar negeri. Begitu pula pada penguasa berikutnya (putra Erlangga) dengan bukti peninggalan Prasasti Kambang Putih yang menyebutkan bahwa Raja Mapanji Garasakan memberikan otonomi pada pelabuhan tersebut. Konsekuensi dari otonomi antara lain berupa pengurangan bahkan penghapusan berbagai macam pajak yang harus disetor ke kas kerajaan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan ditinjau dari segi ekonomi.

Pelabuhan Tuban pada masa Singosari, pelabuhan ini pun menjadi andalan. Terbukti untuk pengiriman ekspedisi menaklukkan daerah-daerah lain agar Nusantara ini bersatu di bawah panji-panji Singosari, pelabuhan yang

---

<sup>14</sup> Wahyudi, AA., *op. cit.*, hal. 90-95.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 98.

dipilih untuk itu adalah Pelabuhan Tuban. Begitu pula pada masa Majapahit, kerajaan ini betul mempercayai Pelabuhan Tuban dalam urusan politik juga dalam urusan ekonomi. Penguasa Majapahit percaya bahwa Pelabuhan Tuban dapat juga digunakan menjadi andalan dalam menopang ekonomi kerajaan. Oleh sebab itu pelabuhan ini difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat.

Di samping hal tersebut, dilakukan pula kerjasama dengan pedagang yang singgah dan setiap kapal dagang diharuskan singgah di Pelabuhan Tuban. Bahkan Pelabuhan Tuban diputuskan dijadikan pusat perdagangan. Komoditas perdagangan yang bernilai tinggi dari kepulauan Nusantara berupa rempah-rempah dan lain dipasarkan ke daratan Asia dan Eropa. Oleh sebab itu untuk mendapatkan rempah-rempah di Maluku, penguasa Majapahit melarang perahu pedagang lain masuk ke daerah tersebut, dan yang diperbolehkan hanya pedagang Majapahit. Jadi fungsi Pelabuhan Tuban adalah menyalurkan komoditas rempah-rempah untuk di ekspor ke negeri lain, begitu sebaliknya pelabuhan juga menyalurkan produk-produk impor yang dibawa pedagang asing (termasuk ke Maluku).<sup>16</sup>

Sebenarnya Prasasti Kambang Putih ini selain teks prasasti tersebut merupakan anugerah dari penguasa yang menjadikan pelabuhan Kambang Putih sebagai daerah *Sima* (daerah yang dibebaskan dari pajak) juga memberi kewenangan pada daerah tersebut untuk menjadi pusat perdagangan. Status *sima* pada masa Jawa kuna, berlaku dengan waktu yang cukup lama bahkan sampai di kemudian hari dan tidak boleh diubah

oleh siapa pun termasuk raja yang memerintah daerah tersebut. Di daerah *sima* pajak penjualan barang dagangan hanya akan dikenakan kepada pedagang yang melebihi ketentuan batas jumlah dagangan yang telah ditetapkan di daerah *sima* tersebut.<sup>17</sup>

Dengan berbagai kondisi tersebut, maka daerah *sima* dapat menarik para pedagang baik dalam dan luar negeri atau negeri lain yang ingin berdagang di daerah tersebut. Hal ini karena di daerah *sima* tidak dibebani pajak yang tinggi, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari pada berdagang di daerah non *sima*. Keringanan beban pajak perdagangan ini di dalam pandangan ekonomi merupakan bentuk subsidi dari pemerintah, sehingga harga jual di Pelabuhan Tuban menjadi lebih murah.

Jenis barang-barang yang disediakan di Pelabuhan Tuban untuk dijual ke luar adalah merica, garam, rempah-rempah, mutiara, kulit, penyu, gula tebu, pisang, kayu cendana, emas, perak, kelapa, kapuk, tekstil, katun, sutera, belerang dan budak belian. Pelabuhan Tuban ini juga merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang berasal dari Maluku, sehingga Cina menganggap pelabuhan ini sangat penting.<sup>18</sup>

Sistem perdagangan yang semacam ini membuat saudagar-saudagar Tuban menjadi lebih kaya sehingga menaikkan daya beli masyarakat setempat dan menyebabkan semakin banyak kapal dagang asing singgah. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, kapal-kapal dagang asing singgah di pelabuhan yang mampu menyalurkan komoditasnya atau pada daerah yang memiliki daya beli terhadap barang dagangannya.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 83-85.

Distribusi komoditas impor yang dibawa pedagang asing juga lancar karena didukung oleh adanya angkutan darat (jaringan jalan darat) yang lancar. Apabila dari pelabuhan ke pusat ibukota Majapahit lancar maka pedagang asing akan lebih ekonomis dalam memasarkan dagangan kepada pada bangsawan. Di samping itu Pelabuhan Tuban masa Majapahit ini memiliki struktur birokrasi perdagangan yang teratur dan terinci. Tuban memang merupakan suatu pelabuhan yang memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur dan merupakan daerah pelaksana perdagangan pemerintahan Majapahit.<sup>19</sup>

Adapun bentuk penerapan kebijakan perdagangan internasional Majapahit yakni dengan cara melarang pelayaran niaga asing berdagang ke sebelah timur Jawa. Jadi di sini Jawa sebagai basis perdagangan, dan menjadikan Tuban sebagai pelabuhan tujuan dagang. Para pelayar niaga asing diwajibkan berlabuh di Pelabuhan Tuban dan apabila tidak mematuhi akan diadakan pemaksaan dan penyerangan. Dengan demikian pada waktu itu Majapahit menggunakan kekerasan untuk memaksa kapal pelayaran niaga untuk datang ke Pelabuhan Tuban.<sup>20</sup>

Faktor sosial budaya yang mempengaruhi tumbuh dan kembangnya Pelabuhan Tuban adalah sumberdaya manusia. Sebagai daerah pelabuhan, penduduknya sangat terbuka terhadap masyarakat lain bahkan dapat berkomunikasi dengan baik. Kenyataannya banyak pedagang yang bermukim di Tuban, sehingga menjadikan penduduknya semakin banyak. Perkembangan suatu pelabuhan

ditandai adanya pertumbuhan penduduk. Sifat keterbukaan masyarakat tidak hanya terwujud dalam penerimaan komunitas lain saja akan tetapi terbuka terhadap keyakinan lain yang dianut oleh masyarakat lain.<sup>21</sup> Keterbukaan Tuban terhadap keyakinan lain terbukti dari ditemukannya bekas candi berujud 3 buah yoni di kawasan ini. Di dekat yoni tersebut terdapat masjid Sunan Bonang dan di kompleks Makam Sunan Bonang juga diketemukan Kalpataru. Dengan demikian temuan itu menunjukkan bahwa di Tuban telah hidup dua agama yang saling berdampingan dengan damai dan sejak dahulu masyarakat yang tinggal di kawasan Pelabuhan Tuban sudah melakukan keterbukaan dan toleransi agama dengan baik.<sup>22</sup>

Sumber daya manusia di Tuban juga cukup banyak. Hal ini akibat hubungan yang baik dengan para pelayaran dagang yang lain sehingga menambah pengetahuan dalam perniagaan lautnya. Ini terlihat para nelayan Tuban berniaga selain ke Maluku juga ke Malaka, Filipina, Surat, Malabar, India.<sup>23</sup>

### **Pudarnya Pelabuhan Tuban**

Pudarnya pelabuhan ini dipengaruhi oleh adanya faktor politik yang lebih dominan di samping juga kondisi geografis. Faktor politik antara lain karena semakin melemahnya pemerintahan Majapahit yang membuat para bupati di daerah pesisir utara Jawa mulai mengingkari kekuasaan Majapahit. Mereka lebih memilih kekuatan baru dan ini dilakukan pula oleh Bupati Tuban. Bupati ini memang telah masuk Islam sebagaimana

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 92.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 95-96.

<sup>21</sup> Zuhdi, S., *Cilacap (1830-1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. (Jakarta: KPG, 2002), hal. 131.

<sup>22</sup> Parastuti, dkk., *op. cit.*, hal. 65.

<sup>23</sup> Wahyudi, AA., *op. cit.*, hal. 125.

penduduk pantai utara Jawa yang lain. Hal ini terlihat pada masa-masa berakhirnya kekuasaan Majapahit, Tuban berada di bawah kekuasaan Bupati Raden Harjo Tedjo. Saat itu Raden Harjo Tedjo merupakan kepercayaan penguasa Majapahit. Namun ketika Raden Patah menyerang Majapahit, Raden Harjo Tedjo justru malah membantu Raden Patah. Majapahit jatuh dalam kekuasaan Raden Patah pada tahun 1478.<sup>24</sup>

Melemahnya Kerajaan Majapahit antara lain juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang diakibatkan oleh mundurnya perniagaan. Kebijakan perdagangan internasional yang dimonopoli ini menjadikan semakin melemahnya pengembangan ekonomi daerah taklukan sebagai bumerang bagi Kerajaan Majapahit. Hal ini berdampak pada melemahnya sumber-sumber ekonomi Kerajaan Majapahit yang akhirnya Pelabuhan Tuban juga kurang mendapat sokongan dalam distribusi perdagangan sehingga pelabuhan tersebut ikut pula melemah.

Adanya kebijakan monopoli perdagangan dalam jangka waktu tertentu memang telah meningkatkan peran Pelabuhan Tuban sebagai pelabuhan utama, namun dalam jangka panjang kebijakan ini berdampak pada inflasi di Kerajaan Majapahit.<sup>25</sup> Akibatnya Majapahit melemah secara ekonomi yang berarti pula melemahnya peran Pelabuhan Tuban dalam lalu lintas perdagangan laut internasional. Kebijakan perdagangan internasional Majapahit yang dilakukan dengan cara melarang pelayaran niaga asing berdagang langsung ke kepulauan

Indonesia Timur dan mewajibkan untuk berlabuh di Pelabuhan Tuban, memicu ketidak senangan dan terjadi bentrokan-bentrokan. Hal ini terjadi karena apabila para pelayaran niaga asing tidak mematuhi maka diadakan pemaksaan atau dilakukan penyerangan.

Sumber Cina pada abad ke 15 menyebutkan bahwa Pelabuhan Tuban sebagai tempat yang tidak aman, bahkan disebutnya sebagai sarang bajak laut. Hal ini karena kapal-kapal Tuban memaksa dengan kekerasan agar kapal-kapal Cina singgah di Pelabuhan Tuban. Oleh sebab itu kapal-kapal Cina justru menjauh dan lebih suka ke Gresik dan Surabaya. Apalagi pelabuhan-pelabuhan tersebut juga berusaha membangun pelayanan publik yang lebih baik agar perahu-perahu niaga mau singgah. Persaingan antar pelabuhan ini menjadikan penguasa Tuban semakin marah sehingga melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji. Tuban menggunakan kekerasan untuk memaksa kapal-kapal datang ke pelabuhannya. Bahkan kapal-kapal yang berlayar dari Banjarmasin menuju Gresik juga dihadang untuk singgah ke Tuban. Tak mengherankan bilamana orang-orang Cina memberikan stempel kepada pelabuhan Tuban sebagai kawasan sarang bajak laut.<sup>26</sup>

Pelabuhan Tuban menjadi semakin berkurang peranannya setelah ditaklukkan oleh Mataram pada tahun 1619. Saat itu sebenarnya Tuban dalam kedudukan sangat kuat karena selain mempunyai benteng yang kokoh dan besar serta tentara yang handal bahkan memiliki meriam, namun dalam serangan yang kedua dapat ditaklukkan.<sup>27</sup> Walaupun Tuban memiliki

<sup>24</sup> Soeparmo, R., *op. cit.*, hal. 79-80.

<sup>25</sup> Wahyudi, AA., *op. cit.*, hal. 174-175.

<sup>26</sup> Parastuti, dkk., *op. cit.*, hal. 73-74.

<sup>27</sup> Graaf, H.J. de, *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. (Jakarta: PT Tempri, 1986). hal. 50-

bupati (Pangeran Dalem) yang gagah berani yang juga menantu kesayangan Sultan Pajang dan memiliki pertahanan kuat, peralatan dan prajurit yang baik, ternyata dapat dikalahkan Mataram karena kekurangan dalam hal kewaspadaan, disiplin, ketegasan dan kekompakan.<sup>28</sup> Pada saat itu Tuban menjadi bagian dari kekuatan politik pedalaman, namun peranannya semakin berkurang karena Mataram tidak memilih Tuban sebagai pelabuhan penting, melainkan Jepara. Kepercayaan dari penguasa Mataram kepada Jepara ini membuat Tuban makin terpinggirkan dari kancan lalu lintas perdagangan laut internasional. Selain itu, pelabuhan mengalami pendangkalan. Kondisi ini diperparah lagi yaitu pada abad XVII tepatnya tahun 1646 Jepara berhasil merebut posisi sebagai pelabuhan perdagangan internasional.<sup>29</sup>

Pesaing pelabuhan lain di pantai utara Jawa selain Jepara adalah Gresik, Jaratan, Surabaya dan Banten. Sesudah Malaka diduduki Portugis pada awal abad ke 16 perdagangan internasional berpindah ke Malaka dan Banten. Catatan Tome Pirea pada tahun 1599 sewaktu berkunjung ke Pelabuhan Tuban menyebutkan bahwa kapal-kapal dagang saat itu lebih suka di Gresik dari pada Tuban.<sup>30</sup> Hal ini menurutnya adalah karena fasilitas pelabuhan di Tuban sudah mulai berkurang atau disebabkan oleh endapan tanah yang telah mendangkalan pelabuhan, atau juga oleh sistem bea cukai yang tinggi sehingga para pedagang tidak mendapatkan keuntungan yang

diharapkan.

Pudarnya atau terpuruknya Pelabuhan Tuban terlihat pada abad ke 15 dan 16, di saat kapal-kapal dagang yang besar sudah harus berlabuh jauh di laut atau cukup jauh dari kota. Kondisi Pelabuhan Tuban saat itu sudah mulai dangkal. Kenyataan yang demikian inilah yang menjadikan Pelabuhan Tuban terpuruk. Pada masa penjajahan Belanda kondisi tersebut juga tidak mengalami perubahan, artinya tidak ada perbaikan atau tetap dangkal. Walaupun orang Belanda diperlakukan baik dan bahkan mendapat hadiah yang berharga dari penguasa Tuban, namun Belanda yang berkunjung (*Vice Admiral*) ini masih menggerutu karena kapalnya harus berlabuh jauh dari pantai akibat dangkalnya Pelabuhan Tuban.<sup>31</sup>

Masa pemerintahan kolonial Belanda kedudukan Kota Tuban tidak lebih sebagai kota kecamatan saja. Begitu juga pada masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan, pelabuhan Tuban tetap sama yaitu seperti sekarang ini sebagai pelabuhan nelayan biasa. Walaupun bekas *Boom* atau dermaga memang masih kelihatan sisanya, akan tetapi dermaga tersebut sudah lama tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya pendangkalan. Namun sisa-sisa kejayaan masa lalu tercermin pada posisi bangunan-bangunan yang membuktikan pentingnya arti pelabuhan.<sup>32</sup>

## Penutup

Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh, kembang dan pudarnya

---

<sup>28</sup> Suwardjan dan Siti Alfiah, *Pemerintah Akhir Majapahit di Tuban sampai Jatuhnya Kadipaten Tuban*. (1987). Hal. 30.

<sup>29</sup> Parastuti, dkk., *loc. cit.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 73.

<sup>31</sup> Soeparmo, R., *op. cit.*, hal. 64.

<sup>32</sup> Gardjito, M., dkk., *Pesona Tuban: Irama Nikmatnya Masakan*. (Tuban: Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, 2004). Hal. 97.

Pelabuhan Tuban. Masing-masing faktor saling berkaitan dan mempengaruhi, namun paling dominan yang mempengaruhi dalam hal tumbuh kembang dan pudarnya Pelabuhan Tuban adalah faktor geografis dan politik. Faktor geografis tersebut antara lain adalah letaknya yang sangat ideal yaitu di teluk yang dalam dan lebar dengan mulut teluk yang menyempit, sehingga dapat menampung kapal-kapal besar dan kecil dalam jumlah banyak dengan keadaan aman dari angin dan gelombang. Kemudian kapal-kapal tersebut juga dapat merapat ke pinggir pelabuhan, sehingga mudah dalam bongkar muat ataupun bertolak dan berlabuh. Selain itu, kondisi hidrologi menjadikan terdapat sumber air tawar di tepi pantai yang sangat dibutuhkan dalam pelayaran laut. Begitu pula kondisi geologinya yang mengakibatkan pelabuhan tersebut berada di atas batu kambang, menjadikan pelabuhan tidak mudah terabrasi dan tidak banyak sungai yang mengalir.

Faktor geografis lainnya adalah letak pelabuhan yang berada di dekat jalan darat yang besar yaitu di tepi Jalan Raya PANTURA. Hal ini mengakibatkan transportasi kedaratan sangat lancar, begitu pula transportasi lautpun sangat baik karena berada di tepi jalan lalu lintas laut dan jalur perdagangan yang ramai yaitu Laut Jawa. Kondisi angin dan arus airnya pun sangat menunjang, serta potensi lautnya pun banyak menghasilkan ikan.

Faktor politik sangat menunjang

terhadap tumbuh- kembang Pelabuhan Tuban. Sejak dahulu penguasa-penguasa pelabuhan selalu memberi peluang berupa kebijakan agar tempat tersebut menjadi pelabuhan besar. Mulai sejak Erlangga diteruskan oleh Mapanji Garasakan (putera Erlangga), kemudian Kertanegara (Singosari) hingga Hayam Wuruk (Majapahit). Faktor yang juga berperan dalam tumbuh dan kembangnya Pelabuhan Tuban adalah faktor sosial budaya, antara lain masyarakatnya yang terbuka bahkan terhadap keyakinan agama. Masyarakatnya hidup damai berdampingan dan juga pengetahuan mereka bertambah baik dalam segi kelautan ataupun perniagaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pudarnya pelabuhan Tuban, adalah faktor politik, faktor geografis, dan juga faktor sosial budaya. Faktor politik adalah dengan ditaklukkannya kabupaten ini oleh Mataram (Sultan Agung) dan dialihkannya fungsi pelabuhan internasional ke pelabuhan Jepara. Faktor geografisnya adalah walaupun pelabuhan tersebut sejak abad XI hingga abad XIV masih dalam, belum ada pendangkalan, namun pada abad selanjutnya sudah mulai dangkal hingga sekarang. Kemudian faktor sosial budaya yang mempengaruhi saat itu adalah terjadinya erosi atau krisis mental yaitu kekurangan dalam hal kewaspadaan, disiplin, percaya diri, ketegasan dan kurang bersatu padu sesama penguasa pesisir.

## Daftar Pustaka

- Gardjito, Murdijati dkk., *Pesona Tuban: Irama Nikmatnya Masakan*. Tuban Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, 2009.
- Graaf. H.J. de, *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta. PT. Temprint, 1986.

- Parastuti dkk., *Pemerintah Kabupaten Tuban Dalam Untaian Sejarah*. Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban, 2007.
- Soeparmo, R., *Tjatatatan Sejarah 700 Tahun Tuban*. Tuban Percetakan “Sruni,” 1971.
- Suprapti dkk., 1995 *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan : Kasus Gilimanuk-Jepara*. Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Suwardjan dan Siti Alfiah, *Pemerintah Akhir Majapahit di Tuban Sampai Jatuhnya Kadipaten Tuban*. Tuban: Museum Kambang Putih, 1987.
- Wahyudi, Aries Anang, *Tuban Sebagai Pelabuhan Utama Majapahit Abad XIII-XV*. Denpasar. Fakultas Sastra Universitas Udayana, 2004.
- Zuhdi, Susanto, *Cilacap (1830-1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2002.

# KONFLIK ANTARKOMUNITAS ETNIS DAN REPRESENTASI IDENTITAS ETNIS DI SAMPIT, KALIMANTAN TENGAH

Bambang H. Suta Purwana

## Abstrak

*Konflik antarkomunitas etnis di Sampit, Kalimantan Tengah oleh elit masyarakat lokal dimanfaatkan sebagai wahana representasi dan sekaligus penguatan identitas etnis Dayak untuk merebut kembali martabat mereka sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi Dayak yang berdaulat di petak danum atau tanah leluhurnya. Konflik antarkomunitas etnis tersebut oleh masyarakat Dayak dimaknai sebagai benturan budaya dengan warga pendatang, khususnya orang Madura. Resolusi konflik yang disepakati oleh DPRD dan pemda setempat adalah pengakuan secara resmi kebudayaan Dayak sebagai kebudayaan dominan di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa orang-orang Madura yang kembali tinggal permanen di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur harus menghormati dan mentaati nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat setempat. Implementasi Perda tersebut sebagai acuan resolusi konflik cukup berhasil sehingga puluhan ribu warga keturunan Madura yang mengungsi keluar daerah telah pulang kembali dan diterima dengan damai di kampung halamannya di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Data primer dalam tulisan ini diambil dari hasil wawancara dengan informan dalam 2 kali kunjungan penelitian di Kotawaringin Timur pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing kesempatan dilaksanakan selama 10 hari kerja di lapangan.*

*Kata kunci : Sampit - konflik resolusi konflik identitas representasi identitas*

## 1. Pendahuluan

Perspektif ekonomi politik dalam analisa konflik antarkomunitas etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa konflik tersebut merupakan wahana pertarungan elit politik memperebut akses penguasaan sumber daya ekonomi dan politik di daerah tersebut. Isu primordial seperti masalah kesukubangsaan hanyalah cara untuk memobilisasi massa pendukung

suatu kelompok yang mengusung identitas etnis tertentu untuk menyerang kelompok lain dan memperoleh legitimasi kultural atas tindak kekerasan kolektif tersebut. Gerry van Klinken menyatakan konflik antarkomunitas etnis di Sampit merupakan wahana elit politik setempat memperebutkan posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan daerah dan lembaga politik karena mereka merasa termarginalisasi selama

---

\* Penulis adalah staf peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta.

pemerintahan Orde Baru.<sup>1</sup>

Warga masyarakat lokal yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan konflik berdarah di Sampit Kalimantan Tengah memiliki penafsiran tersendiri mengenai akar permasalahan konflik dan mekanisme resolusi konflik tersebut. Pemahaman mereka tentang konflik sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa mereka sebagai penduduk asli daerah tersebut termarginalisasikan dalam proses pembangunan yang berlangsung dinamis di Kotawaringin Timur. Adat istiadat, hukum adat dan identitas budaya masyarakat Dayak sebagai penduduk 'asli' di daerah itu dianggap telah diremehkan oleh warga pendatang. Pembentukan konstruksi pemahaman sebagai warga 'asli' yang tertindas selama pemerintahan Orde Baru telah menorehkan luka yang mendalam pada kalangan elit masyarakat Dayak. Ketika memasuki masa Reformasi, tata kehidupan sosial politik menjadi semakin bebas, memberikan kesempatan bagi sekelompok elit lokal yang mengekspresikan rasa keresahan sosial itu dalam konteks membangun martabat jati diri mereka sebagai orang Dayak yang berdaulat di daerah tanah tumpah darahnya.

Konflik antarkomunitas etnis di Sampit oleh elit lokal dapat dipahami dalam konteks representasi identitas etnis mereka. Politik identitas etnis seperti ini dapat dimaknai sebagai upaya sekelompok elit dari masyarakat Dayak untuk membangun kesadaran bersama dan mengkonstruksikan kriteria yang disebut sebagai identitas atau jati diri mereka yang seharusnya berdaulat dan dihormati di tanah tumpah darah mereka sendiri.

Konflik Sampit tahun 2001 oleh elit masyarakat Dayak dimanfaatkan menjadi wahana untuk memperkuat identitas kultural dan basis legitimasi mereka sebagai 'putra daerah' yang ingin berdaulat di tanah kelahirannya. Konflik tersebut dimaknai sebagai 'konflik budaya' karena warga pendatang dianggap tidak menghormati nilai-nilai budaya dan norma sosial masyarakat Dayak. Bagaimana elit Dayak membangun basis legitimasi kultural melalui politik identitas dan perjuangan mereka memperoleh pengakuan kebudayaan Dayak sebagai kebudayaan dominan di Kotawaringin Timur menjadi permasalahan yang perlu pembahasan lebih mendalam.

## **2. Tradisi Lisan Tentang Konflik Orang Dayak Melawan Orang Madura**

Salah seorang pimpinan umat Kaharingan di Sampit menyatakan bahwa konflik antara orang Madura melawan orang Dayak itu sudah ada dalam tradisi lisan atau cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dalam sebagian masyarakat Dayak. Kemenangan orang Dayak atas orang Madura bagi tokoh Kaharingan tersebut sudah ditamzulkan dalam tradisi lisan masyarakat Dayak. Alkisah pada jaman dahulu kala, di Kampung Manen Paduran, suatu desa kecil di daerah sekitar hulu Sungai Kahayan sedang terjadi wabah penyakit yang luar biasa, banyak sekali warga masyarakat yang menderita sakit. Orang-orang tua di kampung tersebut bersepakat kata bahwa sumber dari malapetaka wabah penyakit itu berasal dari seorang perempuan cantik. Perempuan tersebut tidak lain adalah istri Mambang. Kemudian

---

<sup>1</sup> van Klinken, Gerry, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

terjadilah aksi massa untuk mengusir sepasang suami istri tersebut, Mambang dan istrinya dipaksa untuk pergi sejauh mungkin dari Kampung Manen Padura. Mambang dan istrinya pergi keluar masuk hutan belantara, naik turun bukit dan akhirnya dari atas sebuah bukit mereka berdua memutuskan untuk membuat sampan dari kayu Sungke. Sampan tersebut ditariknya kearah Sungai Kahayan, bekas tapak sampan ditarik tersebut akhirnya berubah menjadi Sungai Manen Paduran. Setelah sampai di Sungai Kahayan, Mambang dan istrinya *milir* atau mendayung sampan ke arah hilir Sungai Kahayan, mereka berdua menyusuri Sungai Kahayan ke arah hilir dan pada akhirnya sampan sampai di pantai dan sampan yang mereka tumpangi terus terbawa ombak laut. Tidak terhitung berapa hari dan minggu mereka berdua terombang-ambing dan terseret ombak laut hingga suatu malam mereka berdua terdampar di pantai Nipah (Pulau Madura). Pada dini hari, ayam jantan yang dibawa oleh Mambang berkokok bersahut-sahutan dengan kokok ayam jantan milik raja Nipah (orang Madura). Raja Nipah heran mengapa ada ayam jantan yang berani menantang ayam jagonya maka raja Nipah tersebut mengutus anak buahnya untuk mencari pemilik ayam jantan tersebut. Ketika anak buah raja Nipah menemukan Mambang di pantai Nipah, ia berkata kepada Mambang: “Kamu berani singgah di sini berarti kamu berani menantang Raja?”. Mambang menjawab: “Berani!”. Kemudian disepakati Raja Nipah akan bertanding dengan Mambang dalam satu lubang tanah yang hanya cukup untuk berdua saja. Mambang membawa besi Mentikai

berwujud sebuah keris yang bernama Duhung Pampan Binteng. Dalam perang tanding tersebut Raja Nipah mati ditusuk keris Duhung Pampan Binteng. Melihat rajanya mati, orang-orang Madura bersumpah bahwa anak keturunan mereka tidak bisa bermusuhan dengan orang Dayak, apabila bermusuhan dengan orang Dayak anak keturunannya akan mati bersimbah darah.<sup>2</sup>

Tokoh umat Kaharingan ini meyakini bahwa 'kekalahan telak' orang Madura di Sampit atau Kotawaringin Timur karena orang-orang Madura itu telah melanggar sumpah nenek moyang mereka. Ia menyebutkan bahwa jumlah orang Madura yang mati mencapai angka lebih dari 10.000 orang sedangkan dari pihak orang Dayak yang mati hanya 80 orang. Hal yang menarik dari pernyataan tokoh umat Kaharingan ini bukan persoalan perkiraan jumlah korban yang mati dari pihak orang Madura yang fantatis dan tidak didukung fakta empiris namun suatu pesan yang sangat tegas bahwa keperkasaan dan dominasi orang Dayak di Kalimantan Tengah tidak perlu diragukan lagi. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dahulu sebelum terjadi konflik Sampit banyak orang malu mengaku dirinya sebagai orang Dayak. Pada saat konflik meledak dan pasca konflik orang berlomba-lomba menunjukkan bahwa dirinya orang Dayak. “Siapa yang disebut panglima burung dalam perang Sampit?”, ia bertanya sekaligus untuk dijawab sendiri, ”Panglima burung itu adalah orang Kaharingan. Kaharingan itu agama asli Kalimantan Tengah. Semua budaya Dayak ada dalam agama Kaharingan”.

---

<sup>2</sup> Purwana, Bambang H. Suta, *Konflik dan Resolusi Konflik Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah*. (Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2008), (laporan penelitian tidak diterbitkan).

### **3. Representasi dan Politik Identitas Etnis**

Sebelum konflik tahun 2001, pandangan masyarakat umum tentang agama Kaharingan kurang menyenangkan. Agama Kaharingan sering dimaknai sebagai kepercayaan yang mengutamakan aspek dinamisme-animisme. Pandangan masyarakat awam yang demikian itu juga dibenarkan oleh seorang peneliti Barat, Anne Mason Banwell, yang menyatakan “Dulu, semua orang Dayak menganut salah satu agama asli yang berdasarkan konsep dinamisme. Agama asli penduduk di daerah Kalimantan Tengah disebut 'Kaharingan'”.<sup>3</sup> Meskipun Kaharingan telah mendapat status sebagai agama resmi dengan menyandang nama agama Hindu Kaharingan namun pesona agama ini agak memudar bagi generasi muda karena ada kesan atau *image* bahwa beragama Hindu Kaharingan itu 'kuno' atau 'animistik' sehingga tidak mengherankan populasi penganut agama 'Hindu' Kaharingan hanya sekitar 20 persen di Kalimantan Tengah. Sebagian besar orang Dayak yang lainnya menganut agama Islam yakni antara 50 persen sampai dengan 70 persen, sedangkan penganut agama Kristen kira 10 sampai dengan 15 persen dan penganut agama Katolik sekitar 5 persen.<sup>4</sup> Ada kecenderungan apabila seseorang penganut Kaharingan yang kawin dengan penganut agama lain akan berganti agama dari Kaharingan menjadi penganut agama pasangan hidupnya. Data statistik lain menggambarkan fenomena yang lebih memprihatinkan

tentang persentase populasi penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah, tahun 1971 populasi penganut Kaharingan sebesar 22% dari total populasi penduduk, tahun 1978 menjadi 17,69% dan pada tahun 1997 penganut Kaharingan menyusut menjadi 12,35%.<sup>5</sup>

Seorang informan yang merupakan tokoh agama Kaharingan di Sampit mengatakan:

“Konflik sosial yang berdarah tahun 2001 secara langsung atau tidak langsung mengangkat martabat orang Dayak khususnya penganut agama Kaharingan. Pada waktu itu semua orang ingin mengatakan dirinya Dayak padahal sebelumnya mereka malu menyebut dirinya Dayak. Namun semua orang di Sampit tahu yang paling banyak jasanya adalah orang Dayak dari hulu dan mereka itu adalah orang-orang Kaharingan. Siapa manusia sakti itu kalau bukan orang Dayak yang beragama Kaharingan?”

Selanjutnya informan tersebut menyatakan bahwa konflik tahun 2001 dianggap telah membuka mata bagi dunia bahwa orang Dayak khususnya penganut agama Kaharingan tidak dapat dianggap remeh. Dalam terminologi Meyer,<sup>6</sup> fenomena ini disebut mania identitas 'fundamentalis' yang merupakan bagian instrumentalisasi politik terhadap perbedaan budaya, walaupun sering dengan maksud dan penekanan yang berbeda pada kedua pihak. Demikian pula halnya dengan

<sup>3</sup> Banwell, Anne Mason, *Konflik Antarsuku Bangsa di Kalimantan Tengah*. (Depok: Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2001), hal 12.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> K.M.A. Usop, “Membangun Masa Depan Yang Berpengharapan di Kalimantan Tengah: Pengembangan Nilai-nilai Sosial Budaya”, makalah yang dipresentasikan dalam *Kongres Rakyat Kalimantan Tengah Tahun 2001*. (Palangkaraya: Panitia Penyelenggara Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 4-7 Juni, 2001), hal 7.

<sup>6</sup> Thomas Meyer, *Politik Identitas: Tantangan Terhadap Fundamentalisme Moderen*. (Jakarta: Friedrich-Eben-Stiftung dan Pemuda Muhammadiyah, 2004), hal 34-35.

pengikutnya. Hal ini disebabkan mereka mendapat identitas melalui pernyataan supremasi terhadap orang atau kelompok lain dan hal ini juga merupakan cara membenaran perlakuan kekerasan terhadap pihak yang dinyatakan sebagai musuh. Gerry van Klinken menyatakan bahwa orang Dayak melalui kekerasan kolektif tahun 2001 mengalami pergeseran identitas mendadak, tiba-tiba mereka merasa lebih Dayak daripada sebelumnya.<sup>7</sup>

Konflik penuh kekerasan di berbagai tempat di Kotawaringin Timur termasuk juga Palangkaraya telah memberikan suatu legitimasi kultural yang sangat kuat bagi orang Dayak khususnya penganut agama Kaharingan. Sebagai suatu entitas sosio-kultural, agama Kaharingan selayaknya diperhitungkan dalam sistem sosial politik di Kotawaringin Timur. Terpilih untuk pertama kalinya seorang tokoh penganut Kaharingan sebagai anggota legislatif Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan suatu tanda yang jelas bagi eksistensi agama Kaharingan sebagai salah satu identitas asli warga masyarakat Kotawaringin Timur. Pembangunan 'Tiang Pantar' setinggi kurang lebih 20 meter di suatu perempatan jalan propinsi menuju Pangkalanbun, dianggap sebagai peringatan bagi semua pihak terhadap peristiwa konflik berdarah tahun 2001. 'Tiang Pantar' dalam tradisi agama Kaharingan dianggap sebagai simbol kesempurnaan arwah orang yang telah meninggal dunia yakni kembalinya arwah kepada Ranying Mahatara Langit.

Tidak jauh dari 'Tiang Pantar' itu juga dibangun untuk pertama kalinya di Kotawaringin Timur, Balai Basarah atau gedung tempat warga penganut agama Kaharingan melakukan kegiatan peribadahan. Kemudian pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga menetapkan upacara adat *mamapas lewu* yang diangkat dari tradisi agama Kaharingan sebagai upacara resmi yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemda Kotawaringin Timur beserta warga masyarakat. *Mamapas* berarti 'menyapu' sehingga dalam konteks upacara adat Dayak bermakna 'membersihkan / mensucikan'. *Lewu* berarti desa atau kota tempat pemukiman warga masyarakat. Upacara *mamapas lewu* dimaksudkan untuk membersihkan desa atau kota, tempat pemukiman penduduk dari unsur-unsur kejahatan yang akan berpengaruh buruk terhadap ketentraman dan keamanan warga masyarakat.

Semua fenomena di atas menggambarkan adanya proses revitalisasi identitas primordial khususnya identitas Dayak yang dikaitkan dengan agama asli, Kaharingan, setelah lama agama Kaharingan disudutkan sebagai kepercayaan 'animisme-dinamisme' yang berbeda dengan agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, lima agama resmi ini dalam terminologi Weber disebut agama-agama dunia.<sup>8</sup> Kisah-kisah 'mistis' dalam konflik Sampit memperteguh 'Kaharingan' sebagai identitas asli masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang berbeda

<sup>7</sup> Gerry van Klinken, "Pelaku baru, identitas baru: Kekerasan antar suku pada masa pasca Soeharto di Indonesia", dalam Dewi Fortuna Anwar; Helene Bouvier; Glenn Smith; Roger Tol (Editor), *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Fasifik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; LIPI; LASEMA\_CNRS; KITLV-Jakarta, 2005), hal 112-114.

<sup>8</sup> "The term is used here in a completely value-neutral sense. The Confucian, Hinduist, Buddhist, Cristian and Islamist religious ethics all belong to category of world religion". Weber, M, "Major Features of World Religions", Roland Robertson (editor), *Sociology of Religion: Selected Readings*. (Middlesex, England: Penguin Books, 1971), hal 19.

dengan 'agama-agama import'<sup>9</sup> yang masuk Kalimantan Tengah. Seorang informan mengatakan: "Kami penganut agama Kaharingan adalah pemegang jatidiri asli masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dahulu sebelum masuk 'agama import' nenek moyang kami semua menganut Kaharingan". Pantas dicatat bahwa informan ini tidak pernah menggunakan sebutan 'Hindu Kaharingan' namun hanya menyebut 'Kaharingan', seakan-akan ia ingin mengatakan bahwa agama Kaharingan itu khas Kalimantan dan jangan disamakan dengan agama Hindu yang ada di Bali atau bahkan India. Hal ini juga secara tersirat merupakan bentuk 'perlawanan konsep' terhadap apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bahwa Kaharingan dapat diakui sebagai agama resmi di Indonesia apabila bersedia disebut sebagai agama Hindu.<sup>10</sup> Pada tanggal 30 Maret 1980 dikukuhkan secara resmi penggabungan agama Kaharingan ke dalam agama Hindu Dharma. Semenjak tahun 1980 sampai sekarang, organisasi yang mengurus umat Kaharingan adalah

Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan dengan pusatnya di Palangkaraya. Proses penggabungan umat Kaharingan ke dalam wadah Parisada Hindu Dharma sampai saat ini masih terus berlangsung. Di kalangan umat Kaharingan sendiri terdapat sikap menerima dan menolak terhadap penggabungan tersebut. Ada beberapa organisasi yang didirikan oleh beberapa umat Kaharingan yang ingin keluar dari organisasi Parisada Hindu Dharma, antara lain: MAKIP (Majelis Agama Kaharingan Indonesia Pusat), BAKDP (Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia), MAKRI (Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia), dan DBDKI (Dewan Besar Dayak Kaharingan Indonesia).<sup>11</sup>

Semangat resistensi penganut agama Kaharingan ini nampak jelas dari 'sumpah darah', suatu pernyataan tertulis dengan tinta dari darah manusia, bahwa penganut agama Kaharingan akan mempertahankan eksistensinya sebagai entitas sosio-kultural di Kalimantan sampai dengan titik darah yang penghabisan. Mereka yang telah menyatakan 'sumpah darah' itu bersedia

<sup>9</sup> Terminologi agama import ini digunakan oleh seorang tokoh Kaharingan di Kota Sampit untuk menyebut agama Kristen, Katolik dan Islam.

<sup>10</sup> Apabila Kaharingan ingin diakui sebagai agama yang resmi oleh pemerintah maka Kaharingan harus memakai atribut salah satu agama resmi. Akhirnya pilihan jatuh pada Hindu sehingga agama Kaharingan disebut agama Hindu Kaharingan. Dalam statusnya sebagai agama resmi, pemerintah juga memberikan fasilitas bagi penganut Hindu Kaharingan. Setiap tahun diangkat PNS guru agama Hindu Kaharingan. Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan yang berada di kota Palangka Raya pun 'harus' menghadirkan dosen-dosen dari Denpasar (Bali) sehingga konsepsi agama Hindu Bali banyak diajarkan dalam lembaga pendidikan ini. Namun pada sisi lain upaya menggali nilai-nilai dan ajaran asli agama Kaharingan terus berlangsung, atas bantuan dari berbagai pihak dan peneliti dari Jerman berhasil dilakukan kodifikasi ajaran agama Kaharingan 'asli' sehingga dapat disusun Kitab Panaturan sebagai Kitab Suci Agama Kaharingan. Sebelumnya, ajaran-ajaran dasar dari agama Kaharingan hanya dapat didengarkan dari penuturan para *balian* (pemimpin upacara dalam agama Kaharingan). Para *balian* ketika dalam keadaan *trance* menuturkan kisah-kisah suci asal usul penciptaan alam semesta, asal usul manusia, asal usul berbagai upacara dalam rangkaian upacara Kaharingan semuanya dapat dituturkan oleh para *balian*. Sebelum berhasil disusun Kitab Panaturan, ajaran-ajaran Kaharingan itu hanya ada dalam alam pikiran atau 'alam bawah sadar' para *balian* yang belum tentu dapat dipahami oleh orang awam penganut Kaharingan. Penyusunan Kitab Panaturan adalah upaya mengkodifikasikan 'teks lisan' menjadi 'teks tertulis' sehingga siapapun yang membaca Kitab Panaturan akan lebih memahami dasar-dasar ajaran Kaharingan tanpa harus menunggu seorang *balian* mencapai tahap *trance* untuk menuturkan kisah-kisah suci masa lalu orang Dayak di Kalimantan Tengah. Upaya ini sekaligus juga merupakan bentuk respon penganut Kaharingan terhadap Departemen Agama yang membuat kriteria bahwa suatu sistem keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat disebut agama apabila memiliki konsepsi tentang Tuhan Yang Maha Esa, ada 'utusan' atau nabi yang memberitakan pesan-pesan dari 'Langit' kepada umat manusia di bumi dan memiliki Kitab Suci sebagai sumber ajaran yang sah bagi para penganutnya.

<sup>11</sup> Damardjati Kun Marjanto, *Eksistensi Agama Kaharingan di Kotawaringin Timur*. (Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (laporan penelitian tidak diterbitkan, 1999), hal 29-30.

mati untuk membela kehormatan agama Kaharingan.<sup>12</sup> Pada saat ini 'Kaharingan' merupakan salah satu simbol yang merepresentasikan identitas kultural dari orang Dayak setelah posisi Demang Adat sebagai pemimpin tradisional sudah termarginalkan dan bergeser menjadi pemimpin upacara adat yakni Demang Adat hanya dikenal sebagai 'pengusir hantu' di areal hutan yang akan dibuka oleh perusahaan HPH. Alim ulama Kaharingan merupakan elit kultural dalam masyarakat Dayak yang cukup diperhitungkan dalam percaturan politik di Kalimantan Tengah. Ketua Majelis Ulama Kaharingan Indonesia semenjak tahun 1977 direkrut Golkar dan menjadi anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah.<sup>13</sup>

Konflik berdarah tahun 2001 di Sampit ini menegaskan kembali tuntutan elit Dayak yang menghendaki semua jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan harus dipegang oleh putra daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Kongres Rakyat Kalteng tahun 2001 dan konflik tersebut telah meneguhkan orang Dayak sebagai tuan di negerinya sendiri.

#### **4. Resolusi Konflik Sosial di Sampit: Pengakuan Kebudayaan Dayak Sebagai Kebudayaan Dominan**

Warga masyarakat Kota Sampit atau warga Kotawaringin Timur secara umum, sebagaimana yang sering dikatakan oleh banyak orang dalam berbagai kesempatan baik itu merupakan forum resmi, pernyataan resmi para pejabat daerah, tokoh masyarakat dan pembicaraan orang umum di warung

kopi, menganggap akar permasalahan konflik Sampit 2001 adalah masalah budaya yakni kebudayaan orang Madura itu memberi kesan 'eksklusif', 'keras' dan 'arogan'. Persepsi seperti itu merata dalam pandangan penduduk asli Kalimantan baik itu orang Dayak, orang Sampit, dan orang Banjar. Pandangan kebanyakan orang seperti ini merujuk pada *stereotype* negatif tentang orang Madura. *Stereotype* negatif ini demikian meluas dipercaya oleh kalangan masyarakat umum sampai dengan para tokoh masyarakat. Kejadian aneh pernah terjadi ketika Prof. Dr. Selo Soemardjan dari Universitas Indonesia sedang mempresentasikan makalahnya dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Palangkaraya pada tanggal 5 Juni 2001 tentang akar penyebab konflik Sampit adalah faktor ekonomi khususnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara orang Dayak dengan orang Madura, para peserta kongres marah dan beberapa peserta kongres mengejar Prof. Selo Soemardjan sehingga kongres tersebut dihentikan beberapa saat untuk meredam amarah peserta kongres.<sup>14</sup> Pandangan umum orang Kalteng dan Sampit bahwa akar penyebab konflik Sampit itu bukan faktor ekonomi atau kesenjangan ekonomi antara penduduk 'asli' dengan pendatang dari Madura berdasarkan alasan seandainya faktor ekonomi menjadi akar permasalahan sudah pasti orang Banjar dan Jawa yang pertama kali akan diusir dari wilayah Kalimantan Tengah karena banyak orang Banjar dan Jawa yang kaya. Pasar-pasar di Palangkaraya, Sampit dan bahkan pasar-pasar tradisional di kampung-kampung

<sup>12</sup> Sumpah darah ini penulis lihat di kantor pusat Pengurus Agama Hindu Kaharingan tahun 2000 saat bertemu dengan Lewis KDR seorang tokoh agama Kaharingan di Kalimantan Tengah.

<sup>13</sup> Dhurorudin Mashad, dkk, *Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005), hal. 228-229.

<sup>14</sup> 'Kongres Dayak Kalteng Ricuh. Makalah Selo Soemardjan Dicitir', *Banjarmasin Post 6 Juni 2001*, "Makalah Selo Diskreditkan Etnis Dayak", *Metro Banjar 6 Juni 2001*.

pedalaman Kalimantan Tengah banyak didominasi pedagang Banjar, sedangkan pemilik warung makan termasuk warung tenda kebanyakan orang Jawa.

Para Uskup atau pimpinan umat Katolik se-Kalimantan yang bertemu di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2001 dan membuat pernyataan sikap bersama. Salah satu dari pernyataan para Uskup tersebut antara lain, tuduhan-tuduhan terhadap orang Dayak sebagai orang primitif, bodoh, dungu, malas, perambah dan perusak hutan dan lain sebagainya adalah tuduhan-tuduhan yang keji dan menimbulkan luka yang terdalam pada orang Dayak. Juga, tuduhan yang menyederhanakan terjadinya konflik hanya karena masalah kesenjangan ekonomi merupakan suatu penghinaan dan menunjukkan bahwa orang yang berpendapat demikian tidak menguasai permasalahannya.<sup>15</sup>

Konstruksi pandangan umum bahwa faktor budaya khususnya tiadanya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat Dayak merupakan akar masalah dari konflik Sampit dipertegas dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah tanggal 4-7 Juni 2001 akhirnya diterima sebagai pandangan resmi pihak eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik yakni *belum bahadat* (pasal 1 ayat 20) dan filosofi *huma betang* (pasal 1 ayat 21). Dalam Perda tersebut, *belum bahadat* diartikan sebagai suatu keyakinan untuk menjunjung tinggi tatanan nilai-nilai / norma / kaidah ketatakramaan yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian,

substansi Perda yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang Madura tersebut, dengan eksplisit menegaskan bahwa orang-orang Madura yang kembali tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur harus menghormati dan mentaati nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat setempat.

*Belom bahadat* hanya dapat dipahami dengan lebih baik apabila ditinjau dalam persepektif budaya masyarakat Dayak. Dalam konteks hubungan sosial, manusia Dayak mengembangkan prinsip atau landasan dasar sistem relasi sosial yang disebut *hadat* atau adat istiadat. Manusia Dayak wajib hidup *bahadat* artinya harus memiliki sopan santun dan tata krama yang diikat oleh sanksi-sanksi hukum *hadat* dari semenjak leluhur orang Dayak yang dipelihara secara turun-temurun oleh tua-tua adat atau *uluh bakas lewu*. Hal yang terdalam dari *hadat* ini dalam kehidupan orang Dayak bahwa adanya suatu ikatan lahiriah dan ikatan batiniah terhadap sanksi yaitu menyangkut (1) hubungan antar sesama manusia; (2) hubungan manusia dengan hukum keseimbangan kosmos. Pelanggaran terhadap hukum *hadat* secara berulang-ulang apalagi menyangkut penumpahan darah ke bumi baik sengaja maupun tidak sengaja sangat berat sanksinya karena dianggap mengganggu hubungan antar sesama manusia dan keseimbangan hukum kosmos dan mengakibatkan datangnya suatu bencana atau malapetaka yang dahsyat. Oleh karena itu *hadat* bagi orang Dayak harus dihormati. Melaksanakan hukum *hadat* bagi orang Dayak seharusnya bukan hanya bersifat lahiriah namun juga memiliki dimensi

---

<sup>15</sup> Edi Petebang, 'Masyarakat Dayak telah Dituduh dan Dilukai! Peringatan para Uskup Kalimantan yang disampaikan kepada Presiden Gusdur', dalam *Kalimantan Review* No.68/Th.X/10 April 10 Mei, 2001

supranatural. Dengan melaksanakan hukum *hadat* dipercaya oleh orang Dayak akan membebaskan mereka dari berbagai macam malapetaka. Peristiwa kerusuhan di Sampit dan Kalimantan Tengah secara umum dipandang oleh orang Dayak karena terjadi pelanggaran hukum *hadat* secara berulang-ulang dan dengan sengaja dilanggar tanpa pernah bersedia melaksanakan sanksi *hadat*. Kerusuhan sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah tersebut bagi orang Dayak dipercaya sebagai contoh atau hikmah tentang akibat pelanggaran hukum *hadat* yang dilakukan secara berulang-ulang yakni penumpahan darah manusia di bumi *Petak Danum* (tanah air) orang Dayak.

Hukum *hadat* sebagai bagian dari sistem norma yang mengatur masalah relasi sosial atau tata pergaulan antarwarga masyarakat meliputi tata pergaulan sehari-hari antarwarga yang harus saling menjaga martabat setiap orang, juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya misal dalam kaitannya dengan sistem bercocoktanam di ladang, berburu dan meramu di hutan. Masyarakat Dayak mengembangkan hukum *hadat* yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sumberdaya alam. Fungsi sosial kelembagaan adat yang dikembangkan atas dasar hubungan manusia dengan lingkungan hutan sebagai kawasan pemukiman merupakan *ecological wisdom* yang selama ini dipegang teguh sebagai pedoman dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Hukum *hadat* juga mengatur masalah perselisihan antarwarga masyarakat dari yang ringan seperti masalah perilaku yang dianggap menyinggung perasaan orang lain, sampai dengan perkelahian dan pembunuhan, mereka yang bersalah menurut peradilan *hadat* akan dikenakan

sanksi.

Sistem norma hubungan antarmanusia dalam konsepsi orang Dayak disebut *belum behadat* yang berarti tata karama kesopanan dalam pergaulan hidup. *Belom bahadat* adalah filosofi yang bermakna bahwa hidup manusia tidak hanya bertumpu pada kesejahteraan hidup material melainkan harus dalam konteks keseimbangan kosmos. Artinya, kehidupan manusia itu baik apabila manusia mampu menjaga keseimbangan dan keserasian hubungannya dengan kosmos. Sebagai bagian dari kosmos, manusia dan makhluk hidup lainnya harus selalu dalam hubungan keseimbangan.

*Belom bahadat* juga merupakan bagian dari ajaran agama Kaharingan tentang alam semesta. *Belom bahadat* dianggap sangat penting oleh semua pihak sehingga dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik pada Bab I Pasal 1 nomor 20 disebutkan: "*Belom bahadat* adalah suatu keyakinan untuk menjunjung tinggi tatanan nilai-nilai / norma / kaidah ketatakeramaian yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat." Sedangkan *huma betang* diartikan sebagai suatu prinsip kesetaraan hidup, kebersamaan, kegotong-royongan yang mencerminkan sikap menghormati adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

*Huma betang* adalah rumah panjang, bangunan rumah tempat tinggal secara kolektif warga masyarakat Dayak pada masa lalu. Gambaran tentang masyarakat Dayak sebagai satu kesatuan genealogis, sosial dan politik tercermin dalam kompleks pemukiman orang Dayak yang terdiri dari satu atau beberapa *huma betang*. *Huma betang* ini

tidak hanya bernilai secara material sebagai tempat tinggal warga masyarakat Dayak yang memiliki fungsi perlindungan dari panas matahari dan siraman air hujan dan kondisi-kondisi tidak nyaman lainnya dari pengaruh cuaca namun *huma betang* juga memiliki makna sosio-kultural yang sangat penting dalam tata kehidupan sosial masyarakat Dayak. Pada masa lalu, kultur dan struktur sosial masyarakat Dayak dapat dipahami dari sistem relasi sosial warga penghuni *huma betang*. Penghuni *huma betang* merupakan kesatuan sosial yang terbentuk karena faktor genealogis, terikat oleh hubungan kekerabatan dan beberapa komunitas *huma betang* tersusun menjadi satu struktur sosial komunitas orang Dayak yang memiliki satu sistem sosial tersendiri dipimpin oleh seorang *demang* dan memiliki wilayah teritorial berupa area pemukiman, tempat keramat, ladang dan hutan primer maupun sekunder. Suatu sistem sosial komunitas Dayak yang dipimpin seorang *demang* juga merupakan satu kesatuan wilayah hukum adat dan pada masa lalu merupakan suatu daerah otonom yakni memiliki sistem pemerintahan adat dan menguasai sumberdaya alam sebagai penyangga basis material kehidupan perekonomian masyarakat Dayak di wilayah tersebut. Komunitas orang Dayak tersebut relatif otonom karena kepemimpinan seorang *demang* dipertanggungjawabkan kepada warga komunitasnya, tidak dikenal suprastruktur di atas pemerintahan adat yang dipimpinnya. Matapencaharian komunitas Dayak sebagai pemburu, peramu dan sekaligus peladang menjadi landasan terbentuknya wilayah teritorial yang dikuasai masyarakat tersebut. *Huma betang* juga memiliki fungsi religio-magis, berbagai upacara yang

terkait dengan tahap-tahap daur kehidupan (*life-cycle*) orang Dayak seperti upacara kelahiran, perkawinan dan kematian menjadi *gawai* bersama warga penghuni *huma betang*. Kehidupan sosial di suatu *huma betang* dilandasi oleh rasa solidaritas sosial, gotong royong dan diikat oleh norma sosial yang disebut hukum adat atau *belom bahadat*.

P e m e r i n t a h K a b u p a t e n Kotawaringin Timur memandang sangat penting filosofi *huma betang* ini untuk direvitalisasi dalam tata kehidupan modern sehingga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Dalam salah satu bagian Perda itu disebutkan “bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang damai, mandiri dan demokratis sebagaimana filosofi 'Huma Betang' dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ...”

Prof. K.M.A. Usop dalam Kegiatan Temu Budaya dengan tema: Pemahaman Jati Diri Dalam Kehidupan Pluralisme Budaya yang diselenggarakan oleh Proyek P2ST Kalimantan Barat tahun 2003 pada tanggal 21-22 September 2003 di Palangkaraya menyatakan bahwa dalam masa Otonomi Daerah pasca Reformasi telah terjadi proses penguatan identitas sosio-kultural warga masyarakat Dayak namun hal ini terjadi hanya merupakan respon dari marginalisasi warga masyarakat Dayak selama berpuluh-puluh tahun. Prof. K.M.A. Usop mengingatkan bahwa warga masyarakat Kalimantan Tengah seharusnya tetap berpegang teguh mempertahankan nilai-nilai budaya *huma betang*. Idealnya budaya *betang*

menjadi payung bagi keberagaman kultural di Kotawaringin Timur dan Kalimantan Tengah. Sejarah dan identitas Dayak sebagai tuan rumah di wilayah ini seharusnya dihormati dan didudukkan sebagai budaya dominan di mana semua warga masyarakat baik lokal maupun pendatang berinteraksi dengan mengacu pada nilai-nilai budaya *huma betang*.<sup>16</sup> Keberadaan budaya dominan dalam suatu wilayah oleh beberapa pengamat dinilai sangat penting sebagai wadah interaksi antarbudaya dan sekaligus acuan nilai-nilai kultural di mana semua pihak memiliki titik tolak atau kesamaan persepsi dalam menjalin relasi sosial yakni dengan referensi nilai-nilai budaya lokal, dalam kasus Kotawaringin Timur dan Kalimantan Tengah adalah budaya Dayak, khususnya budaya *huma betang*.

Selain itu, banyak orang Sampit berpendapat bahwa konflik Sampit 2001 tidak ada hubungannya dengan agama. Mereka berpendapat mungkin orang Madura salah prakiraan bahwa orang Madura melawan orang Dayak yang bukan Islam akan memperoleh simpati atau dukungan dari orang Islam pada umumnya. Data statistik tentang afiliasi agama kelompok-kelompok etnis di Kalteng tahun 2000 menunjukkan bahwa 82% dari populasi orang Dayak Sampit beragama Islam.<sup>17</sup> Kalau dugaan ini benar maka orang Madura telah salah penafsiran karena orang Sampit yang muslim dianggap bukan Dayak sedangkan penduduk 'asli' di pedalaman yang non muslim itu dianggap Dayak. Mayoritas orang Sampit memang

beragama Islam namun secara genealogis mereka itu masih keturunan orang Dayak, meskipun mereka sudah berdarah campuran dengan Banjar atau suku bangsa lain namun mereka masih memiliki hubungan tali kekerabatan dengan orang Dayak non muslim. Dalam satu keluarga orang Dayak dapat terjadi masing-masing anggota keluarga menganut agama yang berbeda-beda, mungkin ada yang beragama Islam, Kristen Katolik atau Protestan, dan Kaharingan. Dayak merupakan identitas primer bagi penduduk 'asli' Kotawaringin Timur, sedangkan agama merupakan identitas ikutan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kalimantan Barat yaitu ketika orang Dayak menganut agama Islam akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Melayu.

Dalam pembicaraan penyelesaian permasalahan pasca konflik, dalam konteks '*social bargaining*' antaretnis, 'posisi tawar' warga Madura lemah karena mereka 'kalah perang' dan cenderung dianggap 'bersalah' atas sebab konflik. Dalam hal peristiwa konflik, warga Madura diminta untuk 'meminta maaf' atas sebab konflik dan mereka menerimanya.<sup>18</sup> Dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik, digunakan istilah 'etnik dampak konflik', sedangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh warga pengungsi yang akan kembali ke Sampit atau Kotawaringin Timur menggunakan istilah 'kami (Suku Madura)',

<sup>16</sup> Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2003, *Laporan Kegiatan Temu Budaya di Kalimantan Tengah*. Pontianak: Proyek P2ST Kalimantan Barat.

<sup>17</sup> Mengenai data afiliasi agama dari kelompok-kelompok etnis di Kalteng, lihat, Ian Chalmers, 2006, "The Dynamics of Conversion: the Islamisation of Dayak peoples of Central Kalimantan", makalah yang dipresentasikan dalam *The 16<sup>th</sup> Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA) di Wollongong, 26-29 Juni*, hal 17.

<sup>18</sup> Tim Lab-Socio UI, 2004, "Etnik Konflik dan Perdamaian di Kalimantan Tengah" dalam *Ringkasan Laporan Daerah dari Lab-Socio UI, Seminar Nasional Perdamaian dan Pembangunan di Indonesia*. Diselenggarakan oleh Bappenas dan UNDP di Jakarta 30 November 2 Desember, hlm 3. Tanda baca dikutip seperti dalam referensi aslinya.

menggambarkan posisi warga Madura sebagai 'tertuduh' atau 'biang kerok' dalam konflik Sampit tahun 2001. Dengan mekanisme demikian berarti warga masyarakat Madura yang pulang kembali ke Kabupaten Kotawaringin Timur mengakui supremasi budaya Dayak di atas bumi Tambun Bungai.

## **5. Penutup**

Kebudayaan Dayak di Sampit, Kotawaringin Timur, apabila dipahami dari dimensi diakronis adalah merupakan wadah dari semua hal yang telah dibangun selama berabad-abad: ingatan, lambang-lambang, pranata-pranata, bahasa, karya seni, semua hal yang membuat warga masyarakat Dayak di Kotawaringin Timur terikat satu dengan lainnya. Dalam konteks kultural masyarakat Dayak di Sampit, terdapat simbol, kepercayaan dan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memahami dan mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan konflik. Aspek nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat yang terangkum dalam filosofi budaya *huma betang* dan *belum bahadat* yang tidak dihormati oleh warga pendatang dianggap sebagai akar permasalahan dari konflik tersebut. Pemerintah Daerah dan DPRD Kotawaringin Timur sepenuhnya mengakomodasi wacana pemikiran ini dan memasukkan filosofi budaya *huma betang* dan *belum bahadat* sebagai substansi penting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik.

Entitas budaya 'asli' masyarakat Dayak khususnya upacara-upacara yang terkait dengan agama Kaharingan memberikan mekanisme penyelesaian konflik seperti pendirian Tiang Pantar

sebagai simbol naiknya arwah seluruh korban kerusuhan Sampit dan daerah lainnya di Kalimantan Tengah ke hadirat Tuhan atau Ranying Mahatara Langit, menandakan konflik berdarah di Sampit telah selesai dengan damai dengan diterimanya para arwah korban konflik di hadirat Ranying Mahatara Langit. Revitalisasi adat *mamapas lewu* oleh penganut agama Kaharingan dianggap sebagai upaya pembersihan masing-masing daerah atau wilayah yang mengadakan upacara itu dari gangguan makhluk-makhluk halus yang jahat menandakan hapusnya seluruh dendam kesumat dari warga masyarakat Kotawaringin Timur.

Dalam konstruksi budaya masyarakat Dayak, resolusi konflik dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme hukum adat. Warga masyarakat keturunan etnis Madura diharapkan dapat menghormati *belum bahadat* sehingga dapat diterima sebagai bagian integral dari masyarakat Kotawaringin Timur yang mejemuk namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat Dayak. Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik mengatur permasalahan ini secara jelas dan mendetail. Perda ini bersifat diskrimatif karena tidak semua orang Madura diperkenankan pulang ke Kotawaringin Timur, tokoh masyarakat Madura yang duduk sebagai pengurus dalam organisasi IKAMA (Ikatan Keluarga Madura) dilarang pulang kembali dan tinggal permanen di Kotawaringin Timur karena dianggap sebagai provokator dan bertanggungjawab terhadap munculnya konflik berdarah di daerah ini. Dalam Pasal 7 ayat 2b Perda No. 5 tahun 2004 disebutkan bahwa orang Madura yang

dapat diterima kembali di Kotawaringin Timur harus memenuhi salah satu kriteria, "Tidak terlibat langsung pada peristiwa konflik dan tidak terdaftar dalam pengurus IKAMA". Semua orang Madura yang menjabat sebagai pengurus IKAMA merupakan orang kaya dan lapisan elit komunitas Madura di Sampit seperti anggota DPRD, pemilik hotel dan pemilik beberapa stasiun pompa bensin. Dengan demikian konflik Sampit itu telah 'memangkas' lapisan elit dari kelompok etnis Madura. Para pengungsi Madura yang bisa pulang kembali ke Sampit atau Kotawaringin Timur pada umumnya hanya warga masyarakat biasa yang miskin seperti petani, tukang becak dan pedagang kecil. Meskipun bersifat diskriminatif, Perda No. 5 Tahun 2004

sebagai acuan resolusi konflik merupakan terobosan yang relatif berhasil karena setelah Perda tersebut ditetapkan tercatat sekitar 80% dari seluruh populasi warga keturunan Madura yang mengungsi keluar daerah telah pulang kembali dan diterima dengan damai di kampung halamannya di Sampit dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Keberhasilan resolusi konflik di Kotawaringin Timur nampak sangat jelas apabila dibandingkan dengan kasus konflik Sambas, semenjak tahun 1999 sampai saat ini lebih dari seratus ribu orang Madura terusir dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan tidak pernah bisa kembali lagi ke Sambas.

## Daftar Bacaan

- Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2003, *Laporan Kegiatan Temu Budaya di Kalimantan Tengah*. Pontianak: Proyek P2ST Kalimantan Barat.
- Banwell, Anne Mason, 2001, *Konflik Antarsuku Bangsa di Kalimantan Tengah*. Depok: Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Chalmers, Ian, 2006, "The Dynamics of Conversion: the Islamisation of Dayak peoples of Central Kalimantan", makalah yang dipresentasikan dalam *The 16<sup>th</sup> Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA) di Wollongong, 26-29 Juni*.
- Gerry van Klinken, 2005, "Pelaku baru, identitas baru: Kekerasan antar suku pada masa pasca Soeharto di Indonesia", dalam Dewi Fortuna Anwar; Helene Bouvier; Glenn Smith; Roger Tol (Editor), *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Fasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; LIPI; LASEMA\_CNRS; KITLV-Jakarta, halaman 91-116.
- , 2007, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marjanto, Damardjati Kun, 1999, *Eksistensi Agama Kaharingan di Kotawaringin Timur*. Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (laporan penelitian tidak diterbitkan).

Mashad, Dhurorudin, dkk, 2005, *Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik LIPI.

Meyer, Thomas, 2004, *Politik Identitas: Tantangan Terhadap Fundamentalisme Moderen*. Jakarta: Friedrich-Eben-Stiftung dan Pemuda Muhammadiyah.

Petebang, Edi, 2001, "Masyarakat Dayak telah Dituduh dan Dilukai! Peringatan para Uskup Kalimantan yang disampaikan kepada Presiden Gusdur", *Kalimantan Review No.68/Th.X/10 April-10 Mei*.

Purwana, Bambang H. Suta, 2008, *Konflik dan Resolusi Konflik Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah*. Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (laporan penelitian tidak diterbitkan).

Tim Lab-Socio UI, 2004, "Etnik Konflik dan Perdamaian di Kalimantan Tengah" dalam *Ringkasan Laporan Daerah dari Lab-Socio UI, Seminar Nasional Perdamaian dan Pembangunan di Indonesia*. Diselenggarakan oleh Bappenas dan UNDP di Jakarta 30 November 2 Desember.

Usop, K.M.A., 2001, "Membangun Masa Depan Yang Berpengharapan di Kalimantan Tengah: Pengembangan Nilai-nilai Sosial Budaya ", makalah yang dipresentasikan dalam *Kongres Rakyat Kalimantan Tengah Tahun 2001*. Palangkaraya: Panitia Penyelenggara Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 4-7 Juni.

Weber, M, 1971, "Major Features of World Religions", Roland Robertson (editor), *Sociology of Religion: Selected Readings*. Middlesex, England: Penguin Books.

### **Mass Media**

"Kongres Dayak Kalteng Ricuh. Makalah Selo Soemardjan Dicitir", *Banjarmasin Post 6 Juni 2001*.

"Makalah Selo Diskreditkan Etnis Dayak", *Metro Banjar 6 Juni 2001*.

# DISKURSUS CACAH DALAM PENGELOLAAN AGRARIA KERATON YOGYAKARTA ABAD KE 18-19

Ivanovich Agusta \*

## Abstrak

*Ekonomi pasar dan uang sudah dikenal di Jawa pada abad ke 8. Demikian pula produksi pertanian dan artisan telah menghasilkan surplus dan diperdagangkan. Di antara struktur ekonomi horizontal tersebut, diskursus cacah mengarahkan alokasi sumberdaya secara vertikal, dan hal ini mendominasi pola hubungan kemasyarakatan. Dalam definisi awal, cacah merupakan bagian dari rakyat (di luar raja dan priyayi) yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau melalui tenaga kerja. Sebagai gantinya, cacah memiliki kekuasaan atas lahan yang dapat dikelolanya. Diskursus cacah memungkinkan alokasi surplus sumberdaya dari lapisan sosial rendah kepada elite, serta sebaliknya mengembangkan solidaritas cacah dengan elitnya. Anomali dalam diskursus cacah muncul bersamaan dengan terganggunya kesetimbangan alokasi sumberdaya dari lapisan bawah ke lapisan atas dan solidaritas sebaliknya. Praktek negara kolonial Hindia Belanda dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat telah menimbulkan anomali yang panjang. Alih-alih menuju diskursus tanah, dalam proses anomali tersebut berbagai aspek diskursus cacah justru diteruskan atau saling berperang dengan diskursus tanah.*

*Kata kunci: diskursus, tanah, kolonialisme, keraton Yogyakarta, cacah*

## Pendahuluan

Dalam sejarah agraria Indonesia, peralihan dari diskursus cacah menuju diskursus tanah<sup>1</sup> belum terjadi sepenuhnya. Belum terwujud penolakan (*pen-tidak-an*)<sup>2</sup> benar-benar terhadap diskursus cacah yang berusia lebih lama, sebaliknya lebih terlihat berlangsungnya perang antara kedua diskursus tersebut terus menerus.<sup>3</sup>

Peperangan ini tercermin dalam

konflik agraria, seperti konflik-konflik perebutan hak milik atas lahan yang sama di antara petani atau pekerja lahan, dan manajemen perkebunan, industri, atau pemerintah. Konflik terjadi sejak di Kotopanjang (Riau), Sei Lapan, Sugapa (Sumatera Utara), Menggala, Pulo Panggung (Lampung), Jatiwangi, Cimerak, Badega (Jawa barat), Kedung Ombo (Jawa Tengah), Blangguan (Jawa Timur), Bangkalan (Madura), Sumber

\* Penulis adalah Dosen Program Sarjana (S1) di IPB, Bogor dan Dosen Program Pascasarjana (S2), di IPB, Bogor

<sup>1</sup> Konsep *diskursus cacah* dan *diskursus tanah* diusulkan penulis dalam kesempatan ini. Pembahasan kali ini ditekankan kepada *diskursus cacah*.

<sup>2</sup> Dalam sejarah diskursus telah lama dikonsepsikan, bahwa kemunculan diskursus baru sekaligus merupakan penolakan atas diskursus lama, bersifat diskontinu atau revolusioner. Diskursus baru bukan bersifat kumulatif dari diskursus lama. Konsep semacam ini bersumber pada *filsafat tidak* sebagaimana disampaikan oleh Bachelard. Lihat K. Bertens. 2006. *Filsafat Barat Kontemporer: Perancis*. (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 182-189.

<sup>3</sup> Tiadanya peluang kumulasi yang bisa mendamaikan berbagai diskursus, mengakibatkan perang diskursus tidak terhindarkan untuk memutus hubungan diskursus yang satu dari lainnya. Konsep perang diskursus diambil dari Foucault. *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*. Terjemahan La Volonte de Savoir: Histoire de la Sexualite. (Jakarta: YOI, 2008), hal. 120-127.

Klompok (Bali), Gilitrawangan (Lombok), hingga Kei Besar (Maluku). Pihak swasta dan negara menyusun argumen berdasarkan legalitas formal atau tertulis kepemilikan atau penguasaan lahan. Legalitas tersebut berupa kepemilikan atas tanah, atau sewa tanah jangka panjang dari lahan milik negara.<sup>4</sup> Sebaliknya petani dan lembaga swadaya masyarakat pendukungnya mengembangkan argumen berbeda, bahwa mereka telah lama mengolah lahan.<sup>5</sup> Secara faktual merekalah yang selama ini menduduki lahan.

Meskipun kelihatannya berposisi berbeda, sebetulnya argumen kedua pihak yang berkonflik di atas sama-sama berada dalam diskursus tanah. Dalam diskursus ini sebidang lahan memiliki nilai investasi dan dapat dimiliki secara individual. Tidak mengherankan konflik terfokus pada upaya pemilikan tanah tersebut.

Namun kian dicermati semakin terlihat munculnya argumen-argumen yang merujuk pada diskursus cacah. Bukannya tanah, dalam diskursus cacah tersebut penduduk yang berwenang membayar pajak tanah itulah yang diperhitungkan. Mereka disebut cacah, dan kewenangannya diindikasikan

dengan hak untuk mengolah tanah. Inilah sebagian susunan diskursus cacah yang masuk ke dalam argumen petani di atas.

Kasus-kasus perebutan hak milik melalui hak penguasaan sumberdaya agraria di atas dapat diperluas hingga kasus-kasus perebutan lahan perdagangan *kaki lima* di perkotaan, *perumahan kumuh*, upaya pemindahan pembudidaya karamba di waduk-waduk besar, dan sebagainya. Peperangan antara diskursus cacah dan diskursus tanah dalam arti yang diperluas<sup>6</sup> dapat pula menjelaskan perubahan pola penguasaan lahan komunal menjadi pemilikan lahan pribadi, sebagaimana muncul di Lampung dan Sumatera Barat. Pembahasan tulisan ini juga berguna untuk mengantisipasi otonomi desa yang diikuti penguatan kelembagaan lokal dalam penguasaan lahan.

Sayangnya diskursus cacah masih jarang didiskusikan secara mendalam.<sup>7</sup> Sebagian pengamat juga salah paham ketika menganalisis diskursus cacah terutama dari sudut pandang adaptasi feodalisme sebagaimana muncul di Eropa pada abad pertengahan.<sup>8</sup> Konteks lokal juga sempat salah dipahami sebagai komunalisme tradisional yang belum mengenal pasar dan ekonomi

---

<sup>4</sup> Hal ini tersaji dalam studi konflik agraria, antara lain dituliskan Noer Fauzi. "Modal, Kekuasaan dan Hukum Agraria", dalam Benny K. Harman, et al., eds. *Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah*. (Jakarta: YLBHI, 1995), hal. 37-40.

<sup>5</sup> Argumen penggarap lahan antara lain tersaji dalam tulisan Gatot Ryanto. "Kasus Gunung Badega-Garut". dalam Benny K. Harman, et al., eds. *Ibid.* hal. 139-148.

<sup>6</sup> Cacah merupakan kata kunci dari kerajaan Jawa di Yogyakarta dan Surakarta. Dalam pengertian yang lebih luas, diskursus cacah dalam agrarian mungkin dapat menjelaskan pola penguasaan lahan tradisional pada suku bangsa lain yang membedakan status patron, penguasa lahan, dan masyarakat biasa.

<sup>7</sup> Sebagai contoh, Mochammad Tauchid hanya menuliskan 5 halaman dari keseluruhan 176 halaman teks. Noer Fauzi hanya mencatatkan 3 halaman dari keseluruhan 287 teks buku. Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni hanya melaporkan 5 halaman dari keseluruhan 205 halaman teks. Lihat Noer Fauzi. *Petani & Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 35-37; Endang Suhendar, Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. (Bandung: Akatiga, 1998), hal. 43-48; Mochammad Tauchid. 1952. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Pertama*. (Jakarta: Tjakrawala, 1952), hal. 16-20.

<sup>8</sup> Mochammad Tauchid dan Noer Fauzi langsung memandang diskursus cacah sebagai adaptasi feodalisme Eropa, dan sepenuhnya memperbudak petani dan lapisan bawah pedesaan. Pandangan tersebut sulit diterima saat memperhatikan durasi dan masa keemasan kerajaan-kerajaan di Indonesia, di mana kemakmuran rakyat turut dilaporkan pada masanya. Lihat Noer Fauzi. *Ibid.*, hal 15-17; Mochammad Tauchid. *Ibid.*, hal. 16-20. Laporan dari Cina kemakmuran kerajaan-kerajaan dan rakyat di Jawa sejak abad ke 6 disajikan dalam W.P. Groeneveldt. *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. (Jakarta: Bambu, 2009), hal. 9-79.

uang.<sup>9</sup>

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, terlihat bahwa diskursus cacah perlu dipahami secara mendalam, apalagi aspek-aspek diskursus cacah masih berlangsung hingga masa kini. Alasan lainnya ialah, untuk mengurangi kesalahpahaman atas diskursus cacah beserta kekuatannya dalam mengelola berbagai pola ekonomi dan pemerintahan di Indonesia.

Pemahaman terhadap diskursus cacah barangkali dapat digunakan untuk menjelaskan sebagian fenomena-fenomena agraria pada masa kini, terutama pada pola pengelolaan sumberdaya agraria yang dikelola sebagaimana cacah. Pengambilan pelajaran atas diskursus cacah mungkin juga berguna untuk merumuskan resolusi konflik agraria yang didasarkan pada argumen-argumen cacah seperti disampaikan pada awal tulisan.

### **Teori Kelahiran dan Pelembagaan Diskursus**

Penulisan agraria dari sudut pandang sejarah sudah merupakan kritik terhadap historisisme konservatif,<sup>10</sup> yang sebelumnya secara mapan lebih menengahkan sejarah tokoh negara, politik, atau militer. Dalam sejarah agraria, sebaliknya, justru diketengahkan peran petani di pedesaan, dan penulisannya berpihak kepada lapisan terbawah di pedesaan.

Namun genre penulisan sejarah agraria tersebut masih dapat terjebak dan

masuk kembali ke dalam historisisme konservatif, ketika metode penulisannya tetap dibatasi pada bahan-bahan tertulis dan formal, yang biasanya disusun oleh lapisan atas, bahkan oleh mantan penjajah.<sup>11</sup> Dalam historisisme lama tersebut, kebenaran positif berupa fakta-fakta sejarah hanya muncul dari aspek-aspek yang bisa diraba (benda-benda arkeologis) dan dibaca (surat, barang cetakan). Di sinipun disusun perbedaan antara tulisan fiksi (misalnya babad, syair, tembang) yang dipisahkan dari fakta sejarah berbentuk laporan-laporan pejabat dan statistika. Jalur formalisme membuat metode positivisme tersebut mengesampingkan peran lapisan bawah yang tidak menciptakan bahan-bahan tertulis, bahkan di pedesaan dapat disimpulkan hanya terdapat masyarakat tanpa sejarah.<sup>12</sup>

Menyadari kelemahan positivisme, diperlukan alternatif metode dekonstruktif yang mampu membalik beberapa bagian dari pemahaman lama.<sup>13</sup> Perubahan tersebut mencakup upaya untuk menengahkan suara dari lapisan terbawah (bukan hanya sejarah elit), menengahkan kondisi kehidupan sehari-hari terutama di pedesaan (tidak sekedar peristiwa politik dan militer besar), dan perluasan bahan sejarah yang mencakup sumber lisan dan sastra (bukan hanya bahan tertulis yang resmi).

Metode dekonstruksi dapat dijalankan dalam teori diskursus. Yang dimaksud dan digunakan di sini ialah

<sup>9</sup> Rangkuman pendapat ini tercatat oleh Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni. *Op.cit.*, hal. 43-44. Sebagai perbandingan tentang dikenalnya pasar dan uang di Jawa, lihat W.P. Groeneveldt. *Ibid.*; I Ketut Riana. *Kakawin Desa Warnana uthawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit*. (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 91 dan 398; Titi Surti Nastiti. 2003. *Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hal. 48-50.

<sup>10</sup> Pandangan demikian antara lain disampaikan oleh Bambang Purwanto. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hal. 21-23.

<sup>11</sup> Kritik terhadap historisisme lama yang bersifat kolonial, sekaligus kritik terhadap historisisme nasional disampaikan antara lain oleh Bambang Purwanto. *Ibid.*, hal. 69-87.

<sup>12</sup> Kritik awal perihal dikesampingkannya petani dari sejarah masyarakat disampaikan oleh Eric Wolf. *Europe and the People without History*. (Los Angeles/Berkeley: Univ. of California Pr, 1982).

<sup>13</sup> Bambang Purwanto. *Op.cit.*, hal. 2-10.

teori diskursus sebagaimana dikembangkan oleh Foucault, atau biasa pula disebut sebagai aliran pascastrukturalisme,<sup>14</sup> dan di tempat lain dinyatakan sebagai pascamodernisme.<sup>15</sup> Diskursus merujuk pernyataan-pernyataan yang memungkinkan munculnya tata cara merefleksi kehidupan dan lingkungan sekitar, tata cara interaksi sosial, hingga pemilihan maupun penyusunan benda-benda fisik. Teori diskursus Foucauldian menghargai hal-hal yang dipandang irasional, dan irasionalitas diposisikan secara setara dengan pandangan rasional.<sup>16</sup> Keduanya sama-sama hasil refleksi masyarakat terhadap kehidupan di sekitarnya, memiliki aturan tersendiri di dalamnya, dan sama-sama dipandang benar oleh pengikutnya. Posisi demikian berlawanan dari teori diskursus sebagaimana dikembangkan oleh Habermas, di mana rasionalitas tetap mendasari refleksi dan tingkah laku seseorang (sehingga menghasilkan sistematika logis antar pernyataan), sambil menjauhi hal-hal yang dipandang irasional (yang dipandang mustahil menyusun logika sistematis).<sup>17</sup> Irasionalitas tidak hanya berkaitan dengan mistik, namun juga mencakup hal-hal yang dipandang fiksius<sup>18</sup> (babad, cerita, novel, tembang). Irasionalitas juga melekat pada pihak yang selama ini dipandang memiliki pemikiran dan tingkah laku irasional, seperti orang gila,

orang-orang aneh, lapisan terbawah dan golongan masyarakat yang tersingkirkan. Melalui rumusan pemikiran inilah teori diskursus sebagaimana dikemukakan Foucault mampu mengetengahkan lapisan terbawah dan kelompok marjinal, dan mengedepankan pandangan mereka sendiri (bukan pandangan pihak luar, seperti golongan kiri yang memandangnya sebagai kelas tertindas, maupun golongan kanan yang menyalahkan kemalasan atau ketidakmampuan mereka). Melalui pemahaman diskursus dari Foucault tersebut, sebagai contoh, dapat dipahami peran penting keanehan dan orang-orang aneh bagi masyarakat yang diteliti, misalnya dalam pembentukan pejabat tertentu di Keraton Yogyakarta Hadiningrat.

### *Bab 7*

#### *Bupati Nayaka Jawi Tengen*

*Abdi-Dalem Nayaka Sewu, Kyai Tumenggung Anggawangsa, Nayaka Numbak Anyar, Kyai Tumenggung Cakrajaya, kawajibanipun angladosi bahu suku ing sadinten-dinten, nyambut karya ing praja utawi manawi wonten karsa-Dalem angupados tiyang ingkang sae warninipun estri palara-lara, mundhut tiyang aneh, palawija, tiyang teguh timbul, anglebeti panggenan ingkang*

---

<sup>14</sup> Pemikiran Foucault digolongkan dalam pascastrukturalisme oleh Madan Sarup. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hal. xv-xx.

<sup>15</sup> Pemikiran yang sama oleh Foucault digolongkan dalam pascamodernisme oleh Steven Best dan Douglas Kellner. *Teori Posmodern, Interogasi Kritis*. (Yogyakarta: Boyan, 2003), hal. 27-30.

<sup>16</sup> Michel Foucault. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault*. Terjemahan dari P Rabinow, ed. *Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984*. (Yogyakarta: Jalasutra), hal. 103-115

<sup>17</sup> Tepatnya ialah rasionalitas praktis, untuk membedakannya dari rasionalitas instrumental. Kedua konsep tersebut berkaitan dengan karya-karya Immanuel Kant tentang kritik terhadap rasionalitas instrumental dan kritik terhadap rasionalitas praktis. Lihat Jurgen Habermas. 1996. *Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. (Cambridge: The MIT Pr., 1996), hal. 9-17.

<sup>18</sup> Konsep fiksius (yang bersifat naratif atau hermeneutis) digunakan untuk membedakannya dari konsep fiktif (tidak nyata, halusinasi). Pembedaan ini disampaikan oleh Aart van Zoest. 1991. *Fiksi dan Nonfiksi dalam Kajian Semiotik*. (Jakarta: Intermedia, 1991), hal. 39-43.

*angel, wana ingkang peteng, minggah ardi ingkang inggil anawaraken barang ingkang angker, malebet kedhung ingkang lebet, sawarni papundhutan ing wana, ing ardi, ing lepen, ing saganten, manawi wonten pekeweding praja lumampah rumiyin, anglampahi agami sarak sarengating rasul.*

## Terjemahan

### Bab 7

Bupati Nayaka Jawi Tengen

Abdi-Dalem Nayaka Sewu yang bernama Kyai Tumenggung Anggawangsa, Nayaka Numbak Anyar yang bernama Kyai Tumenggung Cakrajaya, tugasnya menyediakan bau-suku (pekerja kasar) sehari-hari, bekerja di kerajaan atau apabila raja ingin mencari perempuan cantik untuk dijadikan *palara-lara*. Mencari orang aneh, *palawija* (Abdi-Dalem *kelangenan raja* yang mempunyai kelainan fisik), orang yang sangat sakti, memasuki tempat-tempat yang sulit, hutan yang gelap, mendaki gunung yang tinggi, menghilangkan segala hal yang menakutkan, masuk ke dalam pusaran air yang dalam, segala macam hasil hutan, di gunung, di sungai, di lautan, bertindak terlebih dahulu apabila ada kesulitan yang menimpa kerajaan, serta menjalankan agama dan perintah

rasul.

(Kutipan naskah nomor 4 tentang tugas pejabat kerajaan di daerah pesisir, yang dikeluarkan oleh Susuhunan Pakubuwana II pada tahun 1726 M).<sup>19</sup>

Dalam memahami pemikiran Foucault, kelompok konstruktivis memandang diskursus memenuhi seluruh realitas kehidupan.<sup>20</sup> Realitas yang ada semata-mata hasil bentukan subyektif manusia. Tidak ada ruang yang tersisa di luar diskursus. Pandangan tersebut, sayangnya, berlawanan dari posisi Foucault yang tetap memberikan tempat bagi tindakan sosial dan susunan benda-benda fisik di luar diskursus.<sup>21</sup> Adapun diskursus sendiri berada pada tataran refleksi. Dalam konstelasi pemikiran demikian, dapat digali hubungan antara diskursus (refleksi) dengan susunan lembaga sosial (sewa tanah, pemilikan tanah) serta susunan benda-benda (termasuk tanah).

Dipengaruhi oleh pandangan Marx tentang kelas sosial, diskursus oleh golongan marxis turut dibedakan menurut yang diciptakan oleh kelas atas atau diskursus oleh kelas bawah.<sup>22</sup> Dualisme kelas tersebut muncul di atas asumsi bahwa hubungan kekuasaan terjalin di antara pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai. Berbeda dengan pemahaman tersebut, Foucault menganut konsep kekuasaan sebagai aspek yang menetap dalam tindakan manusia.<sup>23</sup> Setiap penciptaan maupun

<sup>19</sup> S. Margana. 2004. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 12 dan 466-467.

<sup>20</sup> Pandangan ini dikemukakan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis, Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru*. (Yogyakarta: Resist, 2008), hal. 155-162.

<sup>21</sup> Michel Foucault. 2002. *Menggugat Sejarah Ide*. Terjemahan *The Archaeology of Knowledge* oleh I.R. Muzir. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), hal. 230-235.

<sup>22</sup> Lihat Perry Anderson. *Asal-Usul Postmodernitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 227-249.

pelembagaan diskursus sekaligus menggunakan kekuasaan. Dalam definisi yang lebih mutakhir ini, kekuasaan tidak selalu menindas pihak lain, namun juga mampu mengembangkan solidaritas antar manusia.<sup>24</sup> Konsekuensi demikian sejajar dengan pola-pola sosial yang terbagi atas konflik (konsekuensi kekuasaan yang menindas) dan kerjasama (konsekuensi kekuasaan untuk meningkatkan solidaritas). Kelas sosial tidak sepenuhnya relevan, karena solidaritas dalam satu diskursus dapat berlangsung melintasi kelas-kelas sosial. Dalam pandangan semacam ini, solidaritas raja dan priyayi sebagai kelas atas, dengan petani sebagai kelas bawah atau buruh tani sebagai proletar, dapat terjalin karena berada dalam diskursus atau pemikiran yang sama. Hal ini terlihat dari aturan penarikan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan warga desa, agar keraton terhindar dari eksploitasi terhadap warganya.

Untuk menjelaskan kemunculan diskursus bagi pembaca di Indonesia, mungkin lebih mudah memulai dari proses munculnya paradigma ilmiah baru.<sup>25</sup> Pemikiran Thomas S. Kuhn ini lebih dahulu populer, padahal ia mendapatkan idenya dari pemikiran filosofis di Perancis.<sup>26</sup> Kuhn mengembangkan konsep ilmu normal untuk menunjukkan pengetahuan yang dipandang benar dan diajarkan secara

turun temurun. Ada kalanya muncul kondisi yang berbeda dari teori, dan disebutnya sebagai anomali. Untuk meresponsnya, teori mengembangkan diri, menambah konsep dan instrumen baru. Jika melalui pengembangan teori tersebut ternyata anomali dapat diterangkan, maka batas teori ilmiah semakin luas. Di sinilah akumulasi ilmiah terjadi. Suatu ketika terdapat anomali yang tidak bisa dijelaskan melalui teori-teori yang ada. Dengan makin banyaknya jenis anomali yang tidak diterangkan, maka teori tersebut mencapai krisis. Jika krisis ilmiah tersebut tidak bisa ditangani, maka dibutuhkan teori baru yang mampu menjelaskan jenis-jenis anomali tersebut. Pada saat inilah paradigma ilmiah baru lahir.

Sejajar dengan tahapan paradigma ilmiah Kuhnian, diskursus normal muncul dalam tahapan ilmu normal.<sup>27</sup> Tahapan berikutnya berupa anomali. Jika anomali bisa diterangkan melalui diskursus lama, maka kian kuatlah diskursus tersebut. Akan tetapi anomali yang tidak bisa dijelaskan membawa diskursus pada retakan epistemologis (atau tahapan krisis menurut Kuhn). Suatu diskursus baru dapat dilahirkan, sehingga anomali dapat dijelaskan kembali.

Mungkin lebih mudah menggambarkan kelahiran diskursus sebagaimana suatu konteks atau

---

<sup>23</sup> Konsep kekuasaan tersebut diperoleh dari Nietzsche. Khusus untuk penganut bahasa Indonesia, ada baiknya menerjemahkan *power* sebagai kekuatan, tidak langsung sebagai kekuasaan. Penerjemahan ini lebih tepat untuk memahami filsafat *kekuasaan* yang dikembangkan oleh Nietzsche. Menurut Nietzsche, makhluk hidup hanya bisa bergerak dan melakukan sesuatu karena mereka memiliki kekuatan. Konsekuensinya, semua pemikiran dan tindakan manusia selalu mengandung kekuatan (*power*), atau secara salah kaprah diterjemahkan bahwa kekuasaan. Lihat Friedrich Nietzsche. 2002. *Beyond Good and Evil: Prelude Menuju Filsafat Masa Depan*. Terjemahan oleh B.H. Winarno. (Yogyakarta: Ikon, 2002), hal. 22-30.

<sup>24</sup> Michel Foucault. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan. (Yogyakarta: Bentang, 2002), hal. 119-135.

<sup>25</sup> Thomas S. Kuhn. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Terjemahan The Structure of Scientific Revolution oleh Tjun Surjaman. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

<sup>26</sup> Pengaruh dari Alexander Koyre. Lihat Kuhn. *Ibid.*, hal. vii-viii.

<sup>27</sup> Michel Foucault. *Menggugat Sejarah Ide*. Terjemahan The Archaeology of Knowledge oleh I.R. Muzir. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002).

panggung, dimana tindakan sosial dan susunan benda dapat diterima dalam suatu keserasian. Diskursus memiliki sifat membuka jalan bagi kemunculan suatu tindakan sosial baru, maupun penyusunan atau alokasi benda-benda secara baru pula.<sup>28</sup>

Diskursus memiliki kekuatan yang dahsyat (atau dikonsepsikan sebagai *revolusi* oleh Kuhn). Untuk mengelola kekuatan diskursus, masyarakat biasanya mengembangkan lembaga. Dalam suatu lembaga telah disediakan lokus atau konteks diskursus, sehingga diskursus dapat dikelola.<sup>29</sup> Lembaga sosial mendisiplinkan tingkah laku anggotanya, sehingga diskursus, tindakan sosial dan susunan benda-benda dapat diperkirakan.

Pengelolaan dalam lembaga sosial meliputi aturan penyisihan untuk mengontrol diskursus secara eksterior, yaitu berupa, *pertama*, aturan pengecualian (*exclusion*), yang berisi larangan (*prohibition*). *Kedua*, aturan pembagian (*division*) dan penolakan (*rejection*). *Ketiga*, oposisi salah dan benar. Selanjutnya aturan internal diskursus mempertanyakan kontrol yang dilakukannya sendiri. *Pertama*, ini berhubungan dengan prinsip klasifikasi penataan dan distribusi. *Kedua*, perlu diperhatikan komentar karena memainkan dua peranan, yaitu menciptakan diskursus baru, dan sebaliknya dengan mengatakan hal-hal biasa tanpa munculnya pernyataan baru. *Ketiga*, aspek pengarang (*author*), bukan sebagai subyek, melainkan sebagai kesatuan prinsip dalam satu kelompok tulisan atau pernyataan-pernyataan

tertentu, sebagai kedudukan bagi keterpaduan mereka. *Keempat*, keberadaan disiplin (bukan sains), yang dibentuk oleh kelompok obyek, metode, sekelompok proposisi yang diandaikan benar, aneka ragam aturan dan definisi, teknik dan peralatan sehingga membentuk tata aturan yang anonim. Akhirnya disusun aturan pengelolaan kekuasaan dalam diskursus, meliputi, *pertama*, ritual. *Kedua*, persahabatan diskursus (*fellowship of discourse*). *Ketiga*, kelompok doktrinal. *Keempat*, penyisihan sosial (*social exclusion*).

### Diskursus Cacah di antara Ekonomi Barter dan Pasar

Terpengaruh oleh pandangan evolusi dan modernisasi, diskursus cacah sering keliru ditempatkan pada posisi lebih sederhana, karena muncul terlebih dahulu daripada diskursus tanah.<sup>30</sup> Untuk menguatkan pandangan evolutif tersebut, diciptakan kontinuitas di antara hak penguasaan lahan komunal dan hak milik pribadi, ekonomi tradisional dan ekonomi modern, birokrasi tradisional dan birokrasi modern.

Pandangan evolutif tersebut sulit diterima. Barangkali perdagangan dengan wilayah Barat Pulau Jawa serta wilayah lain di luar Jawa masih dilaksanakan dengan barter. Akan tetapi setidaknya pada abad ke 8 telah tercipta pasar yang teratur di Mataram Hindu.<sup>31</sup> Pasar-pasar di desa-desa yang berdekatan memiliki periode buka tertentu (*hari pasaran*). Beragam dagangan disajikan dalam bangunan pasar atau langsung di tanah, berupa

<sup>28</sup> Michel Foucault. *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*. (Jakarta: YOI, 2008), hal. 120-127.

<sup>29</sup> Michel Foucault. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan. (Yogyakarta: Benteng, 2002)

<sup>30</sup> Lihat penjelasan Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni. *Petani dan Konflik Agraria*, (Bandung: Akatiga, 1998), hal. 43-44.

<sup>31</sup> Titi Surti Nastiti. *Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hal. 52-101

beras, sayuran, unggas dan ternak besar, kain, pisau, dan sebagainya. Pasar juga disemarakkan oleh seniman-seniman pengamen, hingga tarian raja pada pasar besar.<sup>32</sup>

Uang sudah digunakan sebagai alat pertukaran barang. Pada masa Kerajaan Majapahit abad ke 14-15, telah tersedia mata uang dari berbagai negara.<sup>33</sup> Keberadaan berbagai mata uang juga muncul dalam Kerajaan Mataram.<sup>34</sup> Keragaman mata uang tersebut memungkinkan perdagangan internasional, terutama di pantai, meskipun juga dilaksanakan di pedalaman.

Berbeda dari pandangan umum tentang terencilnya Kerajaan Mataram Islam dari pesisir, kenyataannya telah diangkat pejabat khusus pada pantai-pantai Utara Jawa untuk memperoleh dagangan dari negara lain. Hubungan antara raja di hulu sungai dengan abdi-dalem di muara sungai berlangsung secara tetap. Adapun jalur transportasi menuju pelabuhan tetap berlangsung melalui sungai atau bengawan serta jalan darat.

### Bab 13

*Para bupati adipati pasisir, ingkang sami gadhah muara, anjageni anadhahi pakeweding tanah Jawi, utawi sabarang pundhutan-Dalem, kalangenan, sabarang ingkang sanes wedalipun tanah Jawi, wastra, busana, tosan, tembagi, timah, salaka, jene, sosoty, dadamel, kajeng, sabarang ing karsa-Dalem.*

Terjemahan:

### Bab 13

Para Adipati Bupati Pasisir yang mempunyai muara sungai, bertugas menjaga dan mengatasi segala kesulitan di tanah Jawa, atau memenuhi segala permintaan dan kesenangan raja, yang bukan merupakan hasil tanah Jawa, seperti kain, perhiasan, besi, tembaga, timah, perak, kuningan, intan, senjata, kayu, dan sebagainya.

(Kutipan naskah nomor 4 berupa deskripsi tugas dan kewajiban pejabat kerajaan dan pejabat pesisir, dikeluarkan oleh Susuhunan Pakubuwana II tahun Saka 1655 (1726 M).<sup>35</sup>)

Dapat dinyatakan bahwa ekonomi barter dan pertukaran melalui pasar dan uang menghubungkan pihak-pihak yang berinteraksi dalam suatu posisi-posisi setara, seperti antar pedagang. Berbeda dari hal itu, diskursus cacah lebih mengatur pola alokasi sumberdaya dari lapisan bawah kepada raja, dan sebaliknya mewujudkan solidaritas pada arah sebaliknya kepada rakyat. Dengan demikian diskursus cacah lebih berkaitan dengan pola hubungan sosial vertikal, di mana cacah menyampaikan pajak kepada penguasa. Selanjutnya raja dapat memutuskan jumlah *lungguh* (tanah berikut cacah) yang boleh dikelola oleh priyayi, sesuai dengan jenis tugas mereka. Dalam kerajaan Mataram Islam, posisi di bawah raja ialah priyayi. Di luar kedua status tersebut diposisikan sebagai rakyat kecil, di mana cacah

---

<sup>32</sup> Raja Hayam Wuruk sering mempersembahkan tarian topeng dalam perayaan. I Ketut Riana. *Kakawin Desa Warnana uthawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit*. (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 434-439. Lihat juga pengamen pada masa yang lebih kuno dalam Titi Surti Nastiti. *Ibid.*, hal. 116-122.

<sup>33</sup> W.P. Groeneveldt. *Nusantara Dalam Catatan Tionghoa*. (Jakarta: Bambu, 2009), hal. 77-78.

<sup>34</sup> Thomas Stamford Raffles. *The History of Java*. (Yogyakarta: Narasi, 2008), hal. 902.

<sup>35</sup> S. Margana. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769 1874*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 10 dan 458.

termasuk di dalamnya.

Sebagai suatu diskursus yang menjadi refleksi pemikiran dominan pada masyarakat, diskursus cacah menciptakan pola khusus bagi perkembangan ekonomi pasar di atas. Dipengaruhi oleh pola hubungan vertikal, maka perdagangan pasar diatur menurut jumlah barang yang diperdagangkan. Setelah melewati batasan tertentu, kelebihan barang dagangan dipajaki.<sup>36</sup> Pengaturan yang didominasi oleh penguasa atau bandar (wakil raja di pelabuhan, tol, dan pasar)<sup>37</sup> semacam ini membuka jalan bagi munculnya monopoli perdagangan, di mana pasar dan perdagangan bisa diatur oleh kedua pejabat tersebut.

Meskipun tidak terdapat hak milik atas lahan dan penduduk yang mendiaminya (yaitu cacah), namun lurah (penguasa) atas cacah tersebut dapat menyewakannya kepada pihak lain, baik sesama bekel, orang Cina, maupun orang Barat. Dengan mengadaptasi nilai cacah untuk pelabuhan dan gerbang tol antar daerah, maka kedua bidang ini juga dapat disewakan oleh penguasa kepada pihak lain. Penyewa dapat mengelola cacah untuk mengolah lahan. Surplus diperoleh penyewa setelah dipotong kebutuhan cacah dan pembayaran sewa kepada priyayi.

### **Batas-batas Diskursus Cacah**

Telah disampaikan bahwa dalam pembahasan diskursus, maka kemunculannya sangat penting dianalisis. Penerimaan diskursus baru secara revolusioner mengubah cara pandang, pola hubungan sosial, hingga

penyusunan barang-barang fisik. Sayang penelusuran terhadap diskursus cacah belum sampai pada batas kemunculannya.<sup>38</sup> Yang jelas, diskursus ini telah membentuk Kerajaan Mataram Hindu pada abad ke 8.

Meskipun saat kemunculannya belum bisa dianalisis, namun batas-batas diskursus cacah masih bisa dilakukan. Diskursus ini membuka peluang alokasi surplus sumberdaya secara vertikal dari lapisan bawah kepada lapisan atas, dan sebaliknya penyebaran sumberdaya untuk kesejahteraan umum. Di sini cacah merujuk kepada pengikut sebenarnya, bukan pengikut potensial (populasi penduduk kerajaan) melainkan pengikut efektif.

Ketika menciptakan pola alokasi sumberdaya secara vertikal, diskursus cacah memungkinkan pembentukan suatu negara, antara lain dalam bentuk kerajaan. Alokasi surplus sumberdaya ke atas memungkinkan tumbuhnya elite. Adapun alokasi vertikal ke bawah memungkinkan penyebaran sumberdaya, antara lain untuk menguatkan solidaritas antara penguasa dan massa.

Pola alokasi sumberdaya secara vertikal memungkinkan pembentukan hipotesis, bahwa diskursus cacah muncul persis sebelum kemunculan kerajaan di Indonesia. Pada saat ini kerajaan tertua ialah Tarumanegara di Kalimantan pada abad ke 4. Diskursus cacah dijaga antara lain dengan menjaga kesetimbangan pola alokasi sumberdaya vertikal ke atas dan ke bawah, sehingga durasi atau kejayaan suatu negara mengindikasikan situasi normal bagi

<sup>36</sup> Titi Surti Nastiti. *Ibid.*, hal. 41-48.

<sup>37</sup> Peter Carey. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. (Jakarta: Bambu, 2008)

<sup>38</sup> Dalam pengertian yang luas yang melingkupi konsep *jung*, *cacah*, *karya*, *bahu*, dan pola hitungan lain atas pajak terhadap tanah, diskursus cacah sudah ada pada masa Mataram Hindu abad ke Hindu abad ke 8. Namun penggunaan kata *cacah* secara umum mungkin baru dikembangkan setelah Perjanjian Giyanti yang memecah Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755.

diskursus cacah. Perihal kontrol atas situasi normal ini disajikan di bawah.

Kewajiban-kewajiban cacah di antaranya kerja dalam periode tertentu kepada priyayi yang menjadi patron (*bau-suku*), juga membagi hasil pertanian di atas tanah *lungguh* priyayi tersebut (*maro*). *Lungguh* merupakan tanah yang diberikan raja kepada priyayi sebagai sumber pendapatannya dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Cacah tertentu perlu menyediakan perkakas, kayu, daun, beras, hingga perempuan.

Dalam ilmu pengetahuan kontemporer, penghitungan atau statistika digunakan untuk menentukan jumlah sesuatu secara eksak.<sup>39</sup> Ketika dipraktekkan terhadap cacah, pengamat berharap dapat menentukan nilai cacah secara eksak, baik berupa jumlah penduduk maupun jumlah rumahtangga. Untuk mengecek hasil penghitungan, diperbandingkan juga antar satuan, seperti nilai cacah dibandingkan *jung*, *karya*, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Akan tetapi cacah bukan perhitungan eksak, melainkan bersifat fiksius. Penghitungan cacah sebagai satuan yang tetap tidak mungkin dilakukan, karena cacah merujuk pada nilai pengikut setia penguasa. Kumpulan cacah bukan sekedar jumlah populasi, melainkan dihitung menurut kemampuan kelompok dalam menghidupi dirinya sendiri sekaligus memiliki surplus untuk pejabat.

Tidak selalu satu cacah merupakan, contohnya, 2-3 keluarga, melainkan tergantung kepada pajak (jumlah *maro* dan *bau-suku*) yang perlu diberikan

kepada pejabat. Untuk mendapatkan nilai pajak yang serupa, maka dimungkinkan jumlah cacah mengecil pada wilayah yang tandus, sekalipun penduduk yang mendiami wilayah tersebut berjumlah sama. Penurunan nilai cacah juga berlaku pada wilayah yang dilanda peperangan, sehingga penduduknya perlu mencukupi kebutuhan diri mereka dahulu.<sup>41</sup>

Aspek fiksius dalam angka-angka cacah muncul dari kebijaksanaan penguasa. Ketika raja menetapkan cacah sedikit, maka rakyat memiliki peluang lebih besar untuk mengakumulasi kekayaan. Dengan memperhitungkan sekaligus kemandirian dan surplus komunitas, maka penghitungan jumlah cacah sekaligus menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat. Daerah pasca perang mengalami penurunan jumlah cacah yang dihitung. Hal ini bukan berkaitan dengan penurunan jumlah penduduk karena meninggal dalam peperangan, melainkan untuk memberikan kesempatan penduduk dalam menghasilkan surplus bagi raja.

Sebagai perbandingan, jumlah penduduk secara eksak, baik kelahiran, kematian dan migrasi dicatat tersendiri oleh pejabat kerajaan. Laporan dari bekel dan kepala distrik (dua pejabat yang ditugaskan) inilah yang seharusnya dicari untuk mendapatkan jumlah dan dinamika penduduk secara eksak. Jumlah penduduk secara eksak ini bukanlah cacah. Cacah merupakan bagian dari penduduk tersebut yang memiliki nilai kewajiban untuk membayar pajak.

---

<sup>39</sup> Michel Foucault. *Order of Thing: Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*. Terjemahan The Order of Thing: An Archaeology of Human Sciences oleh B. Priambodo, P. Boy. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.82-87.

<sup>40</sup> Upaya pencarian nilai cacah secara eksak antara lain dilakukan oleh Peter Boomgard. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 354-366.

<sup>41</sup> Onghokham. "Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah" dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, eds. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 3-12.

## Penataan Diskursus Cacah

Konsep agraria dalam diskursus cacah selalu dikaitkan dengan sejumlah penduduk di atasnya. Tanah (dan dengan sendirinya cacah) sendiri dipandang dimiliki oleh raja. Penguasaan atas suatu wilayah berikut penduduk yang hidup di dalamnya dapat diberikan raja kepada priyayi sebagai *lungguh* atau semacam upah kerjanya. Priyayi dapat mempergunakan cacah untuk bekerja baginya sementara waktu. Priyayi juga memperoleh sebagian hasil pertanian di tanah *lungguhnya*.

### Bab 3

*Para priyayi wenang angerehake gawene bekel lan wong cilik, kang dadhi lungguhe mau kaya dhudhuk lumpur, kesrek cecek, tuk tunguk, pondhong pikul karepe priyayi dhewe, utawa priyayi mau nglakoni gawene negara...*

### Bab 5

*Para priyayi wenang mundhut pawulu-wetune bumi gadhhuhane lungguhe mau kaparokake, iyo para bekel ora kena mopo, tamtu nyumanggakna ing blabage, ananging para priyayi wajib ambayara alifapa ing lumrahe desa kono ...*

Terjemahan:

### Bab 3

Para priyayi berwenang menggunakan tenaga *bekel* dan rakyat kecil yang menjadi bawahannya, seperti untuk pekerjaan *dhudhuk lumpur, kesrek cecek, tuk tunguk, pondhong pikul* yang sudah jelas merupakan kewajiban priyayi sendiri atau

priyayi tadi melaksanakan tugas kerajaan...

### Bab 5

Para priyayi berhak mengambil hasil bumi dari tanah *lungguhnya* dengan cara *maro* atau mengambil pajak terserah sesuai yang disenangi, jika sawah tadi dibagi, para *bekel* harus menurut, dan harus menyerahkan kepadanya *blabagnya*. Akan tetapi para priyayi wajib membayar *alip* sesuai adat yang berlaku di desa tersebut...

(Kutipan dokumen 14.a berupa peraturan priyayi yang mendapatkan *lungguh* (patuh), biasa dikenal sebagai Pranatan Patuh. Peraturan dikeluarkan Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1862).<sup>42</sup>

Besaran cacah dalam suatu *lungguh* disesuaikan dengan kemampuan untuk menghidupi diri sendiri serta kemungkinan surplus usaha yang diupayakan. Pola semacam ini juga berlaku saat penyewaan cacah dilakukan. Dua larangan yang selalu terdapat dalam surat perjanjian ialah larangan menarik pajak melebihi kemampuan cacah, dan larangan membudidayakan tanaman lain yang mengganggu pola penanaman padi.

Hanya seseorang yang berpredikat cacah saja yang diperbolehkan untuk mengerjakan petak-petak lahan. Untuk memenuhi pajak yang telah ditetapkan, seorang cacah dapat mempekerjakan keluarganya dalam petak tersebut. Dalam kesempatan lain cacah juga dapat diambil dari orang lain sedesa. Anggota keluarganya dan orang lain tersebut tidak memiliki hak pengelolaan lahan, sekaligus mereka tidak memiliki

<sup>42</sup> S. Margana. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.68-69 dan 503-504.

kewajiban membayar pajak atau kewajiban militer. Dalam kerjasama pengolahan lahan, para pekerja mendapatkan pembagian hasil panen. Dengan melihat cara kerja secara bersama-sama tersebut, tidak mengherankan konsep kerja (*nyambut damel*) di pedesaan Jawa memiliki kemiripan dengan pesta (*gadhah damel*) di mana kebersamaan sangat penting.

Hubungan antara cacah dengan priyayi yang menjadi lurah *patuh* (patron) sering dipandang sebagai indikasi feodalisme di Jawa. Memang hubungan tersebut terlihat kuat karena tidak bisa dibatalkan atau diubah oleh kepala distrik hingga *bekel*, sehingga seakan menguatkan feodalisme. Akan tetapi hubungan tersebut tidaklah langgeng atau turun-temurun. Setelah priyayi tersebut meninggal, kepatuhan cacah dikembalikan lagi langsung kepada raja, sebelum memberikannya kepada priyayi lain. Ada kalanya keturunan priyayi atau pejabat wilayah diperkenankan menduduki jabatan yang semula dipegang almarhum orang tuanya, namun hal ini disertai sejumlah dana penyerta. Dibandingkan konsep feodalisme yang turun-temurun, sebenarnya hubungan cacah dan priyayi atau pejabat wilayah lebih tepat dimaknai sebagai hubungan pekerjaan seumur hidup patron.

Ketika kerajaan membutuhkan lebih banyak sumberdaya, misalnya untuk membangun jalan-jalan baru, maka raja dapat menambah nilai cacah. Penambahan nilai cacah berarti menambah jumlah penduduk yang memiliki hak untuk mengolah sawah. Atas perintah seorang priyayi yang mendapatkan kedudukan (*lungguh*) di suatu wilayah, hutan dapat dibuka dan dijadikan permukiman baru. Priyayi

tersebut dapat memutuskan jumlah cacah di wilayah baru tersebut.

Akan tetapi jika wilayah tidak bertambah namun jumlah cacah ditingkatkan, maka terjadilah pemecahan tanah garapan untuk cacah-cacah baru. Tanah garapan ini diperoleh dengan cara mengambil sebagian lahan dari cacah-cacah lama. Tidak mengherankan hal ini mengakibatkan ketegangan di antara petani penguasa lahan di pedesaan.<sup>43</sup>

Ketegangan antar cacah merupakan salah satu anomali yang muncul. Untuk mengatasi hal ini, raja berupaya meluaskan wilayah kekuasaannya. Oleh karena cacah membayar pajak dalam rangka memenuhi kebutuhan raja dan segelintir priyayi, maka penambahan wilayah kerajaan menurunkan rata-rata cacah yang diharapkan oleh raja. Dapat diperkirakan bahwa penambahan wilayah kerajaan selain mampu menjaga tingkat konsumsi raja dan priyayi, sekaligus berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.

### **Kontrol dalam Diskursus Cacah**

Kontrol dilakukan untuk mengelola anomali yang muncul dalam diskursus cacah. Keberhasilan pengelolaan diskursus tergantung dari kesetimbangan antara alokasi sumberdaya secara vertikal ke atas dan ke bawah. Tanda-tanda keruntuhan suatu negara atau kerajaan, dengan demikian, antara lain ditunjukkan oleh melemahnya diskursus ini.

Dalam masa anomali, surplus yang diambil dari cacah tidak seimbang dengan solidaritas yang diungkapkan elite dalam bentuk pembagian sumberdaya kepada rakyat. Hal ini diindikasikan oleh pemberontakan pajak dan migrasi cacah ke wilayah lain.

---

<sup>43</sup> Onghokham., *Op.cit.* hal. 9-12.

Berbagai pemberontakan petani, priyayi hingga kiai memiliki pola pemberontakan pajak. Bahkan pembentukan Kerajaan Mataram Islam juga diawali dengan pemberontakan Panembahan Senopati (kelak menjadi raja pertama) yang menolak pembayaran pajak.<sup>44</sup> Pemberontakan Diponegoro merupakan anomali diskursus cacah yang besar. Solidaritas sosial terbentuk melintasi batas-batas *lungguh* di mana cacah tinggal secara terpencar-pencar di Jawa bagian tengah dan timur. Walaupun anomali dalam bentuk Perang Jawa tersebut menguras kas Hindia Belanda, namun anomali tersebut tidak sampai menghasilkan krisis diskursus cacah. Normalisasi diskursus disamping terlihat nyata dari tertangkapnya Pangeran Diponegoro, juga sudah ditunjukkan sejak awal gerakan dalam niat untuk kembali ke tatanan awal diskursus cacah.<sup>45</sup>

Anomali di atas dapat diatasi melalui penurunan kebutuhan cacah oleh negara, disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penambahan wilayah dengan membuka hutan atau memerangi negara lain menjadi pemecahan masalah penting. Dengan kemampuannya mengatasi anomali, diskursus cacah terus berlanjut sejak awal masa kerajaan hingga masuknya penjajah Belanda ke dalam Kerajaan Mataram Islam pada abad ke 19.

*Prakawis Kaping 44:*

*Menawi wonten abdi-Dalem tetiyang siti dhusun, purun mbubak wana parden, ara-ara miwah rawa sesamenipun, dipun damel pemahan utawi pasabinan, punapa*

*dene pategilan sesamenipun, kala wiwit pambukakipun boten wonten ngemutaken, ngaruh-aruhi, utawi yen dipun aken gadhahipun siti, lamenipun ngantos tigang taun. Sareng lami-lami nunten wonten tetiyang ingkang ngaken gadhahipun siti, wana ingkang dipun bubak wau punika, ngantos dados prakawis, katur ing parentah, punika tanpa dados sapanggugatipun.*

Terjemahan:

Perkara ke 44:

Kalau ada rakyat di desa, berani membuka hutan, pegunungan, padang ataupun paya-paya sejenisnya, dipergunakan untuk perumahan atau persawahan, perladangan dan sebagainya, sedang pada waktu membuka hutan itu tidak ada yang menegurnya, atau tanah itu diaku miliknya, lamanya tiga tahun. Sesudah itu lama kemudian ada orang yang mengaku (menggugat) dialah yang mempunyai hak atas tanah yang hutan yang dibuka itu, hingga menjadi perkara diajukan ke pengadilan, maka gugatan tadi tidak diterima.

(Dikutip dari Angger Sadasa tahun 1782 M)<sup>46</sup>

Pada saat genting memang jumlah cacah juga menunjukkan kemampuan militer yang sebenarnya. Cacah merupakan tentara sukarela untuk turut berperang. Oleh karena memiliki dimensi politis dan militer maka jumlah

<sup>44</sup> H.J. de Graaf dan Th. Pigeaud. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. (Jakarta: Grafiti, 2003), hal. 252-254.

<sup>45</sup> Peter Carey. *Asal Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh*. (Yogyakarta: LKIS, 2009), hal. 39-45

<sup>46</sup> T. Roorda. 2002. *Javaansche Wetten, Serat Angger-anggeran Jawi*. (Yogyakarta: Kepel, 2002), hal. 63-64, 235

cacah yang diberikan oleh raja kepada priyayi (sebagai *lungguh* atau upah kedudukannya) dapat bertempat tinggal secara terpencar. Pemencaran seperti ini menyulitkan priyayi seandainya merencanakan makar kepada raja. Hukuman bagi priyayi yang membangkang (diindikasikan oleh pajak yang berkurang atau tidak membayarkannya) berupa pemotongan cacah (*pancasan*). Pemotongan cacah sekaligus berkonsekuensi pada pemotongan wilayah kekuasaannya.

Di samping sanksi pemotongan cacah (*pancasan*), Secara kuratif sanksi dari raja dan patih terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan dalam diskursus cacah dimulai dari bentuk denda uang kepada kerajaan, ganti kerugian hingga penjualan harta kepada kerajaan atau lawan sengketa, hukuman kerja paksa (*mbujang*) kepada lawan sengketa, atau sumpah jika tidak ditemukan barang bukti material.<sup>47</sup> Abdi-Dalem dan pejabat lain yang melanggar peraturan dapat dicopot dari jabatannya. Hukuman tertinggi berupa pembuangan tersangka ke luar kerajaan.

### **Berlanjutnya Diskursus Cacah**

Kolonialisme Belanda selama abad ke 19 memainkan dua peranan terhadap diskursus cacah. *Pertama*, kolonialisme tersebut memperpanjang anomali diskursus. Anomali ditunjukkan dalam pola pemilikan tanah secara individual, orientasi kepada tanah sebagai sumberdaya yang terpisah dari petani pengolahnya, dan konsekuensinya pada penurunan kesejahteraan penduduk desa. Aspek-aspek tersebut bertentangan dari diskursus cacah pada kondisi normal. *Kedua*, upaya untuk memanipulasi diskursus cacah melalui

diskursus tanah membuka jalan berlanjutnya sebagian aspek diskursus cacah hingga masa kini. Manipulasi tersebut di antaranya tetap memaknai tanah sebagai milik penguasa namun kini pucuk kekuasaan diganti menjadi pemerintah kolonial, menggunakan pola persewaan *lungguh* (tanah berikut cacah yang dikuasai seorang priyayi atau raja), tetap menggunakan pajak berupa kerja bakti (*bau-suku*) atau pembagian hasil panen (*maro*).

Setelah kekuasaan kompeni dialihkan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1795, dan terutama setelah kompeni bangkrut pada tahun 1799, Kerajaan Belanda secara langsung menempatkan wakilnya di Jakarta. Pola hubungan perwakilan dagang diubah menjadi penjajahan langsung, dengan menempatkan Jawa sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda. Patih, misalnya, tidak lagi diwisuda dalam keraton namun di kantor residen Belanda.<sup>48</sup> Dalam pandangan diskursus cacah, penjajahan langsung tersebut telah mengubah kepemilikan tanah dari raja kepada pemerintah jajahan.

Pada awal abad baru, Kerajaan Belanda diduduki oleh Perancis. Mengikuti perubahan kekuasaan tersebut, Perancis juga menggantikan posisi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Langkah awal yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Deandels ini ialah menuntut *lungguh* di sepanjang pesisir utara dan selatan Jawa, maupun di sekitar ibukota kerajaan di Solo dan Yogyakarta. Ia menggunakan cacah-cacah yang dikuasainya untuk membangun prasarana jalan di sepanjang pesisir utara Jawa. Fasilitas pelabuhan juga dibangun di pantai selatan Jawa, seperti Pelabuhan Cilacap.

---

<sup>47</sup> Prapto Yuwono. *Sistem Hukum Jawa Abad ke 18*. (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2003), hal. 65-72.

<sup>48</sup> S. Margana. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. xvii.

Berbeda dari gotong royong pada masa normal, selama anomali ini tuntutan kepada cacah melebihi kemampuannya untuk menjaga subsistensi sekaligus menyerahkan surplus kepada penguasa Hindia Belanda (menggantikan posisi raja). Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah cacah dan kewajiban kerja bakti, yang melebihi batasan pada masa normal. Tidak mengherankan penduduk pedesaan mengalami penurunan kesejahteraan.

Deandels juga mengenalkan birokrasi yang digaji oleh pemerintah. Sebenarnya sejak abad ke 8 telah terdapat laporan adanya segelintir pejabat keraton rendahan yang telah digaji secara bulanan dalam bentuk uang.<sup>49</sup> Akan tetapi umumnya priyayi digaji dengan *lungguh*, yang diberikan sebagai tanda jabatan. Penghitungan atas cacah dalam *lungguh* menunjukkan peluang surplus atau pajak yang akan disampaikan cacah-cacahnya dalam periode-periode yang tetap, biasanya setengah tahun sekali. Di samping itu, priyayi pemegang *lungguh* juga memiliki kekuasaan wilayah atas cacah yang tinggal di atas tanah tersebut.

Di Eropa, tentara Perancis berhasil dipukul mundur oleh Inggris. Kembali hal ini disesuaikan di Hindia Belanda dalam bentuk pengalihan kekuasaan kepada Gubernur Jenderal Raffles pada dekade kedua. Setelah mematahkan pemberontakan raja Yogyakarta bersama tentara bayaran dari India, pemerintahan jajahan Inggris meminta hak turut serta mengelola kerajaan.<sup>50</sup>

Dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan penduduk desa sekaligus mengisi kas negara, Raffles mengenalkan pajak tanah.<sup>51</sup> Diskursus cacah dimaknai secara berbeda sebagai sewa tanah, padahal tidak ada nilai ekonomi formal (ekonomi pasar, ekonomi uang) dalam hubungan cacah, priyayi dan raja. Cacah juga dinilai sebagai pemilik tanah, padahal ia hanya memiliki wewenang mengelola lahan yang dimiliki raja. Ketika sensus penduduk dilaksanakan, maka penyimpangan penghitungan muncul dalam bentuk penghitungan cacah. Sensus wilayah juga tidak dapat tepat dilaksanakan, karena di lapangan hal ini dikonversi ke dalam cacah.

Tidak mengherankan sewa tanah dimaknai penduduk desa sebagai bentuk lain dari pajak (*bulu bekti*). Program ini gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena tidak mempertimbangkan peluang rakyat untuk menghasilkan surplus di luar kebutuhannya secara mandiri. Surplus tersebut seharusnya merupakan nilai pajak tanah menurut pandangan Raffles.

Penyusupan sebagian aspek diskursus cacah muncul dalam Tanam Paksa sejak tahun 1830. Setiap cacah diminta untuk menyediakan tenaga untuk bergotongroyong mengelola perkebunan dalam setahun. Wilayah desa juga perlu membagi hasil tanaman kepada penyewa tanah. Kembali terulang, nilai gotong royong yang lebih tinggi dari kemampuan warga desa telah mengakibatkan penurunan kesejahteraan.<sup>52</sup> Masalah sosial tersebut direspons dengan pembatalan sewa tanah kerajaan.

<sup>49</sup> Pada masa Kerajaan Mataram Hindu pejabat tersebut dinamakan *manilala drwya haji*. Lihat Titi Surti Nastiti. *Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hal. 40.

<sup>50</sup> Peter Carey., *Op.cit.* hal. 88-108.

<sup>51</sup> Thomas Stamford Raffles. *The History of Java*. (Yogyakarta: Narasi, 2008), hal. 886-899.

<sup>52</sup> D.H. Burger. 1933. *Desa Ngablak (Kabupaten Pati) Tahun 1869 dan 1929*, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, eds. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. (Jakarta: Gramedia, 1984).

*Undhang-Undhang.*

*Liring layang parentah undhang-undhang, manira aparing weruh ing pekenira, manira anampani dhawuh timbalan-Dalem, sarupaning abdi-Dalem, kang padha diparingi gadhuan lungguh sawah tanah Gadhing kang padha ngladekake kagungan-Dalem lenga Kabonangan, ora kalilan dipajegake marang para tuwan-tuwan, sabab kagalih akeh pakewuhe, apa dene para tuwan-tuwan kang amajegi digalih kedhik kauntungan.*

*Dene yen ana abdi-Dalem, kang wani nerak wewaler iki, amesthi nemu deduka-Dalem kang luwih abot, poma, aja ana kang angaku ora sumurup ing unine layang parentah manira undhang-undhang iki.*

Terjemahan:

Undang-undang

Aku menerima perintah dari raja, bahwa semua abdi-Dalem yang diberi *gadhuan lungguh* sawah tanah Gading, yang harus menyerahkan minyak *Kabonangan* milik raja, tidak diperkenankan dipajaki oleh tuan-tuan, karena dianggap banyak menimbulkan masalah, dan lagi tuan-tuan yang memajaki dianggap sedikit keuntungannya.

Adapun apabila ada abdi-Dalem yang berani melanggar peraturan larangan ini, pasti akan dijatuhi hukuman yang lebih berat, ingatlah, jangan sampai ada yang mengaku tidak mengetahui isi Surat Perintah Undang-undangku ini.

(Kutipan naskah nomor 76.3 berupa

undang-undang untuk melarang menyewakan tanah Gading kepada para penyewa tanah Eropa. Undang-undang ini ditandatangani Patih Danureja tanggal 12 Desember 1861)<sup>53</sup>

## Kesimpulan

Ada baiknya mengubah sudut pandang evolusionisme dalam memandang teleologi dari diskursus cacah menuju diskursus tanah. Pandangan yang lebih tepat ialah mendudukan kedua diskursus secara sejajar. Hal ini tidak saja disebabkan diskursus cacah memiliki ciri-ciri ekonomi modern seperti pasar, namun juga karena argumen-argumennya masih memasuki diskursus tanah yang berlaku pada saat ini.

Diskursus cacah memiliki pola kesetimbangan antara alokasi vertikal dari rakyat kepada penguasa dan sebaliknya. Pola kesetimbangan sumberdaya memungkinkan diskursus cacah bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama.

Dengan menyadari daya tahan kelembagaan dalam diskursus cacah tersebut, seharusnya selain kemunculan pesimisme akan kemampuan diskursus ini dalam mengembangkan ekonomi, juga ditunjukkan peluang optimismenya. Gerak revolusioner dari pola yang rerlatif komunal namun dipimpin oleh penguasa tersebut, kiranya perlu dimulai dari golongan penguasa sendiri. Sebelum era Kerajaan Mataram Islam, diskursus cacah mampu menggerakkan pembangunan candi-candi dan perdagangan beras lintas negara. Berbeda dari pandangan pesimis yang menantikan munculnya hak milik atas lahan, golongan menengah atau borjuis, serta tumbuhnya buruh bebas,

---

<sup>53</sup> S. Margana. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 58, dan 764.

sebenarnya kemajuan masyarakat dalam diskursus cacah dimungkinkan tanpa melalui kapitalisasi. Yang dibutuhkan berupa pimpinan penguasa untuk mengembangkan ekonomi secara bersama-sama.

Kolonialisme Eropa pada abad ke 19 telah memperlama anomali dalam diskursus cacah. Namun selain hal tersebut, kolonialisme tetap menggunakan sebagian aspek diskursus cacah. Cacah sebagai satuan pekerja (*bau suku*) diadaptasi dalam perkebunan, di mana di samping buruh yang benar-benar diupah, pekerjaan juga dilaksanakan oleh anggota keluarganya untuk mencapai target produksi.

J e m b a t a n b a g i t e t a p berlangsungnya argumen cacah muncul hingga saat ini. Negara dipandang sebagai pemilik tanah, terutama di luar permukiman dan lahan produksi, sebab tanah masih

menjadi indikasi wilayah negara. Cacah sebagai pengelola tanah kini diadaptasi menjadi pemilik tanah. Wilayah di mana cacah-cacah pada masa lalu berkumpul menjadi komunitas, kini dimaknai sebagai tanah komunal atau tanah adat. *Bau suku* dalam diskursus cacah diadaptasi pada sebagian jenis industri, seperti dalam mekanisme borongan yang dikerjakan di rumah, contohnya pada perusahaan border dan rokok kretek. Selama di rumah pekerjaan tersebut dikerjakan hampir seluruh anggota rumahtangga, meskipun penanggung jawab (“cacah”) kerja hanya satu orang.

Oleh sebab itu, tantangan pada saat ini ialah menggunakan kondisi masuknya aspek diskursus cacah ke dalam diskursus tanah, atau pola peperangan kedua diskursus, untuk kepentingan lapisan terbawah. Jelaslah peperangan kedua diskursus merupakan kondisi anomali, bahkan dapat menuju kondisi krisis.

## Daftar Pustaka

- Anderson, P. 2004. *Asal-Usul Postmodernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bellah, R.N. 1992. *Religi Tokugawa, Akar-akar Budaya Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Bertens,, K. 2006. *Filsafat Barat Kontemporer: Perancis*. Jakarta: Gramedia.
- Best, S, D. Kellner. 2003. *Teori Posmodern, Interogasi Kritis*. Yogyakarta: Boyan.
- Boomgard, P. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: Djambatan.
- Burger, D.H. 1933. *Desa Ngablak (Kabupaten Pati) Tahun 1869 dan 1929, dalam* Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, eds. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.
- Carey, P. 2009. *Asal Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh*. Yogyakarta: LKIS.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. Jakarta: Bambu
- Fauzi, N. 1999. *Petani & Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- \_\_\_\_\_. 1995. *Modal, Kekuasaan dan Hukum Agraria*, dalam Benny K. Harman, *et.al.*, eds. *Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah*. Jakarta: YLBHI.
- Foucault, M. 2008. *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*. Terjemahan La Volonte de Savoir: *Histoire de la Sexualite*. Jakarta: YOI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Order of Thing: Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*. Terjemahan *The Order of Thing: An Archaeology of Human Sciences* oleh B. Priambodo, P. Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2002a. *Menggugat Sejarah Ide*. Terjemahan *The Archaeology of Knowledge* oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.
- \_\_\_\_\_. 2002b. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault*. Terjemahan dari P Rabinow, *ed.* *Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984*. Yogyakarta: Jalasutra.
- \_\_\_\_\_. 2002c. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang.
- Geertz, C. 1989. *Penjaja dan Raja*. Jakarta: YOI.
- Graaf, H.J.d, Th. Pigeaud. 2003. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: Grafiti.
- Groeneveldt, W.P. 2009. *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Jakarta: Bambu.
- Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: The MIT Pr.
- Kuhn, T.S. 2002. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Terjemahan *The Structure of Scientific Revolution* oleh Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Laclau, E, C. Mofe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis, Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist.
- Margana, S. 2004. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moore, B. Jr. 1967. *Social Origin of Dictatorship and Democracy, Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Pr.
- Nastiti, T.S. 2003. *Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nietzsche, F. 2002. *Beyond Good and Evil: Prelude Menuju Filsafat Masa Depan*. Terjemahan oleh B.H. Winarno. Yogyakarta: Ikon.
- Onghokham. 1979. *Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah*, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *eds.* 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.

- Purwanto, B. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Yogyakarta: Ombak.
- Raffles, T.S. 2008. *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.
- Riana, I.K. 2009. *Kakawin Desa Warnnana uthawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Kompas.
- Roorda, T. 2002. *Javaansche Wetten, Serat Angger-anggeran Jawi*. Yogyakarta: Kepel.
- Ryanto, Gatot. 1995. *Kasus Gunung Badega-Garut*. dalam Benny K. Harman, *et.al.*, eds. *Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah*. Jakarta: YLBHI.
- Sarup, M. 2008. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Suhendar, E, Y.B. Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.
- Tauchid, M. 1952. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia, Bagian Pertama*. Djakarta: Tjakrawala.
- Wolf, E. 1982. *Europe and the People without History*. Los Angeles/Berkeley: Univ. of California Pr.
- Yuwono, P. 2003. *Sistem Hukum Jawa Abad ke 18*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Zoest, A.v. 1991. *Fiksi dan Nonfiksi dalam Kajian Semiotik*. Jakarta: Intermasa.

## PERMUKIMAN KOTA DAN MASALAHNYA Kasus Kota Yogyakarta

Sukari \*

### Abstrak

*Indonesia merupakan negara yang masih menghadapi masalah perkotaan, antara lain permukiman kota. Hal ini salah satunya akibat urbanisasi yang terus menerus meningkat, sehingga penduduk kota semakin padat. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana atau ruang kota khususnya salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu rumah. Namun karena keterbatasan lahan di perkotaan, pembangunan perumahan dan permukiman bergerak ke arah pinggiran kota. Selain itu, masalah yang dihadapi daerah perkotaan adalah kemiskinan kota dan permukiman kumuh. Untuk itu pemerintah telah membangun rumah dengan program perumnas, rumah susun dan rusunawa.*

*Permasalahan perkotaan ini juga terjadi di Kota Yogyakarta, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama perumahan ke arah pinggiran kota dan sekitarnya. Perkembangan Kota Yogyakarta yang kena dampaknya adalah Kecamatan Umbulharjo dan sekitar kota yang secara administrasi berbatasan adalah Kabupaten Sleman dan Bantul. Dampak tersebut antara lain makin berkurangnya lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta fasilitas publik yang lain.*

*Konversi lahan pertanian menjadi permukiman lebih banyak di wilayah Kabupaten Sleman dibandingkan wilayah Kabupaten Bantul. Namun dalam dekade terakhir perkembangan kota cenderung ke arah selatan wilayah Bantul karena lahan di wilayah Sleman makin mahal. Dengan demikian perkembangan Kota Yogyakarta ke daerah pinggiran kota, selain merugikan berkurangnya lahan sawah untuk perumahan dan permukiman juga terdapat segi positifnya. Hal yang menguntungkan (positifnya) adalah harga lahan menjadi mahal. Di samping itu, adanya pembangunan kampus, penduduk sekitarnya dapat menambah usaha lain misalnya kos-kosan, warung makan, dan lainnya.*

*Kata kunci: Permukiman kota, masalahnya, Kota Yogyakarta*

### A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam perkembangan kota. Permasalahan tersebut antara lain perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) ataupun penambahan

penduduk alamiah di daerah perkotaan. Menurut Arif,<sup>1</sup> selain urbanisasi perkembangan kota disebabkan oleh perpindahan kota lain yang lebih kecil, pemekaran wilayah atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Hal ini terjadi terutama di kota-kota besar, yang

---

\* Penulis adalah staf peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta

<sup>1</sup> <http://www.penataanruang.net/taru/upload/paper/sekjen-140604-pdf> diakses 15 September 2010

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana atau ruang kota, khususnya kebutuhan akan tempat tinggal.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal tersebut, masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman di daerah perkotaan adalah luas lahan yang semakin terbatas, harga tanah dan material bangunan yang dari waktu ke waktu semakin mahal, dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi seperti ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan permukiman kumuh. Selain itu, masalah yang dihadapi di daerah perkotaan adalah kemiskinan kota. Pada waktu jumlah penduduk di perkotaan belum bertambah yang berarti, kemiskinan kota dan urbanisasi tidak menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan. Namun setelah terjadi urbanisasi yang terus meningkat, penduduk kota makin padat, sehingga menjadi beban di daerah perkotaan.

## B. Masalah Perumahan dan Permukiman<sup>2</sup>

Pada waktu jumlah penduduk di perkotaan perkembangannya tidak sebanyak sekarang, perumahan bukan menjadi masalah. Manusia masih dapat membangun rumahnya dengan leluasa karena tanah masih luas. Namun kondisi sekarang, penduduk perkotaan makin banyak dan makin padat yang antara lain akibat urbanisasi secara besar-besaran. Akibatnya perumahan menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah.

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah telah berusaha membangun perumahan *real estate*, perumnas, rumah susun, dan yang sekarang ini sedang digalakkan adalah pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa).<sup>3</sup>

Pembangunan perumahan dengan rumah susun atau rusunawa dilakukan karena tanah yang tersedia untuk permukiman semakin sempit, sehingga alternatifnya membangun rumah secara vertikal (menumpuk). Dengan demikian tanah yang tidak terlalu luas, dapat untuk membangun rumah atau menampung beberapa keluarga. Selain itu, pembangunan rumah susun atau rusunawa disediakan bagi mereka yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian terjadi perubahan pola permukiman, dari menyebar menjadi menumpuk ke atas, dan akan memberikan konsekuensi tertentu. Ruang gerak menjadi terbatas, harus naik turun tangga, pola komunikasi berubah, demikian juga kebiasaan-kebiasaan tertentu harus dirubah.<sup>4</sup>

Perumahan atau rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, karena selain untuk berlindung, juga memiliki fungsi lain. Menurut Suryaningsih<sup>5</sup>, fungsi lain dari rumah adalah sebagai lingkungan tempat tinggal untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga. Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kehidupan semata, akan tetapi merupakan proses berfikir dalam menciptakan ruang kehidupan

<sup>2</sup> Istilah perumahan dalam makalah ini diartikan bangunan tempat tinggal, sedangkan permukiman diartikan daerah tempat tinggal

<sup>3</sup> Parwati Soebroto, E. "Aspek-aspek Sosial Psikologis Pada Pemukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah," dalam *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota* (Bandung: Alumnii), hal. 51.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> <http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com-content&task=view&id=14&Itemid=13>, di akses tanggal 12 September 2010.

untuk kehidupan masyarakat. Dengan demikian rumah dan permukiman mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Di samping itu, pembangunan perumahan dan permukiman juga harus mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas manusia, meniadakan kecemburuan sosial dan secara positif menciptakan perumahan dan permukiman yang mencerminkan kesetiakawanan serta keakraban sosial.

Mengingat pentingnya tempat tinggal (rumah), maka setiap manusia telah berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar ini. Namun kenyataannya seperti di daerah perkotaan, tidak semua mampu memiliki rumah terutama yang berpenghasilan rendah. Untuk menanggulangi kebutuhan pokok ini, pemerintah telah mengusahakan pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Menurut Hamid dan Happy Santosa,<sup>6</sup> rusunawa bukan menyediakan tempat tinggal tetap, tetapi untuk mengurangi kawasan kumuh. Rusunawa hanya merupakan pengganti tempat tinggal para penghuni kawasan illegal yang menempati tanah milik publik (tepi sungai, pinggir rel kereta api, taman kota dan lainnya) yang akan digusur pemerintah. Jadi pembangunan rusunawa oleh pemerintah dengan anggaran APBN dan APBD, dimaksudkan untuk disewakan kepada anggota masyarakat terutama MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang belum mampu membeli rumah sendiri, meskipun dengan cara angsuran melalui Kredit Pemilikan

Rumah (KPR). Selain rusunawa, pemerintah juga membangun rusunami (rumah susun sederhana milik) untuk diperjualbelikan dalam pasar perumahan.

Dengan meningkatnya kebutuhan perumahan, persaingan untuk mendapatkan lahan juga meningkat karena terbatasnya ketersediaan lahan permukiman dan harga tanah makin mahal. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat membangun permukiman baru di lokasi yang tidak diperuntukkan perumahan, salah satunya adalah di tepian sungai. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, telah dikembangkan permukiman baru di daerah pinggiran kota.

Berkaitan dengan perumahan dan permukiman ini, setiap warga negara mempunyai hak atas perumahan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, yaitu pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur".<sup>7</sup> Untuk itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya di kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku di kota yang bersangkutan, sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang kota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 3 dinyatakan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas

---

<sup>6</sup> (<http://www.snps.its.ac.id/data/makalah/Kreteria%20Rusunawa%20Untuk%20Pemukiman%20Kembali%20Resettlemen.....>) diakses 15 September 2010

<sup>7</sup> [http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=14&Itemid=13](http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13), di akses tanggal 12 September 2010.

manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian pada Pasal 4 dirumuskan bahwa tujuan penataan perumahan dan permukiman, yaitu untuk (1) memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; (2) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (3) memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan (4) menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.<sup>8</sup>

### C. Kemiskinan Kota dan Permukiman Kumuh

Salah satu masalah yang terjadi di daerah perkotaan adalah kemiskinan kota. Kemiskinan salah satu penyebabnya adalah urbanisasi. Hal ini disebabkan pada umumnya penduduk yang melakukan perpindahan dari pedesaan ke perkotaan tingkat pendidikannya rendah. Akibatnya dalam mencukupi kebutuhan hidup di perkotaan tidak mampu bersaing dan menjadi pengangguran. Padahal di kota menjanjikan kesempatan dan kesejahteraan yang luas, dan kesempatan maju.

Mengenai kemiskinan kota, setiap kota harus menyusun penaksiran tentang kemiskinan kota sendiri-sendiri secara berbeda-beda dan menggunakan alat-alat serta pendekatan umum dengan

tujuan untuk menjawab persoalan yang dianggap paling mendesak oleh penduduk setempat. Karakteristik hidup miskin di setiap tempat berbeda-beda, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Menurut laporan pembangunan dunia dari Bank Dunia tahun 1990, menyoroti masalah kemiskinan difokuskan pada dimensi pendapatan, “kemiskinan yang diukur dengan rendahnya pendapatan cenderung lebih buruk di daerah-daerah perdesaan”, yang memperkenankan perbedaan-perbedaan yang seringkali substansial dalam biaya hidup antara kota dan pedesaan.<sup>9</sup> Dengan pengertian lain bahwa karakteristik penduduk miskin di kota adalah penduduk yang berpenghasilan rendah.

Kondisi penduduk tersebut tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok manusia yaitu perumahan. Pada umumnya penduduk miskin di perkotaan menempati lingkungan permukiman kumuh. Pengertian permukiman kumuh menurut Wicaksono<sup>10</sup> adalah:

“suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar berada dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Secara umum permukiman kumuh terlihat tingkat kepadatan

<sup>8</sup> (<http://almaradona.multiply.com/journal/item/57/Permasalahan-Permukiman-Perkotaan>), diakses 23 Oktober 2010.

<sup>9</sup> (<http://file.upi.edu/Direktori/E%20-%20FPTK/Jur.....>) diakses 15 September 2010

<sup>10</sup> Wicaksono, R., “Penyediaan Prasarana dan Sarana Sebagai Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan” disajikan pada Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Permukiman Kumuh Menuju Habitat Kota Hijau Lestari, yang diselenggarakan Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, 27 Mei 2010

penduduk, hunian, bangunan sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi infrastruktur fisik dan sosial seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka, rekreasi, sosial atau fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut”.

Menurut penelitian Sumunar, kondisi sosial ekonomi penghuni berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman. Variabel kondisi sosial ekonomi seperti tahun sukses pendidikan, penghasilan dan besarnya rumah tangga, menunjukkan korelasi dengan kondisi kualitas lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman di Kota Yogyakarta diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu permukiman kualitas baik, sedang dan buruk (kumuh). Lingkungan permukiman buruk (kumuh) terutama dijumpai di pusat Kota Yogyakarta, sepanjang sungai, dan sekitar jalur kereta api. Biasanya pemukim ini dihuni para penglaju komunitas yang setiap waktu tertentu pulang kampung. Menurut hasil penelitian Marwasta, penambahan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta umumnya terjadi pada lahan permukiman di sekitar badan sungai, yaitu di Sungai Winongo, Code, Gadjah Wong, dan sekitar jalur kereta api. Proses perkembangan permukiman kumuh ini

lebih didominasi oleh proses pemadatan bangunan rumah dan proses penuaan bangunan rumah mukim, yang keduanya merupakan penyebab terjadinya *deteriosasi* (penurunan mutu) lingkungan permukiman.<sup>11</sup>

#### **D. Perkembangan Kota (Kasus Kota Yogyakarta)**

Jumlah penduduk di daerah perkotaan yang terus bertambah menyebabkan kota menjadi padat. Akibatnya kota makin tidak mampu menampung kegiatan penduduk. Karena wilayah kota secara administrasi terbatas, maka harus mengalihkan ke daerah pinggiran kota. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota dengan berbagai dampaknya. Perkembangan kota mengakibatkan adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (*urban sprawl*).<sup>12</sup>

Selain itu, akibat perkembangan kota ke daerah pinggiran kota terjadi proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari proses transformasi spasial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah perkotaan merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan. Akibat selanjutnya proses ekspansi kota ke wilayah pinggiran kota terjadi pada perubahan fisik misal perubahan tata guna lahan, demografi, keseimbangan ekologis, serta kondisi sosial ekonomi.<sup>13</sup>

Hal tersebut seperti dikemukakan

<sup>11</sup> (<http://bumikusiji.blogspot.com/>) diakses 28 September 2010

<sup>12</sup> (<http://www.docstoc.com/docs/20989406/D.....>) diakses 15 September 2010

<sup>13</sup> Ibid

Supriyanto, bahwa faktor utama perkembangan dan pertumbuhan kota adalah peningkatan jumlah penduduk dan berbagai aktivitasnya, sehingga menimbulkan peningkatan aktivitas kota dan masalah kepadatan kota. Akibat yang terjadi perkembangan dan pertumbuhan kota adalah permasalahan mengenai terbatasnya luas lahan yang terdapat di kota. Lahan sebagai sumberdaya yang tidak dapat diperbarui memiliki jumlah dan kapasitas yang terbatas. Perkembangan kota menuntut ketersediaan lahan yang cukup untuk mendukung penduduk dengan segala aktivitasnya, yang dapat menimbulkan konflik penggunaan lahan di kota-kota Indonesia. Pada akhirnya keterbatasan lahan yang dimiliki kota memaksa kota berkembang ke wilayah pinggiran.<sup>14</sup>

Perluasan kota yang terjadi di wilayah pinggiran kota disebabkan oleh daya tarik wilayah pinggiran yang tidak dimiliki oleh kota, seperti tersedianya lahan dalam jumlah relatif luas dengan harga yang relatif terjangkau serta memiliki daya tarik alam tersendiri. Hal yang menarik bila dibandingkan kota adalah karena lingkungan kota yang padat, sesak dan banyak terjadi degradasi lingkungan akibat polusi udara, limbah, sampah dan sebagainya.

Menurut Yunus, salah satu tanda terjadinya pemekaran atau perkembangan kota di daerah pinggiran kota adalah adanya gejala *filtering up*, yaitu pergantian pemukim-pemukim lama dengan pemukim-pemukim baru yang kondisi ekonominya lebih baik. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik ini para pemukim di daerah pinggiran kota cenderung mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik pula.<sup>15</sup>

Salah satu kota di Indonesia yang tingkat perkembangannya termasuk pesat adalah Kota Yogyakarta. Menurut Sontosudarmo (1987), Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat kebudayaan, pusat pemerintahan, daerah pariwisata dan kota pelajar senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan secara terus menerus ini mengakibatkan daerah yang langsung berbatasan dengan Kota Yogyakarta, telah banyak mendapat pengaruh kota. Sebagai kota kebudayaan dengan terdapatnya daerah-daerah yang mempunyai nilai sejarah dan budaya, maka daerah-daerah tersebut perlu dilestarikan. Dengan demikian maka perkembangan Kota Yogyakarta akhirnya ke daerah pinggiran kota, yang secara administrasi termasuk wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman.<sup>16</sup>

Daerah pinggiran yang mengalami dampak paling besar dari perkembangan Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Umbulharjo. Menurut hasil penelitian Supriyanto (2008), Kecamatan Umbulharjo yang semula merupakan wilayah pertanian mulai berubah fungsi menjadi wilayah non pertanian khususnya permukiman. Menurut data BPS tahun 2002, Kecamatan Umbulharjo dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Yogyakarta, merupakan kecamatan yang paling banyak mengalami konversi lahan pertanian. Jumlah penurunan luas pertanian selama 6 tahun (1996-2002) sebesar 36,36 ha atau terjadi penurunan 6,1 ha per tahunnya. Wilayah Umbulharjo menjadi tujuan pemekaran Kota Yogyakarta karena memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi, mudah dicapai dengan adanya jalur lingkaran selatan, keberadaan terminal bus di

<sup>14</sup> (<http://eprints.undip.ac.id/4076/supriyanto02.pdf>), diakses 28 September 2010.

<sup>15</sup> *Loc. cit*

<sup>16</sup> (<http://www.docstoc.com/docs/20989406/D.....>), diakses 15 September 2010

Kelurahan Giwangan. Di samping itu, Kecamatan Umbulharjo memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu sebesar 8.534 jiwa/km<sup>2</sup>, dan luas wilayah terbesar yaitu sekitar 25 % dari luas wilayah keseluruhan Kota Yogyakarta.<sup>17</sup>

Perkembangan kota ke daerah pinggiran telah banyak mengubah tata guna lahan terutama di daerah pinggiran yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta, yaitu daerah hijau yang telah berubah menjadi perumahan dan bangunan lainnya. Konsekuensi perkembangan pembangunan perumahan adalah konversi lahan pertanian ke lahan permukiman, yang berakibat kecenderungan dari pemanfaatan lahan sawah untuk perumahan, baik yang termasuk wilayah Kabupaten Sleman maupun Kabupaten Bantul.

Menurut hasil penelitian Su Ritohardoyo mengenai konversi lahan tersebut, jumlah lahan untuk 269 lokasi perumahan yang dibangun developer di sekitar Kota Yogyakarta sampai tahun 2000, secara keseluruhan seluas 1.232,92 ha. Dari jumlah tersebut, seluas 1.068,45 ha (86,66 %) di sekitar Kota Yogyakarta yang termasuk wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan yang termasuk wilayah Kabupaten Bantul seluas 164,47 ha (13,34 %). Bentuk-bentuk penggunaan lahan sebelum digunakan untuk perumahan, sebagian besar (67,3 %) berupa lahan sawah, sedangkan yang lain terdiri dari atas lahan tegal (11,5 %), lahan sawah dan tegal (8,6 %), dan lahan pekarangan (12,6 %). Selanjutnya dijelaskan bahwa konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan yang dibangun developer

swasta, berkembang sejak tahun 1973 berawal dari pemanfaatan lahan tegal untuk Perumahan Dosen IKIP di Deresan yang termasuk wilayah Kabupaten Sleman; hingga tahun 2000 lebih banyak memanfaatkan lahan sawah. Untuk wilayah Kabupaten Bantul terjadi di Perumahan Pendowoharjo pada tahun 1980 berupa lahan tegal, selanjutnya sampai tahun 2000 memanfaatkan lahan sawah.<sup>18</sup>

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa konversi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang dibangun developer swasta di Kabupaten Sleman lebih luas dibandingkan dengan Kabupaten Bantul. Untuk Kabupaten Sleman selama 27 tahun (1973-2000) telah terjadi peningkatan yaitu dari 3 ha (tahun 1973) menjadi 1.068,45 ha (tahun 2000), dengan tingkat perkembangan luas konversi lahan seluas 41,09 ha per tahun. Perkembangan luas konversi di Kabupaten Bantul selama 20 tahun (1980-2000) telah terjadi peningkatan yaitu dari 2,75 ha (tahun 1980) menjadi 164,47 ha (tahun 2000), dengan tingkat perkembangan luas konversi lahan pertanian seluas 9,67 ha per tahun. Namun demikian, perkembangan luas konversi lahan pertanian untuk perumahan secara umum maupun secara khusus di setiap bagian daerah sekitar kota bersifat fluktuatif. Angka-angka ini artinya bahwa luas konversi lahan pertanian untuk perumahan di sekitar Kota Yogyakarta, baik yang terjadi bagian utara (Sleman) maupun bagian selatan (Bantul) semakin lama semakin luas.

Perubahan yang terjadi di Kabupaten Bantul sebagai akibat perkembangan kota adalah pesatnya

---

<sup>17</sup> (<http://eprints.undip.ac.id/4076/supriyanto02.pdf>), diakses 28 September 2010.

<sup>18</sup> <http://www.ritohardoyo.com/downlot.php?file=file/KONVERSI-LAHAN-PERKEMBANGAN-PERMUKIMAN-DI-SEKITAR-KOTA-YOGYAKARTA>.

pertumbuhan wilayah *aglomerasi* (pemusatan kawasan/lokasi) atau konversi lahan pertanian untuk perumahan terutama terjadi di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banguntapan, Sewon dan Kasihan. Sepanjang triwulan I tahun 2010, ada ratusan kawasan perumahan baru di tiga kecamatan tersebut. Kawasan perumahan baru itu terletak di 13 lokasi perumahan yaitu 9 lokasi di Kasihan, 3 di Banguntapan dan 1 di Sewon. Jumlah rumah yang dibangun pengembang di setiap lokasi bervariasi mulai dari 10 unit sampai 73 unit rumah. Adapun lokasi yang menjadi pilihan sekitar jalan lingkar selatan. Kawasan *anglomerasi* ini tidak hanya untuk permukiman, tetapi untuk fasilitas pendidikan dan rusunawa serta perkantoran, yang semula terkonsentrasi di kota dan Sleman. Fasilitas pendidikan antara lain kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ahmad Yani. Fasilitas perkantoran yang tingkat Provisni DIY antara lain Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Badan Pusat Statistik. Perkembangan permukiman baru dan fasilitas lainnya cenderung ke arah selatan (Bantul) karena lahan di Sleman semakin sempit dan mahal harganya, sehingga wilayah *aglomerasi* Bantul menjadi pilihan.<sup>19</sup>

Pertumbuhan *aglomerasi* yang terus meningkat untuk pembangunan permukiman dan prasarana publik berdampak tidak baik bagi sektor pertanian. Lahan pertanian semakin berkurang yaitu mencapai angka 80 hektar per tahun. Lahan tersebut sebagian besar berupa lahan subur

dengan pengairan irigasi yang baik. Apabila hal ini terus dibiarkan produksi pangan akan terganggu. Selain dampak negatif, pembangunan permukiman baru, terutama pembangunan fasilitas pendidikan di jalan lingkar selatan juga berdampak positif. Dampak positifnya yaitu dengan dibangunnya kampus muncul usaha lain misalnya kos-kosan, warung makan, toko kelontong, warung internet. Adanya jalur lingkar selatan dapat menyatukan wilayah pinggiran Bantul di daerah utara dengan Kota dan Sleman.

Pengembangan permukiman di Kabupaten Bantul seharusnya terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Pajangan, bahkan Perumnas sudah membangun ratusan rumah. Lokasi di Pajangan yang menjadi kendala adalah daerahnya terpencil dan sarana prasarana yang masih minim. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya menekan laju alih fungsi dengan membebaskan pajak bumi dan bangunan untuk lahan pertanian bagi warga miskin. Langkah lain adalah sertifikasi lahan secara cuma-cuma. Lahan pertanian yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan minimal lima tahun tidak boleh dialihfungsikan ke non pertanian. Namun langkah ini ternyata tidak mampu membendung pemilik lahan untuk mengalihkan lahan pertanian ke pekarangan. Hal ini karena lahan pertanian tidak lagi menjanjikan, sementara harga lahan pekarangan di wilayah *aglomerasi* sangat menarik yaitu mencapai 500 ribu sampai 2 juta rupiah per meter persegi, dibandingkan sepuluh tahun yang lalu harganya hanya puluhan ribu saja.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Eny. "Bantul Menunggu Penataan: Perkembangan Pesat Aglomerasi Lahirkan Peluang dan Ancaman", dalam: *Kompas*, Senin 19 Juli 2010, halA(2-6).

<sup>20</sup> *Ibid*

## E. Penutup

Faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman di daerah perkotaan adalah pesatnya pertumbuhan penduduk kota. Selain pertumbuhan secara alamiah penduduk kota sendiri, faktor yang dominan pertumbuhan penduduk kota adalah urbanisasi. Akibat pertumbuhan penduduk kota yang terus meningkat, kebutuhan penyediaan akan sarana dan prasarana juga terus meningkat baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut antara lain permukiman, baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah.<sup>21</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk mengenai perumahan dan permukiman di daerah perkotaan yang menjadi masalah adalah terbatasnya lahan dan harga lahan mahal. Maka tidak mengherankan di perkotaan muncul permukiman kumuh dan liar yang menempati lahan illegal, dan ini menjadi permasalahan kota. Menurut Esmara permasalahan tersebut berkaitan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kesenjangan dan tidak disiplinnya masyarakat terhadap lingkungannya. Hal ini akan

menjadi beban berat bagi pemerintah kota untuk menangani, karena menyangkut kemampuan lembaga-lembaga pemerintah kota/kabupaten dalam pengaturan, pengorganisasian tata ruang dan sumberdaya yang dimiliki kota dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat kota.<sup>22</sup>

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang juga mengalami perkembangan kota dan menghadapi masalah permukiman kota. Usaha untuk mengatasi perkembangan kota terutama terkait pemenuhan perumahan dan permukiman kearah pinggiran kota, yaitu secara adminitrasi termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Perkembangan pembangunan perumahan dan permukiman di pinggiran Kota Yogyakarta, salah satu akibatnya adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Konversi lahan pertanian untuk perumahan bukan saja lahan kering (tegal), namun sebagian besar telah mengkonversi lahan basah (sawah) untuk perumahan baik di Kabupaten Sleman dan di Bantul. Selain dampak negatif tersebut, dampak positifnya antara lain adalah mengurangi permukiman kumuh di kota, harga tanah di pinggiran kota menjadi mahal, dan muncul usaha lain.

## Daftar Pustaka

A ditya , “Kualitas Lingkungan Permukiman,” 2008. (<http://bumikusiji.blogspot.com/>) diakses 28 September 2010

Anwar Hamid dan Happy Santosa, “Kreteria Rusunawa Untuk Pemukiman Kembali (*Resttlemen*) Masyarakat Tepian Sungai Desa Batu, Kota Amban”, dalam Seminar Nasional Pascasarjana X-ITS, Surabaya 4 Agustus 2010 (<http://www.snps.its.ac.id/data/makalah/Kreteria%20Rusunawa%20Untuk%20Pemukiman%20Kembali%20Resettlemen.....>) diakses

---

<sup>21</sup> (<http://moelyawan.blogspot.com/2010/03/penataan-wilayah-kumuh.html>), diakses 23 Oktober 2010.

<sup>22</sup> Ibid

15 September 2010

- Ardiansyah, A., “Dampak Kemiskinan Kota Terhadap Perumahan dan Permukiman di Kota-Kota Besar Indonesia”, Arikel Buletthin TERAS, 2009. (<http://file.upi.edu/Direktori/E%20-%20FPTK/Jur.....>) diakses 15 September 2010
- Arif, B., “Aplikasi Penataan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kota Kebijakan Pemerintah” (<http://www.penataanruang.net/taru/upload/paper/sekjen-140604-pdf>.) diakses 15 September 2010
- Eny, “Bantul Menunggu Penataan: Perkembangan Pesat Aglomerasi Lahirkan Peluang dan Ancaman”, Yogyakarta: *Kompas*, Senin 19 Juli 2010.
- , “Perubahan Kota: Saat Lahan Pertanian Tak Lagi Menjanjikan”, Yogyakarta: *Kompas*, Senin 19 Juli 2010.
- Giyarsih,S.R., “Gejala *Urban Sprawl* Sebagai Pemicu Proses Densifikasi Permukiman di Daerah Pinggiran Kota (*Urban Fringe Area*): Kasus Pinggiran Kota Yogyakarta (<http://www.docstoc.com/docs/20989406/D.....>) diakses 15 September 2010
- Mulyawan,I., “Penataan Wilayah Permukiman Kumuh Berbasis Kerakyatan (Sebuah Solusi Kekumuhan Wilayah, ” (<http://moelyawan.blogspot.com/2010/03/penataan-wilayah-kumuh.html>), diakses 23 Oktober 2010.
- Parwati Soebroto, E. “Aspek-aspek Sosial Psikologis Pada Pemukiman Masyarakat Ber-penghasilan Rendah” dalam *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota* (Budihardjo: Pe-nyunting). Bandung: Alumni. 1984.
- “Permasalahan Permukiman Perkotaan,” (<http://almaradona.multiply.com/journal/item/57/Per-masalahan-Permukiman-Perkotaan>), diakses 23 Oktober 2010.
- Ritohardoyo,Su, “Konversi Lahan dan Perkembangan Permukiman di Sekitar Kota Yogyakarta,” (<http://www.ritohardoyo.com/downlot.php?file=file/KONVERSI-LAHAN-PERKEMBANGAN-PERMUKIMAN-DI-SEKITAR-KOTA-YOGYAKARTA.pdf>.) 2001. diakses 28 September 2010
- Supriyanto, “Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman Dengan Memanfaatkan Teknik Penginderaan Jauh dan SIG. Studi Kasus: Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta”. *Tugas Akhir*. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Undip Semarang, 2008. (<http://eprints.undip.ac.id/4076/supriyanto02.pdf>), diakses 28 Sept. 2010.
- Suryaningsih, “Tinjauan Terhadap Pengembangan Wilayah Perumahan dan Permukiman Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan” 2008. (<http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com->

content&task=view&id=14&Itemid=13, di akses tanggal 12 September 2010.

Wicaksono, R ., “Penyediaan Prasarana dan Sarana Sebagai Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan” *disajikan pada Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Per-mukiman Kumuh Menuju Habitat Kota Hijau Lestari*, yang diselenggarakan Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, 27 Mei 2010

ISSN 1907-9605



9 771907 960513